

KAJIAN INDIKATOR LINTAS SEKTOR

Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)



BADAN PUSAT STATISTIK

KAJIAN INDIKATOR LINTAS SEKTOR

Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)



BADAN PUSAT STATISTIK

©Badan Pusat Statistik
Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

ISBN : -
No. Publikasi : 07330.1413
Katalog BPS : 3102020
Diproduksi : Badan Pusat Statistik

Pengarah : Dr. Suhariyanto
Penanggung Jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si.
Editor : Dr. Ali Said, MA, Indah Budiati, S.ST, M.Si
Penulis : Agus Sutopo, S.ST, Dian Fitriana Arthati, S.ST, Utari Azalika Rahmi, S.ST
Desain Cover & Layout : Zulhan Rudiyanasyah, SE, ME

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014
vi + 162 halaman; 17,6 x 25 cm

KATA PENGANTAR

Millennium Development Goals (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca-2015 yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, **ketahanan pangan dan energi**, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Publikasi Kajian SDGs ini berisi tentang kajian literatur mengenai target dan indikator SDGs yang diusulkan oleh beberapa lembaga dan forum internasional diantaranya High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Open Working Group (OWG) dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Dari usulan-usulan tersebut dilakukan *matching* indikator ke target di setiap tujuan-tujuan SDGs yang diusulkan. Selain itu, ditampilkan juga ketersediaan indikator-indikator tersebut di Indonesia.

Perlu dicatat bahwa kajian ini merupakan kajian awal dalam mengidentifikasi ketersediaan data dan sumber data indikator SDGs di Indonesia. Kajian ini akan dilanjutkan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional dalam penyusunan indikator SDGs. Pada publikasi SDGs mendatang diharapkan bisa menyajikan data awal terkait indikator-indikator SDGs untuk memotret kondisi awal diberlakukannya agenda pembangunan pasca-2015.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2014



Dr. Suryamin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
Bab 1. Pendahuluan		3
1.1. Latar Belakang		3
1.2. Tujuan		5
1.3. Cakupan		5
Bab 2. Kajian Teori		9
2.1. SDGs dari <i>High Level Panel For Eminent Person</i> (HLPEP).....		9
2.2. SDGs dari <i>Open Working Group</i> (OWG)		12
2.3. SDGs dari <i>Sustainable Development Solution Network</i> (SDSN).....		13
Bab 3. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator SDGs		17
3.1. <i>Matching</i> dan Pemetaan Indikator dan Target SDGs		17
3.2. Identifikasi Indikator SDGs di Indonesia.....		17
3.3. Identifikasi Sumber Data Indikator SDGs di Indonesia.....		19
Bab 4. Hasil Matching Indikator, Target dan Tujuan, serta Ketersediaannya di Indonesia		23
Tujuan 1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan		23
Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan.....		30
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia.....		39
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua		58
Tujuan 5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan.....		65
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan		71
Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern.....		76
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.....		80
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi		84
Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara		89

Tujuan 11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.....	92
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	97
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya	101
Tujuan 14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	105
Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati	107
Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	111
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	118
Bab 5. Penutup	127
5.1. Kesimpulan.....	127
5.2. Saran	127
Lampiran	
Istilah Teknis.....	131
Matriks Indikator SDGs Usulan SDSN dan Ketersediaan di Indonesia.....	135
Sumber Data, Periodisasi, Level Penyajian, dan Disagregasi Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Mekanisme matching dan pemetaan indikator dan target SDGs	17
Gambar 3.2. Mekanisme identifikasi indikator SDGs di Indonesia	18

PENDAHULUAN



Di Indonesia, pelaksanaan MDGs telah memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih ada beberapa target MDGs yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, tetapi sudah banyak target yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan bahkan telah tercapai. Indonesia berhasil menurunkan proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pemerintah juga telah berhasil menurunkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan lanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang signifikan pada indikator rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dari 93,67 persen pada tahun 1993 menjadi 101,40 persen pada tahun 2011. Selain itu, angka kejadian tuberkulosis di Indonesia sudah berhasil mencapai target MDGs yaitu dari 343 pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011 (Bappenas, 2012).

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang berupa delapan tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. Walaupun tujuan dan target MDGs tidak mengikat secara hukum, namun banyak negara-negara tetap memantau pencapaiannya melalui beberapa indikator pencapaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan MDGs.

Banyak pihak yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MDGs yang telah diimplementasikan selama empat belas tahun di seluruh dunia. Walaupun masih banyak hal yang belum dicapai, namun perlu diakui bahwa selama ini MDGs sudah membawa perubahan besar di dunia. MDGs telah menjadi saksi sejarah proses pengurangan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu \$1,25 per hari, sudah berkurang setengah miliar. Laju kematian anak turun lebih dari 30 persen, dengan sekitar tiga juta jiwa anak terselamatkan setiap tahunnya dibandingkan tahun 2000. Kematian akibat malaria juga turun hingga seperempatnya (PBB, 2013).

Di Indonesia, pelaksanaan MDGs telah memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih ada beberapa target MDGs yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, tetapi sudah banyak target yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan bahkan telah tercapai. Indonesia berhasil menurunkan proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pemerintah juga telah berhasil menurunkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan lanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang signifikan pada indikator rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dari 93,67 persen pada tahun 1993 menjadi 101,40 persen pada tahun 2011. Selain itu, angka kejadian tuberkulosis di Indonesia sudah berhasil mencapai target MDGs yaitu dari 343 pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011 (Bappenas, 2012).

Sebuah laporan satuan tugas PBB, yang mempersiapkan konferensi PBB mengenai pembangunan berkelanjutan 2012 (yang juga dikenal dengan Rio+20), memuji kemajuan pesat dalam pencapaian MDGs. Namun demikian laporan tersebut masih tetap menyoroti kendala dan tantangan yang belum terselesaikan. Dalam kerangka MDGs, lingkungan hanya disebutkan di bawah satu tujuan saja yakni tujuan ke-7, Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Sebaiknya agenda pembangunan selanjutnya dapat memperkuat peran sentral faktor lingkungan dan memperlakukan faktor lingkungan sebagai dasar bagi semua hasil pembangunan. MDGs hanya fokus pada hasil yang seharusnya dicapai oleh negara berkembang, seperti memerangi kemiskinan dan kelaparan

serta membatasi peran negara maju untuk memberikan bantuan pembangunan dan pendampingan teknis.

Untuk agenda selanjutnya, banyak pihak yang menyuarakan tanggungjawab yang bisa diterapkan di negara maju. MDGs juga hanya menekankan pada aksi di negara berkembang dan kerangka bantuan tradisional. Kerjasama diantara sektor-sektor penting seperti sektor swasta dan LSM transnasional justru jarang diwujudkan. Selain itu, banyak tujuan yang semata-mata fokus pada kuantitas daripada kualitas hasil. Misal keamanan pangan diukur dari akses terhadap makanan, bukan nutrisi. Pendidikan diukur melalui jumlah siswa masuk bukan angka kelulusan.

Setelah melihat perubahan besar karena penerapan MDGs, negara-negara telah memikirkan dan merancang suatu agenda pembangunan baru yang harus disiapkan untuk menggantikan dan meneruskan MDGs. Banyak pihak yang berpendapat bahwa agenda pembangunan yang menetapkan keberlanjutan dan kesetaraan harus lebih diutamakan untuk menjadi agenda pembangunan selanjutnya. Suatu agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. SDGs menjadi suatu hal yang paling sering dibicarakan untuk dijadikan agenda pembangunan selanjutnya.

Istilah SDGs diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDGs diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDGs dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDGs juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Sebagaimana hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio20+) yang telah menegaskan bahwa semua komunitas internasional harus melakukan pembangunan global dengan cara dimana semua bangsa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia dan planet.

Agar SDGs menjadi suatu agenda mampu mencakup semua kalangan, banyak pertemuan yang telah dilakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi dari semua kalangan dalam menyusunnya. Pada tanggal 31 Juli 2012, Sekretaris Jendral PBB memilih Presiden Bambang Yudhoyono sebagai **co-chair High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP)** bersama David Cameron (PM Inggris) dan Ellen Johnson Sirleaf (Presiden Liberia). HLPEP ini merupakan suatu forum yang diharapkan dapat menjadi suatu kanal konsultatif yang diusahakan untuk menjadi kanal yang lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan masukan terkait agenda pembangunan pasca-2015. Inti dari agenda pembangunan yang disusun oleh forum ini adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim melalui pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Dari laporan HLPEP diusulkan 12 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Open Working Group (OWG) untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang beranggotakan 30 anggota dan telah melakukan 13 kali pertemuan juga mengusulkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, **Sustainable Development Solutions Network (SDSN)** di bawah pimpinan Jeffrey Sachs mengusulkan 10 tujuan, 30 target dan 100 indikator untuk menjadi agenda pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk menjembatani usulan dari OWG dan SDSN, maka SDSN menyusun *draft* laporan yang berjudul *Mapping The SDSN Illustrative Indicators Against Zero*

Goals Identified By The Open Working Group. Setelah itu, sampai saat ini, SDSN juga melakukan kajian lebih lanjut agar bisa mengakomodasi usulan-usulan tersebut.

Saat ini dunia masih berupaya untuk menampung masukan dan menyusun suatu agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, ada hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Pada pelaksanaan MDGs, ketersediaan data telah ditingkatkan, namun masih tetap dibutuhkan data yang lebih baik. Untuk mengatasi hal ini, HLPEP menyarankan untuk melakukan revolusi data. Inti dari revolusi data meliputi dua hal yakni intergrasi statistik baik di sektor publik maupun swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menindaklanjuti usulan-usulan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai macam indikator pemantaunya, maka publikasi ini diharapkan mampu menjadi kajian awal untuk memetakan indikator, target dan tujuan SDGs yang telah diusulkan dan mengetahui ketersediaan indikator-indikator tersebut di Indonesia. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait indikator-indikator pendekatan yang digunakan untuk memantau tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kajian ini diantaranya adalah:

1. Mengkaji beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh HLPEP, OWG, SDSN dan lembaga lain terkait dengan pembentukan tujuan, target dan indikator SDGs ,
2. Memetakan indikator, target dan tujuan SDGs yang telah diusulkan,
3. Mengidentifikasi indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia.

Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem statistik di Indonesia, mewujudkan revolusi data dan membantu dalam menyiapkan sistem statistik yang mampu memantau perkembangan SDGs tahun 2015 mendatang.

1.3. Cakupan

Hal-hal yang disajikan dalam kajian ini hanya sebatas penjelasan indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang meliputi konsep dan definisi, sumber data, level penyajian, periode data dan disagregasi dari indikator-indikator tersebut serta mencakup semua indikator yang diusulkan baik yang berupa indikator utama maupun indikator tambahan. Selain itu, kajian juga mencakup identifikasi indikator-indikator yang tersedia di Indonesia beserta sumber datanya. Kajian ini hanya menyajikan jenis indikator SDGs dan belum sampai pada penyajian nilai dari setiap indikator.

KAJIAN TEORI



<http://www.bps.go.id>

Saat ini dunia masih berupaya untuk menampung masukan dan menyusun suatu agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, ada hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Pada pelaksanaan MDGs, ketersediaan data telah ditingkatkan, namun masih tetap dibutuhkan data yang lebih baik. Untuk mengatasi hal ini, HLPEP menyarankan untuk melakukan revolusi data. Inti dari revolusi data meliputi dua hal yakni integrasi statistik baik di sektor publik maupun swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Bab 2. Kajian Teori

Bab ini membahas kajian literatur terkait perumusan target, tujuan dan indikator SDGs berdasarkan hasil perumusan baik dari agenda pertemuan internasional maupun lembaga-lembaga internasional. Kajian literatur ini hanya memfokuskan pada perumusan SDGs dari tiga sumber yaitu High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Open Working Group (OWG) dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

2.1. SDGs dari High Level Panel For Eminent Person (HLPEP)

Untuk melakukan pembahasan khusus tentang agenda pembangunan berkelanjutan, Sekjen PBB membentuk High-Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 Development Agenda (HLPEP). HLPEP dibentuk sebagai wujud inisiasi upaya persiapan agenda pembangunan pasca-2015 dan pada tanggal 24-27 Maret 2013 telah melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi di Bali untuk mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Panel ini diketuai bersama (*co-chair*) oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf. Panel ini mencakup 26 tokoh terkemuka dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil dan pemuda, serta berdasarkan keseimbangan geografis dan gender. Tujuan HLPEP ini adalah memberikan saran serta rekomendasi kepada Sekjen PBB mengenai visi dalam mengatasi tantangan pembangunan global. Selain itu, HLPEP juga ditugaskan untuk menyusun laporan kepada Sekjen PBB yang memuat rekomendasi terkait visi dan bentuk agenda pembangunan pasca-2015 yang tegas dan lantang namun mudah dicapai.

Dalam laporannya yang berjudul *A New Global Partnership: Eradicate Poverty And Transform Economies Through Sustainable Development*, HLPEP mengusulkan 12 tujuan dengan 54 target pembangunan pasca-2015. Namun, HLPEP belum menentukan indikator-indikator dari tujuan dan target tersebut. Adapun tujuan dan target yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan
 - Menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari ke angka nol dan mengurangi sebanyak x% orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional negara mereka di tahun 2015
 - Meningkatkan sebanyak x% perempuan dan laki-laki, masyarakat, dan dunia usaha dengan menjamin hak atas lahan, properti, dan aset lainnya
 - Melindungi sebanyak x% orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan
 - Membangun daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam sebanyak x%

2. Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender
 - Mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
 - Mengakhiri pernikahan anak-anak
 - Menjamin hak setara perempuan untuk memiliki dan mewarisi properti, menandatangani kontrak, mendaftarkan usaha dan membuka rekening bank
 - Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik
3. Menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup
 - Menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan pra dasar
 - Memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar mampu baca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum
 - Memastikan setiap anak, apapun situasinya, memiliki akses terhadap pendidikan menengah dan menaikkan proporsi remaja yang mencapai hasil pembelajaran yang diakui dan terukur hingga x%
 - Menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan, yang dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x%
4. Menjamin kehidupan yang sehat.
 - Mengakhiri kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah
 - Menaikkan sebanyak x% anak, remaja, usia dewasa yang beresiko dan orang-orang yang berusia lanjut, untuk sepenuhnya divaksinasi
 - Menurunkan rasio angka kematian ibu menjadi tidak lebih dari x per 100.000 kelahiran hidup
 - Menjamin secara universal, hak kesehatan seksual dan reproduksi
 - Mengurangi beban penyakit dari HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit tropis terabaikan dan penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi prioritas
5. Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik
 - Mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki akses terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau harganya, dan bergizi
 - Mengurangi stunting (tumbuh pendek karena kurang gizi) sebanyak x%, wasting (tubuh kurus karena kurang gizi) sebanyak y%, dan anemia sebanyak z% bagi semua balita
 - Meningkatkan produktivitas pertanian sebanyak x%, yang berfokus pada meningkatkan secara berkelanjutan hasil pertanian kecil dan akses terhadap irigasi
 - Mengadopsi praktik-praktik pertanian, perikanan laut dan perikanan air tawar yang berkelanjutan dan membangun kembali ketersediaan ikan-ikan tertentu hingga ke tingkat yang berkelanjutan
 - Mengurangi kerugian pasca panen dan makanan yang terbuang sebanyak x%
6. Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi
 - Menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah, dan di sekolah, puskesmas, dan kamp pengungsi

- Mengakhiri buang air besar di tempat terbuka dan memastikan akses universal ke sanitasi di sekolah dan di tempat kerja, dan meningkatkan akses terhadap sanitasi di rumah sebanyak x%
 - Menyesuaikan kuantitas air bersih yang diambil (*freshwater withdrawals*) dengan pasokan air, serta meningkatkan efisiensi air dalam pertanian sebanyak x%, industri sebanyak y% dan daerah-daerah perkotaan sebanyak z%
 - Mendaur ulang atau mengolah semua limbah cair dari daerah perkotaan dan dari industri sebelum dilepaskan
7. Menjamin energi yang berkelanjutan.
- Melipatgandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia
 - Memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern
 - Melipatgandakan laju peningkatan efisiensi energi di bangunan, dalam industri, pertanian dan transportasi di tingkat global
 - Menghentikan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi berlebihan
8. Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, dan pertumbuhan berkeadilan
- Menaikkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan layak sebanyak x
 - Mengurangi jumlah kaum muda yang tidak bersekolah, menganggur atau tidak mengikuti pelatihan sebanyak x%
 - Memperkuat kapasitas produksi dengan memberikan akses universal terhadap pelayanan keuangan dan infrastruktur seperti transportasi dan ICT
 - Menaikkan jumlah usaha baru yang dibuka sebanyak x dan nilai tambah dari produk-produk baru sebanyak y dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan mendorong kewirausahaan
9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan
- Mempublikasikan dan menggunakan neraca ekonomi, sosial dan lingkungan milik pemerintah dan perusahaan besar
 - Meningkatkan pertimbangan keberlanjutan di x% pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah
 - Menjaga ekosistem, keragaman spesies dan genetik
 - Mengurangi deforestasi sebanyak x% dan meningkatkan reforestasi sebanyak y%
 - Meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah sebanyak x ton dan memerangi penggurunan
10. Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif
- Memberikan identitas hukum bebas biaya dan universal, seperti akta kelahiran
 - Memastikan masyarakat menikmati kebebasan berbicara, berasosiasi, melakukan protes damai dan akses terhadap media dan informasi independen
 - Meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan keterlibatan warga di semua tingkat
 - Menjamin hak masyarakat atas informasi dan akses terhadap data pemerintah
 - Mengurangi suap dan korupsi dan memastikan pejabat dapat diminta

pertanggungjawabannya

11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai
 - Menurunkan angka kematian akibat kekerasan per 100.000 sebanyak x dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak
 - Memastikan lembaga peradilan dapat diakses, independen, memiliki sumber daya yang baik dan menghormati hak atas proses hukum
 - Membendung faktor eksternal yang mengakibatkan konflik, termasuk faktor-faktor yang terkait dengan kejahatan terorganisir
 - Meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan akuntabilitas angkatan-angkatan keamanan, kepolisian dan badan peradilan
12. Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global.
 - Mendukung sistem perdagangan yang terbuka, adil dan ramah pembangunan, secara substansial mengurangi aturan-aturan perdagangan yang merusak, termasuk subsidi pertanian, sembari meningkatkan akses pasar produk-produk negara berkembang
 - Melaksanakan reformasi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dunia dan mendorong investasi swasta asing jangka panjang
 - Menahan kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2^o C di atas tingkat pra industri, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional
 - Negara-negara maju yang belum membuat upaya konkret menuju target 0,7% produk nasional bruto (PNB) sebagai bantuan pembangunan resmi bagi negara-negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20% PDB negara maju sampai negara-negara yang paling terbelakang; negara-negara lainnya harus bergerak menuju target sukarela untuk bantuan keuangan pelengkap
 - Mengurangi aliran ilegal dan penghindaran pajak serta meningkatkan pengembalian aset curian sebesar \$x
 - Mempromosikan kolaborasi dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan data pembangunan

2.2. SDGs dari *Open Working Group (OWG)*

Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk memulai proses untuk mengembangkan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil dari konferensi Rio+20 mengamanatkan 30 anggota Open Working Group (OWG) dari Majelis Umum PBB bertugas untuk mempersiapkan proposal SDGs. OWG sendiri didirikan pada tanggal 22 Januari 2013. Dalam perjalanannya negara-negara anggota OWG menyampaikan serangkaian usulan terkait SDGs. Pada pertemuan ketiga belas dan terakhir di New York pada tanggal 19 Juli 2014, OWG mengusulkan 17 tujuan yang mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi hutan.

Adapun 17 tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan

pertanian berkelanjutan

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2.3. SDGs dari *Sustainable Development Solution Network (SDSN)*

Dalam rangka perumusan SDGs, Sekretaris Jendral PBB juga membentuk **Sustainable Development Solutions Network (SDSN)**. SDSN ini merupakan jaringan independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ditugaskan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan pembangunan dibawah pimpinan Jeffrey Sachs. Dalam perkembangannya, SDSN mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator. Adapun tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
3. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja bagi kehidupan dan lingkungannya
4. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua
5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia
6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan
7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh
8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan

9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan, hutan dan sumber daya alam dengan baik
10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan

Setelah mengusulkan 10 tujuan ini, SDSN pada tanggal 25 Juli 2014 mengeluarkan publikasi yang berjudul *Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDGs*. Dalam publikasi ini SDSN memadukan SDGs usulan OWG dan SDSN. Oleh karena itu, dari publikasi ini diusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. Dalam kajian ini, indikator-indikator yang diusulkan dalam publikasi ini yang dijadikan dasar rujukan.

<http://www.bps.go.id>

KERANGKA KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR SDGs



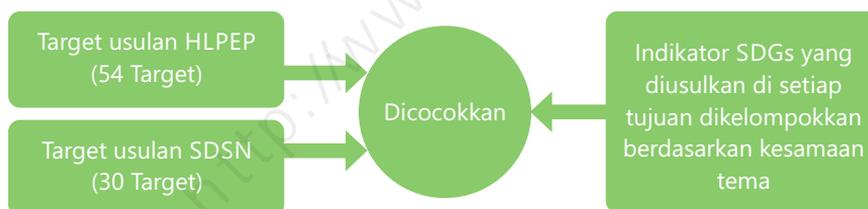
Mekanisme matching dilakukan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator yang diusulkan dalam setiap tujuan kedalam tema yang sama, kemudian indikator-indikator tersebut dicocokkan dengan target-target yang telah diusulkan oleh OWG dan SDSN.

Bab 3. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator SDGs

3.1. *Matching* dan Pemetaan Indikator dan Target SDGs

Dalam laporan terakhir tanggal 25 Juli 2014, SDSN mengusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. 17 tujuan SDGs tersebut belum diturunkan kedalam target-target SDGs, melainkan langsung diturunkan dalam indikator-indikator. Dalam kajian ini dilakukan *matching* dan pemetaan tujuan-tujuan SDGs ke dalam target, kemudian target ke dalam indikator-indikator yang telah diusulkan. Sebagaimana diketahui dalam laporan HLPEP dan SDSN sebelumnya menyebutkan target-target yang ingin dicapai dalam SDGs. HLPEP mengusulkan 54 target dan SDSN mengusulkan 30 target.

Mekanisme *matching* tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator yang diusulkan dalam setiap tujuan kedalam tema yang sama, kemudian indikator-indikator tersebut dicocokkan dengan target-target yang telah diusulkan oleh OWG dan SDSN. Sehingga mekanisme *matching* dan pemetaan indikator dan target SDGs tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 3.1. Mekanisme *matching* dan pemetaan indikator dan target SDGs

Dalam melakukan *matching*, sangat diperhatikan kondisi indikator dan target dari usulan SDSN. Sebelumnya SDSN telah mengusulkan 10 tujuan, 30 target dan 100 indikator, selanjutnya dalam laporan SDSN digabung dengan usulan OWG yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Setelah dilakukan *matching* dan pemetaan ke-17 tujuan tersebut kedalam target-target, maka terbentuklah 40 target SDGs.

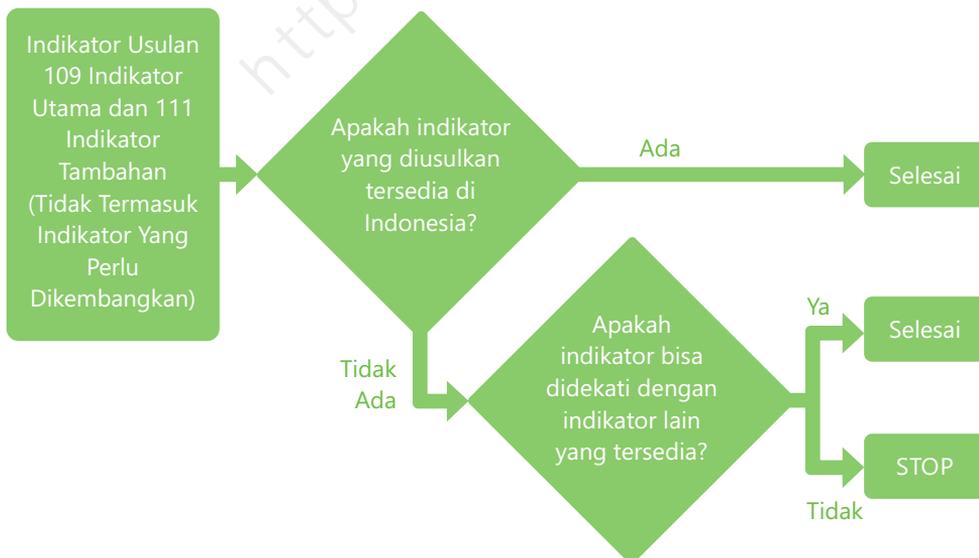
3.2. Identifikasi Indikator SDGs di Indonesia

Setelah dilakukan proses *matching* dan pemetaan indikator serta target dari setiap tujuan, tahap selanjutnya adalah mencari apakah indikator-indikator yang diusulkan tersebut tersedia di Indonesia. Proses pencarian dan penentuan indikator-indikator tersebut, disesuaikan dan dipertimbangkan dengan kriteria indikator SDGs yang diusulkan oleh **United Nation Development**

Group (UNDG). Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan mudah: Indikator harus mudah dikompilasi dan ditafsirkan.
2. Berdasarkan konsensus, sesuai dengan standar internasional: Khususnya indikator utama, harus didukung oleh konsensus internasional yang luas dalam pengukurannya dan didasarkan pada standar, rekomendasi, dan praktik terbaik internasional untuk memfasilitasi perbandingan internasional.
3. Terhubung secara konsisten dengan sistem berbasis informasi: Harus dipastikan bahwa indikator-indikator tersebut harus konsisten secara luas dengan sistem statistik nasional, sistem akuntansi lingkungan dan ekonomi, serta sistem informasi lainnya.
4. Dibangun dari sumber data yang akurat: Indikator harus bersumber pada data publik dan swasta yang akurat dan konsisten untuk dilakukan pengukuran dari waktu ke waktu.
5. Terpilah: Preferensi harus diberikan kepada indikator yang dapat disagregasi berdasarkan (i) karakteristik individu atau rumah tangga (misalnya jenis kelamin, usia, pendapatan, cacat, agama, ras, atau etnis); (ii) aktivitas ekonomi; dan (iii) pemilahan spasial (misalnya wilayah metropolitan, perkotaan dan pedesaan, atau kabupaten).
6. Universal: Kumpulan indikator SDGs secara keseluruhan diperlukan untuk melacak agenda universal. Oleh karena itu, banyak (meskipun tidak semua) indikator inti harus berlaku di negara maju dan berkembang.
7. Dikelola oleh sebuah organisasi yang ditunjuk: Setiap Indikator Inti harus dikelola oleh suatu organisasi yang ditunjuk yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan tahunan, laporan nasional yang berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan efektivitas biaya, proses pelaporan yang ramping, dan metode pemantauan nasional.

Dalam melakukan pencarian indikator-indikator yang tersedia di Indonesia tersebut, mekanismenya dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 3.2. Mekanisme identifikasi indikator SDGs di Indonesia

Dari alur di atas dapat dilihat bahwa usulan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan yang telah disusun menurut target dan tujuan dicari apakah indikator tersebut tersedia di Indonesia. Jika tersedia maka indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator SDGs, sebaiknya jika tidak tersedia maka dicari apakah ada indikator lain yang bisa digunakan sebagai pengganti indikator tersebut sebagai proksi. Jika tersedia maka proksi tersebut bisa digunakan, namun sebaiknya jika tidak tersedia diputuskan bahwa indikator tersebut belum tersedia.

3.3. Identifikasi Sumber Data Indikator SDGs di Indonesia

Untuk menentukan sumber data indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia dalam kajian ini, berbagai survei yang dilakukan BPS diidentifikasi apakah indikator SDGs dapat diturunkan dari survei-survei tersebut. Selain itu, sumber data dari instansi lain (kementerian atau lembaga nasional) dan lembaga dunia yang relevan juga dapat dijadikan untuk penyusunan indikator SDGs.

<http://www.bps.go.id>

HASIL *MATCHING* INDIKATOR, TARGET DAN TUJUAN, SERTA KETERSEDIAANNYA DI INDONESIA



Tujuan SDGs

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Bab 4. Hasil *Matching* Indikator, Target dan Tujuan, serta Ketersediaannya di Indonesia

Berdasarkan laporan HLPEP, OWG dan SDSN, proses *matching* dilakukan untuk menghasilkan tujuan, target dan indikator SDGs. Dalam kajian ini disajikan 17 tujuan, 40 target yang tiap-tiap target mencakup beberapa indikator-indikator SDGs. Indikator SDGs tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu indikator utama dan indikator tambahan dimana diantara indikator-indikator tersebut terdapat indikator yang masih perlu dikembangkan untuk dijadikan sebagai indikator SDGs. Indikator yang masih perlu dikembangkan dalam bab ini ditandai dengan kurung siku ([]).

Tujuan 1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan

Target 1A. Mengakhiri kemiskinan ekstrim, termasuk kemiskinan absolut (kurang dari \$1,25 per hari)

1. Persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari (PPP)

Konsep dan definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari \$1,25 per orang per hari. Ambang batas \$1,25 merupakan ukuran kemiskinan pendapatan ekstrim yang dapat dijadikan standar perbandingan antar negara ketika dikonversi dengan paritas daya beli (PPP) nilai tukar untuk konsumsi. Selain itu, kemiskinan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan internasional memiliki nilai riil konstan garis kemiskinan dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penilaian kemajuan dalam mencapai tujuan pemberantasan kemiskinan ekstrim.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin, umur, perkotaan/pedesaan, dan kualifikasi lainnya. Yang paling penting adalah mengidentifikasi jenis kelamin kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih cenderung mengalami kemiskinan ekstrim.

Komentar dan keterbatasan

Tingkat kemiskinan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menangkap kedalaman kemiskinan, karena ada yang hidup tepat di bawah garis kemiskinan dan ada pula yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Untuk menangkap perbedaan ini, data yang dimiliki sebisa mungkin dipilah berdasarkan jenis kelamin, umur, etnis, geografi, dan atribut lain dalam suatu populasi. SDSN juga mengusulkan untuk menyertakan indikator terpisah untuk kemiskinan pendapatan perkotaan, sebab garis kemiskinan \$1,25 kurang tepat diterapkan pada daerah perkotaan dikarenakan berbagai kebutuhan pokok seperti perumahan, air, energi, dan lain-lain harus dibeli.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini menggunakan sumber data dasar yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) berupa pengeluaran per kapita penduduk. Sejak tahun 1993, informasi mengenai pengeluaran per kapita penduduk sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, BPS dapat menyajikannya untuk tingkat kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan data Susenas Kor (tahun 2008 menggunakan Susenas modul konsumsi). Kemudian mulai tahun 2011, Susenas Konsumsi lengkap dilakukan setiap triwulan. Garis kemiskinan dihitung oleh Bank Dunia setiap setahun sekali sehingga indikator dapat disajikan secara tahunan.

Data Susenas dapat menyajikan karakteristik kepala rumah tangga miskin seperti karakteristik demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Beberapa karakteristik demografi tentang kepala rumah tangga miskin yang dapat dianalisis sesuai dengan ketersediaan data mencakup rata-rata jumlah anggota rumahtangga, wanita sebagai kepala rumahtangga, dan rata-rata usia kepala rumahtangga. Karakteristik pendidikan mencakup rata-rata lama sekolah, kemampuan baca tulis, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga, sedangkan karakteristik ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha atau sektor dan jumlah jam kerja seminggu.

2. **Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan**

Konsep dan Definisi

Indikator MDGs yang dimodifikasi ini didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari jumlah tertentu per orang per bulan. Ambang kemiskinan ini ditentukan pada level nasional dimana seseorang dianggap miskin. Garis kemiskinan nasional harus dibedakan untuk daerah perkotaan dan pedesaan untuk memperhitungkan perbedaan biaya hidup.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kualifikasi lainnya. Yang paling penting adalah mengidentifikasi jenis kelamin kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih cenderung mengalami kemiskinan ekstrim.

Komentar dan keterbatasan

Garis kemiskinan nasional tidak tersedia dalam ukuran yang seragam, sehingga indikator ini tidak dapat secara langsung digunakan untuk perbandingan antar negara.

Ketersediaan di Indonesia

Sumber data dasar yang digunakan dan disagregasi data sama dengan indikator sebelumnya. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan nasional BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS melakukan penghitungan kemiskinan setiap bulan Maret dan September dengan level penyajian sampai dengan provinsi. Penghitungan angka kemiskinan kabupaten/kota dilakukan setahun sekali tanpa membedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial

Konsep dan Definisi

Akses terhadap perlindungan sosial yang memadai merupakan hak dasar sebagaimana telah diabadikan dalam Deklarasi Universal HAM, akan tetapi lebih dari setengah penduduk dunia belum tercakup dalam perlindungan sosial. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang tercakup oleh jaringan perlindungan sosial. ILO menetapkan 10 elemen berikut dalam cakupan perlindungan sosial yang komprehensif yaitu pelayanan kesehatan, tunjangan sakit, perlindungan untuk penyandang cacat, lanjut usia, korban, ibu, anak-anak, pengangguran, kecelakaan kerja, dan perlindungan umum terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial. Jenis perlindungan sosial yang paling umum adalah intervensi pasar tenaga kerja untuk mempromosikan pekerjaan dan perlindungan pekerja, asuransi sosial seperti asuransi kesehatan atau pengangguran, dan bantuan sosial untuk mendukung individu atau rumah tangga yang rentan. Instrumen-instrumen perlindungan sosial juga mulai banyak dikenal oleh masyarakat, termasuk bantuan tunai bersyarat.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin, umur, perkotaan/pedesaan dan menurut jenis perlindungan (kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain).

Komentar dan keterbatasan

Akses terhadap jaminan sosial dapat dibatasi pada diskriminasi, namun belum dapat tercakup melalui indikator ini.

Ketersediaan di Indonesia

Bantuan dan perlindungan sosial di Indonesia merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin. Hak dasar tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (TNP2K). Beberapa program perlindungan sosial tersebut adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sumber yang menyediakan data untuk indikator ini adalah Susenas berupa proporsi rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial. Data dikumpulkan rutin setiap tahun sampai level kabupaten/kota. Unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga sehingga data tidak bisa didisagregasi berdasarkan gender dan umur penerima bantuan. Namun, pada triwulan I tahun 2013, dilakukan Survei Perlindungan Sosial. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengumpulan data perlindungan sosial yang diintegrasikan dengan Susenas. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas program perlindungan sosial yang saat ini sedang berjalan. Data yang dikumpulkan dari survei ini akan dianalisis oleh TNP2K untuk mengukur dampak dari program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan individu, rumah tangga, dan nasional. Oleh karena survei tersebut bisa mengukur cakupan perlindungan sosial individu, maka indikator bisa disagregasi berdasarkan jenis kelamin, umur, dan wilayah kota-desa. Level terendah penyajian data adalah provinsi.

4. [Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan multidimensi ekstrim]

Konsep dan Definisi

Analisis kemiskinan multidimensi bertujuan untuk mengukur dimensi kemiskinan berbasis non-pendapatan, untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari tingkat kemiskinan dan kekurangan.

Beberapa indeks kemiskinan multidimensi yang ada, termasuk alat penilaian kemiskinan multidimensional (*multidimensional poverty assessment tool*) oleh IFAD dan indeks lain yang lebih dikenal luas Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) oleh **Human Development Report Office** UNDP. MPI mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi yaitu kesehatan (angka kematian anak, gizi), pendidikan (lama sekolah, partisipasi), dan standar hidup (bahan bakar untuk memasak, toilet, air, listrik, lantai, aset). Indeks ini mengukur rumah tangga yang mengalami kekurangan di salah satu dimensi dengan menggabungkan pengukuran dimensi tersebut.

Pengukuran ini dikritik karena masalah pengelompokan (klaster) dan pembobotan sub-indikator pada tiga dimensi yang sangat luas. Hasilnya, meskipun seorang individu tidak memiliki akses terhadap air, tidak dapat dianggap miskin jika mereka memiliki tingkat pendidikan dan nutrisi yang cukup. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memastikan konsep SDSN terhadap kemiskinan multidimensi yang secara tegas termaktub dalam Deklarasi Milenium dan MDGs, SDSN mendukung terciptanya indikator baru dengan sedikit revisi. Setidaknya, MPI 2015 ini akan melacak kekurangan ekstrim pada gizi, pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, akses memasak modern dan listrik yang dapat diandalkan, untuk menunjukkan kesinambungan dengan prioritas MDG. Secara khusus, indikator tersebut akan memperkirakan persentase rumah tangga yang mengalami hal berikut ini:

1. Kekurangan gizi anak dan dewasa
2. Terganggu atau dibatasinya sekolah (minimal 1-8 tahun)
3. Kematian anak dalam keluarga
4. Kurangnya akses terhadap air minum bersih
5. Kurangnya akses ke layanan sanitasi dasar
6. Kurangnya akses ke solusi memasak modern
7. Kehilangan aset dasar yang modern (radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor, mobil)
8. Kurangnya akses ke listrik yang dapat diandalkan

Indikator tambahan mungkin bisa mencakup aset pertanian dan kerentanan rumah tangga, termasuk guncangan ekonomi dan korban bencana alam dan/atau kualitas kerja, pemberdayaan, keamanan fisik dan paparan kekerasan, keterhubungan sosial, isolasi sosial, rasa malu dan kesejahteraan psikologis.

Meskipun akan lebih baik jika kemiskinan multidimensi ditentukan berdasarkan deprivasi pada salah satu bidang tersebut, MPI sebelumnya telah menemukan abnormalitas jika hanya menggunakan satu deprivasi, sebagian karena penyimpangan yang ditimbulkan oleh norma-norma budaya dan sebagian karena skala deprivasi yang begitu luas. Penentuan tingkat kemiskinan di negara seperti India atas dasar salah satu dari deprivasi ini, akan menghasilkan tingkat kemiskinan di atas 90 persen, berpotensi membayangi kemajuan-kemajuan yang telah dibuat dalam satu atau lebih bidang. Oleh karena itu, SDSN mengusulkan penggunaan metode penghitungan *Alkire* dan *Foster*, serta menetapkan ambang batas dari dua atau lebih deprivasi, untuk menentukan siapa yang dianggap miskin atau tidak miskin. Penetapan

ambang ini akan memerlukan diskusi partisipatif serta konsultasi ahli. Ambang batas alternatif juga bisa disesuaikan dengan konteks nasional, seperti yang telah dimiliki Meksiko, Columbia dan Bhutan.

Disagregasi

MPI berdasarkan metode *Alkire* dan *Foster* memiliki potensi untuk dipisahkan menurut wilayah dan kelompok. Identifikasi jenis kelamin kepala rumah tangga dianggap penting untuk dilakukan karena rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih mungkin untuk mengalami kemiskinan multidimensi. Hal ini juga dapat digunakan untuk menilai ketimpangan, antara tiga kelompok yakni mereka yang rentan terhadap kemiskinan, mereka yang miskin akut dan mereka yang miskin parah. Namun, dengan menggunakan data survei tingkat rumah tangga terdapat masalah untuk menilai kemiskinan menurut gender dan anak-anak, karena tidak mungkin untuk secara akurat memisahkannya dalam rumah tangga. Modul tambahan pada keadaan kemiskinan gender dan anak-anak mungkin akan diperlukan.

Komentar dan keterbatasan

Ukuran kemiskinan multidimensi tergantung pada kualitas data survei rumah tangga. Jumlah negara yang telah melakukan survei meningkat secara dramatis sejak pertengahan 1980-an, menjadi sekitar 130 negara saat ini, namun survei yang dilakukan belum rutin. Selain itu, data survei rumah tangga standar internasional untuk negara-negara berkembang berasal dari tiga sumber utama yaitu *Demographic Health Survey* (DHS), *Living Standards Measurement Survey* (LSMS) dan *Multi-Indicator Cluster Survey* (MICS) dimana masing-masing memiliki metodologi yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, DHS diperbarui setiap 6 tahun sekali di semua negara yang pernah melakukannya. Data negara maju berasal dari survei seperti Statistik Uni Eropa menurut penghasilan dan kondisi hidup (tersedia untuk 29 negara) tetapi metodologi survei yang digunakan tidak memungkinkan untuk perbandingan internasional, terutama untuk dibandingkan dengan data dari negara-negara berkembang.

Untuk meningkatkan frekuensi survei rumah tangga dan untuk mempromosikan konsistensi antara badan-badan internasional, SDSN mendukung usulan OPHI **Multi-dimensional Poverty Peer Network**, agar PBB mengadopsi metodologi survei rumah tangga multi-topik yang cepat dan dikumpulkan setahun dua kali. Hal ini akan menghasilkan hasil survei yang lebih rinci dan teliti seperti DHS dan memberikan data rumah tangga yang lebih tepat waktu dan universal.

Ketersediaan di Indonesia

Pengumpulan data rumah tangga yang dilakukan BPS memungkinkan dapat mengukur kemiskinan multidimensi.

Indikator tambahan:

- **Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)**

Indikator ini merupakan salah satu indikator tambahan yang disarankan SDSN. Indeks ini mengukur kedalaman kemiskinan dengan memperkirakan seberapa jauh rata-rata pendapatan masyarakat miskin dari garis kemiskinan ekstrim yaitu \$ 1,25 PPP per hari atau berdasarkan garis kemiskinan BPS. Indeks P_1 menurut BPS merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang selama ini digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah garis kemiskinan nasional, bukan dengan \$1,25 PPP. Indeks ini disajikan oleh BPS setiap semester sampai dengan level kabupaten/kota.

Target 1B. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah pedesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana

5. Persentase perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki hak atas lahan, yang diukur dengan (i) persentase yang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase yang tidak takut akan penyitaan terhadap lahannya

Konsep dan Definisi

Mampu tidaknya masyarakat miskin di pedesaan dalam mengamankan kepemilikan mereka atas lahan dan sumber daya alam yang mereka bergantung padanya memberi implikasi penting bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih banyak rumah tangga miskin di pedesaan yang akses terhadap lahan dan sumber daya alamnya terus digerogeti. Secara khusus, kontroversi yang melibatkan akuisisi lahan dalam skala besar oleh investor asing dan domestik telah menempatkan hak atas lahan dan masalah investasi pertanian yang bertanggung jawab pada agenda pembangunan global. Indikator baru ini diusulkan dengan dua komponen yaitu (i) persentase penduduk yang memiliki sertifikat tanah (ii) persentase penduduk yang tidak takut akan terjadinya perampasan tanah secara sewenang-wenang. Dokumentasi dan wawasan memberikan informasi penting dan berimbang terhadap jaminan kepemilikan serta menjadi bukti penting dan nyata di lapangan. Fokus yang diusulkan - hak yang didokumentasikan- cukup fleksibel untuk mencakup berbagai hak kepemilikan dalam konteks yang berbeda di setiap negara. Walaupun pendokumentasian merupakan indikator yang penting, hal itu tidak cukup untuk mengukur hak atas jaminan kepemilikan, ukuran persepsi memberikan informasi tambahan yang juga penting. Selain itu, ukuran persepsi lebih berguna untuk memfasilitasi keterbandingan indikator antarnegara.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas legalisasi aset. Legalisasi aset berupa tanah dilakukan dengan memberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang belum bersertifikat milik oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu. Program legalisasi aset tersebut berupa kegiatan sertipikat tanah prona, petani, nelayan, UKM, transmigrasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mengetahui keadaan penduduk miskin di pedesaan atas terjaminnya lahan mereka, indikator proksi yang digunakan berdasarkan ketersediaan data di Indonesia adalah jumlah bidang tanah yang bersertifikat serta perkembangan program legalisasi lahan oleh BPN. Ketersediaan data memungkinkan indikator untuk didisagregasi. Jumlah dan luas tanah bersertifikat dapat didisagregasi berdasarkan jenis hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak wakaf, hak pengelolaan, dan hak pakai. Selain itu, statistik capaian program legalisasi aset dapat dirinci berdasarkan jenis program tersebut seperti sertifikasi PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), tanah UKM, tanah petani, tanah nelayan, tanah transmigrasi, dan tanah masyarakat berpenghasilan rendah.

Belum tersedianya data dan informasi mengenai persepsi masyarakat tentang terjaminnya hak atas tanah menyebabkan ukuran persepsi belum bisa menjadi indikator pada tujuan ini. Oleh karena itu juga, data tidak bisa didisagregasi berdasarkan jenis kelamin pemilik aset.

6. Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut daerah perkotaan-pedesaan (dalam satuan US\$ dan jumlah korban jiwa)

Konsep dan Definisi

Banyak kota di dunia termasuk pedesaan mulai merasakan resiko bahaya bencana alam, seperti berbagai kejadian alam yang berkaitan dengan iklim ekstrim yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi termasuk salah satu pemicu resiko bahaya bencana alam tersebut. Indikator ini mengukur kerugian yang dialami daerah perkotaan maupun pedesaan akibat bencana alam baik jiwa maupun kerugian ekonomi, dibagi atas kejadian terkait iklim dan bukan iklim. Bencana alam yang terjadi akibat iklim ekstrim antara lain, (i) peristiwa hidrometeorologi (badai, banjir, gerakan massa basah) dan (ii) kejadian iklim (suhu ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan). Bencana alam yang tidak terkait iklim terutama berkaitan dengan peristiwa geofisika (gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, gerakan massa kering). Bencana lainnya yang terkait iklim maupun bukan iklim yaitu peristiwa biologis (epidemi, gangguan serangga, *animal stampedes*). Jika ragu maka dapat dikelompokkan sebagai kejadian yang tidak terkait iklim.

Langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko bencana yang efektif diperlukan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari bencana alam, termasuk kejadian iklim ekstrim, pada sektor pertanian dan daerah pedesaan. Dimensi ekonomi dari indikator ini akan mengukur kerugian tanaman dan hewan produksi terkait dengan peristiwa iklim dan non-iklim terkait, terutama dengan memanfaatkan teknologi *real-time* berupa penginderaan jauh sebagai inti dari resolusi sistem pemantauan pertanian. Indikator juga akan melacak keberhasilan langkah-langkah adaptasi dan kesiapan lainnya di daerah yang paling berisiko, termasuk misalnya, adopsi varietas baru yang toleran terhadap tekanan atau teknologi peningkatan ketahanan lainnya yang meminimalkan risiko kerugian panen.

Dimensi kerugian ekonomi lainnya, termasuk nilai kerusakan aset fisik yang hancur secara total atau sebagian, kerugian dalam arus ekonomi yang timbul dari tidak adanya aset yang rusak secara sementara, dampak yang dihasilkan pada kinerja ekonomi makro pasca bencana, dengan referensi khusus untuk pertumbuhan ekonomi/PDB, neraca pembayaran dan situasi fiskal pemerintah, sesuai dengan metodologi penilaian kerusakan dan kerugian yang dikembangkan oleh UN-ECLAC.

Kerugian manusia akan diukur dengan jumlah orang meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari bencana alam, dikonfirmasi dengan menggunakan angka resmi.

Disagregasi

Indikator ini dapat dibedakan secara spasial dan usia serta jenis kelamin korban tewas. Disagregasi lain akan ditinjau lebih lanjut, termasuk keadaan sosial ekonomi orang yang terkena dampak bencana.

Komentar dan keterbatasan

Beberapa bencana biologis (epidemi, infestasi serangga, desak-desakan hewan) dapat berhubungan dengan iklim. Indikator ini akan menentukan dengan jenis mana peristiwa tertentu dianggap terkait dengan iklim.

Ketersediaan di Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki basis data yang dinamakan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Melalui DIBI dapat dilihat historis kejadian bencana di Indonesia mulai tahun 1815. DIBI juga menyajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan ketersediaan data, indikator dapat didisagregasi berdasarkan jenis bencana (terkait iklim dan noniklim), serta wilayah sampai dengan level kabupaten/kota. Selain itu, korban bencana dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Indikator tambahan:

- **[Indeks pengurangan risiko bencana]**

Indikator komposit ini mengukur pengurangan risiko bencana (PRB), termasuk adanya rencana pengelolaan PRB, otoritas PRB, sistem peringatan dini, dan ketersediaan dana PRB. Ketersediaan indikator di Indonesia dapat bersumber dari BNPB karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dari BNPB, selain dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional, juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah, serta berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah di dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

- **Persentase penduduk yang mengakses layanan perbankan**

Akses ke layanan perbankan, seperti rekening giro, penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Disagregasi dapat berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis layanan (*mobile banking*, keuangan mikro, perbankan formal dan lain-lain). Bank Indonesia menyediakan indikator tersebut. Variabel yang dikumpulkan adalah rasio jumlah rekening simpanan masyarakat pada perbankan terhadap jumlah penduduk. Indikator tersebut dihasilkan dari Survei Neraca Rumah Tangga oleh Bank Indonesia yang dilakukan setiap tahun sejak 2007. Disagregasi dapat disajikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan jenis akses. Namun, hasil survei hanya bisa disajikan sampai dengan level nasional atau berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Selain itu survei terkait akses jasa keuangan juga dilakukan oleh Bank Dunia mulai akhir tahun 2009. Akses keuangan mikro juga dapat didekati dengan variabel yang dikumpulkan oleh Susenas yaitu persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha. Variabel dapat disajikan setiap tahun dengan level penyajian terendah kabupaten/kota.

Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Menganangkan Pertanian Berkelanjutan

Target 2A. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang, dan *stunting* pada anak

7. Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum

Konsep dan Definisi

Didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami kelaparan atau kekurangan makanan (kalori). Terdapat tiga parameter yang digunakan untuk menghitung indikator ini yaitu (i) Jumlah makanan dalam tiga tahun rata-rata bergerak (*moving average*) yang tersedia

untuk konsumsi per orang per hari, (ii) Tingkat kesenjangan akses terhadap makanan dan (iii) Konsumsi energi minimum yang diperlukan seseorang - dinyatakan dalam kilo kalori per hari.

Disagregasi

Indikator ini mengukur aspek penting dari kerawanan pangan penduduk. Dalam menilai kerawanan pangan, penting untuk mempertimbangkan wilayah geografis yang mungkin sangat rentan, seperti daerah dengan peluang tinggi dalam produksi atau pasokan makanan yang bervariasi, dan kelompok masyarakat memiliki akses yang sulit terhadap makanan, seperti etnis tertentu atau kelompok sosial. Selain itu, akses intra-rumah tangga untuk makanan mungkin dapat menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, setiap kali data konsumsi rumah tangga dari survei pangan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, harus dilakukan upaya untuk melakukan analisis gizi berdasarkan jenis kelamin.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ketahanan pangan rumah tangga ini dikumpulkan melalui Susenas berupa persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1400 dan 2000 kkal per kapita per hari). Keterbatasan pengumpulan data menyebabkan data yang tersedia belum bisa menjelaskan ketahanan pangan intra-rumah tangga, sehingga disparitas akses pangan penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak bisa diketahui.

8. [Persentase penduduk yang kekurangan salah satu dari mikronutrien (vitamin dan mineral): zat besi, zink, yodium, vitamin A, folat, dan vitamin B12]

Konsep dan Definisi

Mikronutrien itu penting untuk kesehatan, namun kekurangan satu atau lebih mikronutrien sering terjadi di beberapa daerah, dengan pola makan dan kemiskinan menjadi faktor pendorong. Kekurangan mikronutrien dapat menyengsarakan ibu hamil dan anak-anak, karena kekurangan mikronutrien dapat berdampak seumur hidup. Terdapat enam mikronutrien yang paling sering terjadi kekurangan antara lain, mineral besi, seng, dan yodium, dan vitamin A, B12, dan folat. Indikator yang dapat menghitung kekurangan ini pada skala global perlu dikembangkan.

Struktur dan komposisi indikator perlu dikembangkan atas dasar kajian menyeluruh dari data yang tersedia tentang mikronutrien dan peluang untuk skala pengumpulan data berdasarkan MDGs. Tujuannya adalah untuk menangkap setiap orang yang menderita kekurangan mikronutrien, bukan hanya kekurangan zat besi (anemia) seperti pada MDGs.

Disagregasi

Beberapa kemungkinan disagregasi akan ditinjau setelah indikator telah dibentuk.

Komentar dan keterbatasan

Beberapa ahli menyarankan bahwa vitamin D ditambahkan dalam daftar ini. Pertanyaan ini perlu diselesaikan sebelum indikator ini tercakup dalam kerangka monitoring pasca-2015. Indikator komplementer pada defisiensi mikronutrien adalah anemia pada wanita yang tidak hamil.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dibentuk melalui hasil Susenas mengenai konsumsi makanan rumah tangga.

9. Prevalensi balita dengan keadaan *stunting* (tinggi badan kurang)

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase balita usia dua tahun atau lebih yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. *Stunting* pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari malnutrisi kronis. *Stunting* pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari *stunting* pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak.

Disagregasi

Indikator ini dapat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, dan kualifikasi sosial ekonomi, wilayah, dan lainnya.

Komentar dan keterbatasan

Beberapa pihak menganjurkan untuk mengukur *stunting* pada usia 2 tahun. Keputusan akhir tentang usia di mana untuk mengukur *stunting* perlu diambil.

Ketersediaan di Indonesia

Prevalensi balita *stunting*/pendek merupakan salah satu indikator yang diperoleh dari Riskesdas. Data tinggi badan pada Riskesdas menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (**Z-score**) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

- Sangat pendek : Zscore < -3,0
- Pendek : Zscore \geq - 3,0 s/d Zscore < -2,0
- Normal : Zscore \leq -2,0

Data tersedia sampai dengan level provinsi. Disagregasi data dapat berdasarkan wilayah kota-des, jenis kelamin dan pendapatan rumahtangga.

Indikator tambahan:

- **Proporsi kalori dari bahan pangan non-pokok**

Indikator sederhana ini dapat digunakan untuk menelusuri perkembangan pola makan yang lebih beragam dan sehat. Data diperoleh dari Susenas dengan membandingkan rata-rata konsumsi kalori bahan makanan selain padi-padian dan umbi-umbian terhadap seluruh konsumsi kalori.

- **Prevalensi anemia pada perempuan usia produktif yang tidak hamil**

Anemia adalah gangguan multi-faktorial yang disebabkan terutama oleh kekurangan zat besi dan infeksi dan pada tingkat lebih rendah akibat kekurangan vitamin A, vitamin B12, folat, dan riboflavin. Indikator ini berfungsi sebagai pendekatan untuk defisiensi mikronutrien karena ketidaktersediaan indikator yang lebih komprehensif. Data prevalensi anemia dikumpulkan

1993-2005 terhadap 73% dari wanita yang tidak hamil pada usia reproduksi, di 82 negara, (WHO 2012).

Proporsi anemia pada perempuan tidak hamil di Indonesia dihasilkan Riskesdas. Rujukan *cut off point* yang digunakan untuk wanita usia subur 15-49 tahun yang mengalami anemia adalah bila kadar Hb <12,0 g/dL. Data tersedia berdasarkan wilayah perkotaan-perdesaan.

Target 2B. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan hasil panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah

10. Kesenjangan hasil panen pertanian (persentase hasil panen sebenarnya dibanding hasil panen potensial)

Konsep dan Definisi

Indikator ini menelusuri kesenjangan hasil panen untuk komoditas utama, yaitu perbandingan jumlah panen yang dihasilkan terhadap hasil panen yang dapat dicapai pada kondisi manajemen yang baik, dengan mempertimbangkan iklim dan pemanfaatan air berkelanjutan (misalnya potensi hasil panen pada saat keterbatasan air). Negara bisa menetapkan kebijakan terkait, seperti untuk mencapai setidaknya 80 persen dari potensi hasil panen yang dapat dicapai dengan efisiensi air secara berkelanjutan, dan mengharuskan penerapan *roadmap* kebijakan dan teknologi yang tepat.

Disagregasi

Dapat dipilah berdasarkan jenis tanaman prioritas utama suatu negara dan pemilahan secara spasial dari skala lokal hingga skala global.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini harus diinterpretasi bersamaan dengan indikator efisiensi sumber daya penting lainnya, seperti air dan nutrisi, untuk memastikan solusi berkelanjutan terkait agro-ekologis. Hal ini membutuhkan peningkatan pengumpulan data dan sistem pemantauan, termasuk pemodelan dan penginderaan jauh.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat diartikan sebagai perbandingan realisasi hasil produksi tanaman pangan yang terjadi terhadap target produksi yang ditentukan. Komoditas tanaman pangan pada indikator ini adalah tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Tanaman pangan utama tersebut merupakan komoditas strategis dan prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Data produksi aktual tanaman pangan disediakan oleh BPS dari Survei Ubinan yang dimulai tahun 1968 dan dilaksanakan rutin setiap empat bulan sekali, sedangkan target produksi ditentukan dalam program lima tahunan Kementan. Ketersediaan data memungkinkan indikator didisagregasi berdasarkan jenis tanaman pangan prioritas dan berdasarkan wilayah, nasional maupun provinsi.

11. Jumlah petugas penyuluh pertanian per 1000 petani (atau proporsi petani yang tercakup dalam program dan layanan penyuluhan pertanian)

Konsep dan Definisi

Untuk meningkatkan hasil pertanian berkelanjutan di semua daerah, tidak akan mungkin terjadi tanpa berfungsinya sistem penyuluhan pertanian publik dan atau swasta. Indikator yang diusulkan telah dikembangkan oleh FAO yang menelusuri jumlah profesional pertanian

yang berkualitas di berbagai sektor yang memberikan pelatihan, informasi, dan dukungan penyuluhan dan jasa lainnya kepada para petani dan usaha kecil dan menengah dalam rantai nilai pedesaan.

Disagregasi

Indikator ini dapat dibedakan pada skala sub-nasional, berdasarkan jenis kelamin, dan penyuluh sektor publik dan swasta.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, indikator tidak dibedakan antara tingkatan pelatihan penyuluh. Hanya mencakup profesional dengan tingkat minimum pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Kedua, indikator tidak mengukur efektivitas sistem penyuluhan pertanian yang benar-benar memberikan informasi, pengetahuan, dan layanan baru bagi petani. Oleh karena itu, indikator tambahan dapat dikembangkan untuk mengukur persentase petani yang tercakup penyuluhan pertanian atau program serupa yang berkualitas secara efektif dan teratur.

Ketersediaan di Indonesia

Rekapitulasi jumlah penyuluh pertanian tercatat setiap tahunnya oleh Kementan sampai pada level kabupaten. Penyuluh pertanian terdiri dari PNS, tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), dan honorer. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya satu penyuluh untuk setiap desa potensi pertanian. Berdasarkan ketersediaan data, indikator dapat dirinci menurut provinsi untuk memantau ketersediaan penyuluh di tiap desa, kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, jenjang jabatan, subsektor, dan usia penyuluh pertanian. Indikator lain yaitu persentase petani yang mendapatkan penyuluhan pertanian dapat diperoleh dari Survei Pendapatan Petani (SPP) yang merupakan kelanjutan dari Sensus Pertanian (ST) dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Data bisa dirinci sampai dengan level kabupaten/kota, selain itu juga dapat dirinci berdasarkan jenis penyuluhan yang diikuti seperti budidaya, pengolahan hasil, pemasaran hasil, dan lainnya. Karena hanya dikumpulkan setiap sepuluh tahun sekali, perkembangan indikator tidak bisa dilihat secara jangka pendek.

12. [Efisiensi Penggunaan Pupuk Nitrogen]

Konsep dan Definisi

Nitrogen memainkan peran sentral pada produktivitas, keberlanjutan dan dampak lingkungan dari sistem pangan. Sebagian besar nitrogen antropogenik yang dihasilkan masuk ke siklus global sebagai pupuk dalam produksi pertanian. Oleh karena itu, mengoptimalkan pengelolaan sehingga tercapainya hasil panen yang tinggi dengan efisiensi pupuk nitrogen yang tinggi pula merupakan komponen inti dari ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan.

Indikator ini merupakan rasio nitrogen dalam produk tanaman yang dipanen dengan jumlah nitrogen yang diterapkan per musim tanam atau tahun. Hal ini berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan pupuk di lahan pertanian, termasuk teknologi baru dan program pengelolaan para petani dan penasehat.

Target efisiensi penggunaan tanaman nitrogen adalah spesifik pada suatu konteks, terutama tergantung pada iklim, hasil, penggunaan nitrogen saat ini, kualitas tanah, irigasi, dan praktek-praktek pengelolaan tanaman lainnya. Indikator ini harus diinterpretasikan dengan indikator

lain yang berhubungan, seperti indikator hasil panen dan indikator produktivitas air. Berbagai kemungkinan target untuk indikator ini adalah meningkatnya efisiensi pupuk nitrogen sebesar 30 persen dibandingkan dengan level saat ini di negara-negara yang efisiensinya jauh di bawah level yang dapat dicapai dengan pengelolaan unsur hara yang baik dan penatagunaan.

Organisasi internasional dan regional, industri pupuk, dan komunitas ilmiah harus bekerja sama untuk memperbaiki indikator ini. Dibutuhkan perbaikan sistem pengumpulan data yang diperlukan dengan dua cara yaitu (i) statistik tahunan mengenai penggunaan unsur hara dan penghapusan tanaman/*crop removal* di tingkat sub-nasional dan menurut jenis (pupuk dan sumber nutrisi lainnya), dan (ii) monitoring lapangan secara teratur mengenai efisiensi penggunaan nitrogen dan indikator lain yang berhubungan dengan zat hara (misalnya kesuburan tanah, praktik manajemen untuk pengelolaan zat hara yang lebih baik).

Disagregasi

Secara spasial dan berdasarkan tanaman pangan atau sistem pertanian.

Komentar dan keterbatasan

Makro dan mikronutrien untuk produksi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan melalui nutrisi yang seimbang. Namun, secara global, penggunaan nitrogen dan efisiensinya juga penting karena dampaknya pada berbagai jasa ekosistem. Selain itu, indikator yang diusulkan tidak membahas penipisan unsur hara tanah, yang dapat mengurangi produksi tanaman dan keuntungan ekonomi. Negara-negara yang kurang memanfaatkan zat hara di bidang pertanian harus mempertimbangkan indikator tambahan dan target kuantitatif untuk mengatasi situasi penggunaan zat hara yang sedikit.

Ketersediaan di Indonesia

Penghitungan efisiensi penggunaan pupuk dapat dilakukan oleh Kementan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil dari penerapan Permentan No.40/ Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi.

13. [Kerugian besar akibat nitrogen reaktif dan fosfor terhadap lingkungan]

Konsep dan Definisi

Pupuk nitrogen dan fosfor sangat penting untuk sistem pertanian tanaman pangan populasi dunia. Pupuk tersebut penting untuk pertanian yang intensif, sehingga membatasi konversi lahan untuk pertanian. Kedua zat hara tersebut akan memainkan peran penting dalam mencapai SDGs. Terdapat perbedaan besar di antara dan di dalam negara-negara pada siklus hara. Sementara beberapa daerah - terutama Sub-Sahara Afrika – yang menggunakan nitrogen dan fosfor yang terlalu sedikit terjadi kehabisan zat hara tanah. Di negara yang lain mengalami kerugian akibat nitrogen dan fosfor yang berlebihan terutama dari pertanian dan peternakan, pembakaran bahan bakar, limbah, dan kegiatan lainnya. Arus nitrogen yang berlebihan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem utama dan bioma, khususnya di perairan, yang berdampak pada skala regional dan global. Sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan internasional bersama untuk mempromosikan praktek pengelolaan terbaik tanpa mengurangi produktivitas pertanian.

Cara utama untuk mengurangi kehilangan unsur hara tanpa mengurangi produktivitas pertanian dan kualitas tanah adalah penerapan penggunaan zat hara tanaman yang efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa indikator. SDSN mengusulkan untuk mendefinisikan

indikator pelengkap untuk memantau beban nutrisi yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada fungsi ekosistem.

Disagregasi

Akan ditinjau setelah indikator ditetapkan.

Komentar dan keterbatasan

Siklus nitrogen regional dan global tidak cukup kuat untuk menetapkan *planetary boundaries* kuantitatif untuk nitrogen dan fosfor. Batasan yang telah diusulkan di masa lalu mungkin perlu direvisi. Mengingat pentingnya zat hara bagi pembangunan berkelanjutan, memajukan pengetahuan regional dan global terkait dengan kerugian berlebihan akibat nitrogen reaktif dan fosfor untuk mengukur ambang regional dan global yang aman harus menjadi prioritas penting. Demikian juga, pemahaman tentang jalur yang dilalui arus nitrogen berlebihan di lingkungan pada skala lokal, nasional, regional, dan global perlu ditingkatkan untuk merancang indikator utama tentang arus nitrogen yang jelas.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat disusun oleh Kementan sebagai instansi utama yang mengatasi masalah pertanian dengan kerjasama pada berbagai lembaga ilmu pengetahuan.

14. [Akses terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan]

Konsep dan Definisi

Infrastruktur pengeringan dan penyimpanan hasil pertanian yang baik sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kontaminasi oleh mikotoksin, serangga, atau kontaminan makanan lainnya. Fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan juga meningkatkan pendapatan petani dengan memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk menjual hasil panen mereka dan menunggu tingkat harga yang baik. Perluasan kapasitas pengolahan di perdesaan dapat menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan akses ke pasar, dan memfasilitasi nilai tambah (termasuk produksi makanan untuk meningkatkan gizi bayi/anak dan mengurangi pekerjaan ibu yang membosankan). Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator yang mengestimasi akses ke fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan.

Disagregasi

Peluang untuk pemilahan ditinjau setelah indikator telah dikembangkan.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator dapat dibentuk oleh Kementan dan kerjasama dengan BPS untuk memasukkan variabel tersebut pada survei yang terkait.

15. Perubahan tahunan lahan rusak atau yang menjadi gurun (% atau ha)

Konsep dan Definisi

FAO mendefinisikan degradasi lahan sebagai pengurangan kondisi tanah, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa ekosistem dan untuk menjamin fungsinya

selama periode waktu. Komponen degradasi lahan meliputi salinisasi, erosi, hilangnya nutrisi tanah, dan gundukan pasir perambahan. Data degradasi lahan secara terus menerus ditingkatkan melalui kemajuan dalam penginderaan jauh, pemetaan digital, dan monitoring. Tujuan utama harus menghentikan semua degradasi lahan bersih pada tahun 2030.

Disagregasi

FAO mendukung metodologi untuk menentukan tingkat degradasi, membedakan antara ringan, sedang, kuat, dan ekstrim. Data akan dipisahkan berdasarkan kategori dan sub-region.

Komentar dan keterbatasan

Sampai saat ini, data lahan pertanian rusak dan yang menjadi gurun telah merata. Upaya telah ditingkatkan sejak PBB menunjuk 2010-2020 (dekade pengurusan), sebagian besar dipimpin oleh FAO dan UNCCD, namun masih ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Investasi dalam penginderaan jauh, pemetaan digital, dan pemantauan akan sangat penting untuk upaya ini.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator untuk mengetahui kejadian degradasi dan desertifikasi tanah dapat didekati dengan luas lahan kritis. Desertifikasi atau pengurusan adalah salah satu proses yang dapat menyebabkan lahan terdegradasi. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan menjadi sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal. Data lahan kritis dicatat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), tersedia mulai tahun 2000, kemudian diperbarui pada tahun 2006, 2010, dan 2011. Berdasarkan ketersediaan data, lahan kritis dapat dirinci berdasarkan wilayah pada level provinsi. Selain itu dapat juga dirinci berdasarkan tingkat kekritisan lahan, yaitu agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Namun, data lahan kritis yang tersedia tidak rutin diperbarui setiap tahun sehingga perubahan tahunan sulit dideteksi.

16. [Produktivitas air tanaman(hasil panen (ton) per satuan air irigasi (m³))/perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan jumlah air yang diberikan terhadap tanaman]

Konsep dan Definisi

Indikator yang diusulkan ini secara langsung berkaitan dengan air tawar yang digunakan untuk irigasi. Pada Sistem Neraca Ekonomi-Lingkungan (SEEA), produktivitas air didefinisikan sebagai nilai tambah pertanian dibagi dengan penggunaan air oleh pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendefinisikan indikator ini.

Disagregasi

Peluang untuk pemilahan ditinjau setelah indikator ditetapkan.

Komentar dan keterbatasan

Alternatif lain adalah dengan mendefinisikan produktivitas air sebagai efisiensi dengan air dikonversi menjadi produk yang dipanen, yaitu rasio antara hasil panen dan pasokan air musiman, termasuk curah hujan dan irigasi.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat disusun oleh Kementan sebagai instansi utama yang mengatasi masalah pertanian dengan kerjasama pada berbagai lembaga ilmu pengetahuan.

Indikator tambahan:

- **[Pergerakan harga bahan pangan]**

Volatilitas harga pangan yang ekstrim merupakan indikator penting dalam ketahanan pangan dan harus diketahui perkembangannya. Harga pangan di Indonesia dikumpulkan oleh BPS melalui hasil Survei Harga Konsumen yang biasa digunakan untuk menghitung inflasi.

- **Pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) pada sektor pertanian dan pembangunan pedesaan (persentase terhadap GNI/pendapatan nasional bruto)**

Indikator ini menggambarkan mobilisasi sumber daya publik dan swasta untuk litbang pada sektor pertanian dan pembangunan pedesaan terhadap Pendapatan Nasional Bruto. Data pengeluaran pemerintah belum bisa dibedakan fungsinya untuk penelitian dan pengembangan sehingga indikator ini belum tersedia di Indonesia.

- **[Keanekaragaman genetik]**

Indikator ini akan menggambarkan keanekaragaman benih dan tanaman genetik. Data bisa diperoleh melalui Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk memfasilitasi akses serta pertukaran data dan informasi di antara pengguna dan penyedia dibidang keanekaragaman hayati baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional, yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) dengan lembaga ilmiah dan penelitian, para ahli keanekaragaman hayati, dan institusi pemerintah dan non pemerintah yang memiliki *database* keanekaragaman hayati.

- **Kesenjangan hasil ternak (Persentase hasil ternak yang sebenarnya dibanding hasil produksi ternak yang dicapai)**

Indikator ini menggambarkan kesenjangan hasil untuk komoditas ternak besar seperti susu, telur dan daging, dengan mempertimbangkan iklim, kondisi penyakit dan pemanfaatan air dan pakan yang berkelanjutan. Indikator ini harus diinterpretasi dengan indikator lain yang menyatakan efisiensi sumber daya penting seperti pakan dan air untuk memastikan solusi agro-ekologis yang berkelanjutan, serta jumlah total ternak di rumah tangga dan tingkat nasional. Selain itu juga harus memastikan peningkatan hasil yang tidak mengorbankan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan petani dapat mengakses ke pelayanan kesehatan hewan. Data jumlah dan target produksi peternakan dapat diperoleh dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.

- **Tingkat pertumbuhan hasil panen serealia (persentase per tahun)**

Indikator ini menggambarkan kenaikan jangka panjang dalam hasil panen, yang memberikan kontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Data panen serealia yang digunakan adalah komoditas utama serealia yaitu padi dan jagung yang dihasilkan oleh BPS.

- **[Kesenjangan akses irigasi]**

Peningkatan irigasi di suatu daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun, saat ini sistem irigasi kurang dimanfaatkan, sehingga diperlukan indikator yang tepat untuk mengukur hal tersebut. Ketersediaan infrastruktur saluran irigasi dicatat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sehingga data dapat menjadi dasar penyusunan indikator.

- **[Persentase petani yang memiliki asuransi tanaman]**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketahanan (badai, banjir, kekeringan, hama, dan lain-lain) dalam sistem pertanian. Indikator ini dapat menjadi indikator tambahan yang bisa dikumpulkan oleh BPS terkait keadaan atau karakteristik rumah tangga pertanian.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia

Target 3A. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, mengurangi kematian ibu menjadi setidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengurangi angka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun setidaknya 30 persen dari angka pada tahun 2015

17. Angka kematian neonatal, bayi, dan balita

Konsep dan Definisi

Angka kematian balita adalah probabilitas bagi seorang anak untuk meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, jika merujuk pada angka kematian spesifik usia saat ini. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan lebih dari 90 persen kematian global di antara anak-anak di bawah usia 18 tahun. Data kejadian penyakit seringkali tidak tersedia, sehingga yang digunakan adalah data angka kematian.

Disagregasi

Data harus sangat terpilah berdasarkan kelompok umur sehingga dapat mengidentifikasi populasi rentan tertentu.

Komentar dan keterbatasan

Angka kematian neonatal (<28 hari) dan bayi (<1 tahun) mewakili subkomponen penting angka kematian balita, karena tren data sebelumnya menunjukkan penurunan kematian neonatal dan bayi yang lebih lambat dibandingkan anak usia 1 sampai 4.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini diperoleh dari SDKI, SP, dan Supas. Data bisa disajikan berdasarkan usia kematian bayi yaitu neonatal (0-1 bulan), bayi (0-1 tahun), dan balita (0-4 tahun), dan wilayah kota-desa. Indikator ini dapat disajikan sampai wilayah provinsi dan dapat diproyeksi setiap tahunnya.

18. Rasio dan Angka Kematian Ibu

Konsep dan Definisi

Rasio kematian ibu adalah jumlah kematian ibu per tahun dari penyebab yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab-sebab karena kecelakaan atau alasan insidental) yang terjadi selama kehamilan dan persalinan atau dalam 42 hari dari terminasi kehamilan, per 100.000 kelahiran per tahun. Indikator ini mencerminkan kapasitas sistem kesehatan untuk mencegah dan mengatasi komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan secara efektif. Indikator ini juga menyoroti kurangnya asupan gizi

dan kesehatan perempuan secara umum dan mencerminkan kurangnya pemenuhan hak reproduksi mereka sehingga menyebabkan kehamilan yang buruk dan berulang.

Tingkat kematian ibu adalah jumlah kematian ibu di suatu populasi dibagi dengan jumlah wanita usia reproduksi. Hal ini menangkap kemungkinan hamil dan meninggal selama kehamilan (termasuk kematian sampai enam minggu setelah melahirkan).

Disagregasi

Seiring membaiknya sistem pendataan, akan sangat penting untuk memilah menurut usia, lokasi geografis (pedesaan dan perkotaan), dan tingkat pendapatan.

Komentar dan keterbatasan

Sulit untuk mengukur registrasi dan sistem informasi kesehatan dari kedua ukuran di atas karena di negara berkembang informasi yang demikian seringkali lemah.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator kematian ibu yang ada di Indonesia dan yang terkenal adalah rasio kematian ibu yang dinamakan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Data AKI dapat diproyeksi setiap tahunnya sampai dengan level provinsi. Disagregasi data AKI dapat dilakukan berdasarkan umur, wilayah (perkotaan dan pedesaan), dan tingkat pendapatan.

19. Prevalensi, angka pengobatan dan angka kematian HIV

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur jumlah individu dengan kelompok usia yang hidup dengan HIV, yang dinyatakan dengan persentase terhadap total penduduk pada kelompok usia, serta tingkat pengobatan dengan terapi anti-retroviral menurut kelompok usia tertentu. Indikator ini menggambarkan kemajuan dalam mengurangi infeksi HIV dan meningkatkan akses terhadap pengobatan. Indikator pengobatan menggambarkan persentase penduduk di setiap kelompok umur dengan HIV saat ini yang menerima terapi antiretroviral (ART), yang terdiri dari penggunaan setidaknya tiga antiretroviral (ARV), yang secara maksimal menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit. Indikator ini juga menambahkan gambaran kematian yang disebabkan oleh HIV/ AIDS.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Komentar dan keterbatasan

Prevalensi HIV pada kelompok usia tertentu adalah contoh acuan yang lebih baik untuk memantau kejadian HIV secara keseluruhan karena kecenderungan prevalensi HIV biasanya berbeda bagi setiap kelompok umur.

Ketersediaan di Indonesia

Prevalensi kasus HIV AIDS dihitung dengan menggunakan informasi data kasus baru dan kasus kumulatif HIV AIDS. Indikator perkembangan kasus AIDS ini dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan yang terdeteksi dari berbagai sarana kesehatan di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Berdasarkan survei STBP, prevalensi dapat didisagregasi menurut kelompok penduduk berisiko tinggi.

Indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pengobatan HIV dan tersedia di Indonesia adalah proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral (ARV). Data dikumpulkan oleh Kemenkes dari berbagai sarana kesehatan setiap tahun. Indikator dapat dirinci berdasarkan jenis terapi ARV (ART lini 1 dan lini 2), wilayah (kabupaten/kota), umur, dan jenis kelamin.

Data kematian AIDS yang dilaporkan tercatat di berbagai sarana kesehatan di Indonesia. Data tersedia setiap tahun. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota.

20. Insiden, prevalensi, dan angka kematian terkait TBC

Konsep dan Definisi

Angka kejadian TB adalah jumlah kasus baru TB per 100.000 orang per tahun. Prevalensi adalah jumlah kasus TB dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu per 100.000. Angka kematian TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB per 100.000 dalam satu tahun. Mendeteksi dan menyembuhkan TB merupakan tindakan yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Prevalensi dan kematian merupakan penanda yang lebih sensitif dari beban tuberkulosis yang berubah-ubah dari kasus baru, namun data insiden TB lebih komprehensif dan memberikan gambaran terbaik dari dampak penanggulangan TB di dunia

Disagregasi

Data harus dipisahkan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, kota/desa, dan pendapatan, serta jenis TB, dengan perhatian khusus pada varietas yang resisten terhadap obat. Selain itu, harus dipisahkan berdasarkan penyakit (paru/ekstra-paru), jenis konfirmasi laboratorium (biasanya BTA), dan riwayat pengobatan sebelumnya

Komentar dan keterbatasan

Kualitas data sangat tergantung pada kelengkapan pelaporan fasilitas kesehatan.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator kasus TB di atas diperoleh dari laporan TB Global oleh WHO pada level nasional setiap tahun. WHO mengestimasi indikator tersebut berdasarkan data kasus TB yang dilaporkan dengan melakukan konsultasi bersama negara yang bersangkutan. Pada indikator tersebut diperoleh informasi pengidap TB yang juga terinfeksi HIV.

Data Prevalensi TB Paru juga dapat diperoleh dari Riskesdas. Data prevalensi dari Riskesdas tersedia sampai level provinsi dan dapat dirinci berdasarkan wilayah kota-desa, dan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan.

Informasi mengenai kasus TB dapat juga diperoleh dengan menggunakan indikator Proporsi pasien TB Paru BTA+ di antara suspek yang diperiksa, Angka penemuan kasus TB Paru BTA+ (**Case Detection Rate** (CDR)), dan Angka keberhasilan pengobatan (**Success Rate** (SR)) yang dikumpulkan Kemenkes secara pencatatan yang tersedia sampai wilayah kabupaten/kota tetapi tidak bisa dirinci secara lengkap berdasarkan karakteristik penderita.

21. Insiden dan angka kematian terkait malaria

Konsep dan Definisi

Angka kejadian malaria adalah jumlah kasus malaria baru per 100.000 orang per tahun. Angka kematian malaria adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh malaria per 100.000 orang per tahun.

Disagregasi

Data harus dipisahkan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, lokasi geografis (kota-desa), pendapatan, serta oleh agen penyebab malaria.

Komentar dan keterbatasan

Kualitas data sangat bergantung pada kelengkapan pelaporan fasilitas kesehatan. Selain itu, karena gejala malaria mirip dengan penyakit lain, insiden dan kematian kadang-kadang mengalami salah pelaporan di negara-negara yang memiliki sumber daya yang kurang. Penemuan pengujian diagnostik malaria yang cepat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data.

Ketersediaan di Indonesia

Insiden malaria diperoleh dari Riskesdas. Selain insiden, Riskesdas juga menghasilkan data prevalensi kasus malaria. Data tersedia sampai level provinsi dan dapat dirinci berdasarkan wilayah (kota-desa) dan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Publikasi Riskesdas tidak menghasilkan angka kematian akibat malaria. Selain melalui Riskesdas, data insiden malaria juga dapat diperoleh dari Kemenkes berupa pendataan setiap tahunnya dari berbagai sarana kesehatan.

Tidak tersedianya data lengkap mengenai kematian penduduk akibat malaria baik dari pendataan maupun Riskesdas, menyebabkan variabel tersebut tidak bisa dijadikan indikator baik pada MDGs maupun SDGs.

22. Probabilitas kematian antara usia tepat 30 dan 70 tahun dari penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis

Konsep dan Definisi

Beban penyakit akibat penyakit tidak menular (PTM) atau *Non-Communicable Disease* (NCD) di antara orang dewasa meningkat karena faktor usia dan transisi kesehatan. Mengukur risiko kematian akibat PTM merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai beban dari kematian akibat PTM dalam suatu populasi. Indikator ini mengukur risiko kematian dini akibat PTM yang paling umum. Merupakan persentase orang berumur 30 tahun yang akan mati sebelum ulang tahun ke-70 mereka dari penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kematian saat ini di setiap usia dan ia tidak akan mati dari penyebab kematian lain, seperti kecelakaan atau HIV/AIDS.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin, kemungkinan lain untuk disagregasi akan ditinjau dan perlu kajian lebih lanjut lagi.

Komentar dan keterbatasan

Salah satu keterbatasan adalah terbatasnya data kematian orang dewasa, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah.

Ketersediaan di Indonesia

Keterbatasan pengumpulan data seperti yang dijelaskan sebelumnya terjadi di Indonesia. Sehingga indikator terkait PTM di Indonesia tidak dapat mengukur probabilitas kematian antara usia 30-70 tahun. Hal ini disebabkan karena pengukuran kejadian PTM di Indonesia hanya melalui Riskesdas dan berupa prevalensi. Prevalensi PTM merupakan indikator tambahan yang disarankan SDSN dan merupakan indikator untuk Target 3B terkait pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular.

23. Kematian di lalu lintas per 100.000 penduduk*Konsep dan Definisi*

Indikator ini mengukur keselamatan berkendara dan tingkat kematian di lalu lintas akibat luka fatal yang dihitung per 100.000 penduduk. Kecelakaan berkendara di lalu lintas adalah tantangan utama bidang kesehatan dan pembangunan karena merupakan penyebab kedelapan dari keseluruhan kematian secara global, dan penyebab utama kematian bagi remaja berusia 15-29. Data tren terkini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menjadi penyebab utama kematian kelima pada tahun 2030.

Disagregasi

WHO memilah berdasarkan kematian pejalan kaki, pengendara sepeda, pengemudi kendaraan roda empat, pengendara dari kendaraan roda dua atau roda tiga, dan lainnya.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Data kecelakaan lalu lintas dicatat oleh Kepolisian RI. Data dapat dipilah berdasarkan usia, jenis kelamin, akibat kecelakaan, dan jenis kendaraan setiap tahunnya.

24. Rata-rata polusi udara dari benda-benda partikulat di perkotaan (PM10 dan PM2,5)*Konsep dan Definisi*

Urbanisasi yang cepat telah mengakibatkan meningkatnya polusi udara perkotaan di kota-kota besar, khususnya di negara-negara berkembang. Diperkirakan bahwa lebih dari 1 juta kematian prematur dapat dikaitkan dengan polusi udara luar perkotaan. Masalah ini berkembang dan memiliki dampak ekonomi dan kesehatan yang buruk, terutama untuk anak-anak. Oleh karena itu, SDSN mengusulkan agar kerangka kerja pasca-2015 mencakup indikator yang dapat mengukur rata-rata partikel polusi udara perkotaan.

Disagregasi

Berdasarkan kota dan provinsi.

Komentar dan keterbatasan

WHO mengumpulkan data terkait indikator ini untuk partikel PM10 (yaitu partikel dengan

diameter sama atau lebih besar dari 10 mikron). Ada kekhawatiran tentang dampak kesehatan dari partikel halus berdiameter 2,5 mikron, namun data pada partikel tersebut kurang tersedia. SDSN merekomendasikan bahwa kedua indikator harus diketahui. Lembaga statistik global harus mengembangkan kerangka kerja untuk mengumpulkan data. Indikator pelengkap yang berbasis populasi, seperti persentase penduduk yang terpapar PM10 dan PM2.5 di atas ambang batas μg tertentu/ m^3 (yaitu 15), dapat memberikan informasi penting kepada pemerintah kota sebagai kebijakan untuk menurunkan dampak kesehatan dari polusi udara.

Ketersediaan di Indonesia

Pengumpulan data pada indikator ini dilakukan oleh WHO pada 5 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Pekanbaru dan baru menggunakan PM10. Indonesia sendiri belum mengumpulkan data yang lengkap mengenai polusi udara dengan menggunakan acuan PM.

25. Angka harapan hidup sehat pada saat lahir

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur rata-rata jumlah tahun dimana seseorang dapat berharap untuk hidup dalam kesehatan penuh. dengan memperhatikan tahun hidup dengan keadaan kurang sehat karena penyakit dan/atau cedera.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendapatan.

Komentar dan keterbatasan

Keterbatasan utama dari indikator ini adalah kurangnya data mortalitas dan morbiditas yang dapat diandalkan, terutama dari negara-negara berpenghasilan rendah dan tertinggal (WHO hanya mengumpulkan data setiap 5 tahun). Masalah lainnya yaitu kurangnya keterbandingan data yang dilaporkan sendiri dari wawancara kesehatan dan pengukuran preferensi sehat tiap negara untuk pelaporan sendiri tersebut.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini belum tersedia di Indonesia, hanya ada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir yang tidak dapat memberikan informasi tentang taraf dan kualitas hidup dari penduduk di suatu wilayah. Penghitungan indikator angka harapan hidup sehat ini dapat dilakukan oleh BPS karena BPS telah mengumpulkan beberapa variabel terkait mortalitas dan morbiditas seperti keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit yang dikumpulkan melalui Susenas.

Indikator tambahan:

- **[Kematian akibat polusi udara dalam ruangan]**

Indikator ini melacak kematian dari penyakit yang disebabkan oleh polusi udara rumah tangga (sering disebabkan oleh memasak dengan bahan bakar padat) termasuk pneumonia, stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan kanker paru-paru. Indikator dapat dikembangkan oleh WHO atau melalui Kementerian Kesehatan secara nasional sebagai ukuran yang dapat menggambarkan faktor risiko penyebab penyakit ISPA.

- **Tingkat Insiden penyakit diare pada balita**

Diare didefinisikan sebagai BAB dengan konsistensi tinja cair sebanyak tiga kali atau lebih

dalam jangka waktu kurang dari dan sama dengan 24 jam. Riskesdas mengumpulkan informasi insiden diare sebagai dasar rumusan kebijakan, dan data *period prevalens* diare agar bisa dibandingkan dengan Riskesdas periode sebelumnya. Data bisa dipilah menurut kelompok umur balita, jenis kelamin, wilayah kota-desa, dan pendapatan ruta.

- **Tingkat kejadian dan kematian terkait dengan hepatitis**

Merupakan angka prevalensi dan mortalitas untuk berbagai jenis hepatitis (A, B, E, dan lain-lain). Data hepatitis yang tercatat hanya data prevalensi hepatitis yang dikumpulkan melalui Riskesdas. Data tersedia menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, dan kuintil pendapatan, serta wilayah kota-desa.

Target 3B. Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatan dasar

26. [Konsultasi dengan provider kesehatan yang berlisensi di fasilitas kesehatan atau dalam atau masyarakat per orang, per tahun]

Konsep dan Definisi

Akses ke pelayanan perawatan kesehatan dasar, termasuk fasilitas perawatan kebidanan darurat (*Emergency Obstetric Care/ EmOC*), diperlukan untuk mencapai target-target bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar didefinisikan secara luas untuk mencakup pencegahan, pengobatan, dan perawatan paliatif dari penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental. Semua elemen ini sama-sama penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Indikator yang diusulkan mengukur jumlah rata-rata konsultasi - termasuk jasa preventif dan kuratif - dengan penyedia berlisensi. Penyedia berlisensi di fasilitas kesehatan termasuk semua personel terlatih terdaftar dan terintegrasi dalam suatu sistem kesehatan nasional. Diantaranya juga termasuk konsultasi dengan petugas kesehatan masyarakat (kader kesehatan masyarakat) tetapi tidak termasuk apoteker.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan wilayah. Disagregasi lain perlu ditinjau lebih lanjut.

Komentar dan keterbatasan

Ketersediaan data mungkin menjadi faktor penghambat untuk menerapkan indikator ini di daerah pedesaan dan beberapa negara berpenghasilan rendah. Namun, teknologi informasi dan komunikasi modern memungkinkan untuk mengumpulkan data tersebut secara efektif dan dengan biaya rendah. Karena data yang sama dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem kesehatan dan berbagai fasilitas, pengumpulan data tersebut harus dilakukan.

Keterbatasan lain dari indikator ini yaitu mengukur jumlah rata-rata konsultasi di seluruh populasi. Rata-rata tersebut tidak memberikan informasi tentang berapa banyak orang yang tidak tercakup oleh sistem kesehatan untuk beberapa atau semua jenis konsultasi.

Ukuran alternatif untuk akses ke layanan kesehatan dinyatakan dengan persentase penduduk yang memiliki jarak tempat tinggal ke tempat pelayanan dalam [x] kilometer. Tempat pelayanan biasanya didefinisikan sebagai setiap lokasi yang terdapat penyedia berlisensi (termasuk kader kesehatan masyarakat tetapi tidak termasuk apoteker) yang menyediakan pelayanan kesehatan. Pada fasilitas EmOC, WHO mendefinisikan tingkat akses yang dapat diterima adalah berjumlah lima fasilitas (termasuk setidaknya satu fasilitas lengkap) untuk setiap 500.000 penduduk. Kesulitan dari indikator geospasial tersebut adalah indikator tidak cukup memberikan gambaran pemanfaatan dan akses layanan, yang dapat dikondisikan oleh faktor di luar kedekatan dan keterjangkauan dengan fasilitas layanan kesehatan.

Ketersediaan di Indonesia

Pengumpulan data untuk indikator ini dapat dilakukan oleh Kemenkes untuk mendapatkan gambaran mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai rekomendasi kebijakan. Indikator ini, misalnya, dapat ditambahkan pada Risfaskes dan Riskesdas.

27. [Persentase penduduk tanpa perlindungan keuangan yang efektif untuk perawatan kesehatan]

Konsep dan Definisi

Sebuah komponen utama Cakupan Kesehatan Universal (UHC) adalah keterjangkauan finansial untuk pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Hal yang sangat penting bahwa upaya global untuk memberantas kemiskinan ekstrim dan mempromosikan inklusi sosial tidak dirusak dengan memperbanyak pengeluaran untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga orang-orang miskin mampu membiayai perawatan penting. Untuk alasan ini, kerangka monitoring untuk SDGs harus menyertakan Indikator inti pada perlindungan keuangan untuk perawatan kesehatan.

Namun, pengukuran keterjangkauan keuangan dan perlindungan untuk berbagai layanan kesehatan cenderung sulit. Indikator untuk keterjangkauan keuangan dan perlindungan membutuhkan data yang akurat dari sejumlah sumber, termasuk aturan pembiayaan kesehatan masyarakat dan survei rumah tangga. Sebaiknya terdapat ketersediaan data yang cukup di negara-negara yang melaksanakan perawatan kesehatan universal (UHC) tetapi hal ini menjadi tantangan di negara lain.

Di bawah ini dilampirkan pilihan yang tersedia untuk indikator ini dan batasan-batasan utama. Keterbatasan ini dapat diatasi nantinya, untuk saat ini SDSN menyajikan *placeholder* untuk indikator ini. SDSN berharap untuk dapat bekerja sama dengan organisasi yang berminat untuk mengidentifikasi indikator yang tepat dan mempromosikannya sebagai bagian dari kerangka indikator untuk SDGs.

Pilihan yang tersedia untuk mendefinisikan suatu indikator utama pada perlindungan keuangan di sektor kesehatan antara lain:

1. Jumlah rumah tangga yang jatuh di bawah garis kemiskinan (atau menjadi lebih miskin) karena pengeluaran perawatan kesehatan yang ditanggung sendiri
2. Jumlah pengeluaran kesehatan yang ditanggung rumah tangga terhadap total pengeluaran rumah tangga
3. Persentase rumah tangga yang mengalami pengeluaran kesehatan yang sangat besar (biasanya didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan bersih rumah tangga tahunan atas kebutuhan-kebutuhan hidup)

4. Ukuran sintetis lain mengenai perlindungan keuangan terhadap sistem perawatan kesehatan.

Sebagian besar dari indikator-indikator ini juga dapat disusun secara terbalik, misalnya bagian dari populasi yang tidak mengalami pengeluaran kesehatan yang sangat besar.

Laporan terbaru oleh WHO dan Bank Dunia merekomendasikan opsi pertama. Indikator tersebut memuat unsur-unsur penting dari perlindungan keuangan. Ketersediaan data telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga indikator ini dapat dihitung untuk sejumlah besar negara. Namun, indikator ini tidak cukup mampu untuk mengukur kondisi umum dari rumah tangga yang sudah miskin yang sama sekali tidak mengakses layanan kesehatan karena kendala biaya pelayanan kesehatan. Menjadi miskin atau lebih miskin sangat berbeda dibanding terjebak dalam kemiskinan tanpa akses perawatan kesehatan. Situasi terakhir menunjukkan terdapat banyak orang yang membutuhkan akses tersebut.

Untuk indikator nomor 2 dan 3 menghadapi tantangan yang sama yaitu kurangnya pelaporan oleh rumah tangga yang tidak mengakses pelayanan kesehatan yang memadai atau tidak sama sekali karena kendala biaya. Selain itu, indikator-indikator ini tidak memberikan indikasi yang jelas dari dampak pengeluaran untuk kesehatan terhadap situasi kesehatan dan ekonomi sebuah rumah tangga.

Pada akhirnya, juga terdapat kemungkinan untuk mengevaluasi perlindungan keuangan sistem perawatan kesehatan dengan cara yang lebih sintetis, berdasarkan aturan pembiayaan publik untuk layanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan laboratorium, dan obat-obatan. Sistem dengan pembiayaan publik penuh akan mendapatkan skor tinggi; sementara sistem yang membutuhkan biaya yang tinggi akan mendapatkan skor rendah. Perhitungan sintetis yang dilakukan setiap tahun berdasarkan aturan kesehatan dapat diperiksa dan divalidasi oleh perbandingan dengan pengeluaran dari uang sendiri dan dengan pertanyaan survei (misalnya ,apakah Anda dan anggota keluarga tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan atau obat-obatan karena kurangnya pendapatan keluarga?).

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan.

Komentar dan keterbatasan

Ditentukan setelah indikator dispesifikasi.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dibangun dengan menambahkan informasi terkait pada survei yang berbasis rumah tangga seperti Susenas pada keterangan kesehatan rumahtangga.

28. Persentase anak yang menerima imunisasi lengkap sesuai rekomendasi WHO

Konsep dan Definisi

WHO menyarankan agar semua anak menerima vaksinasi terhadap BCG, hepatitis B, polio, DTP, haemophilus influenza, pneumokokus (konjugasi), rotavirus, campak, rubella, dan remaja perempuan (usia 9-13) menerima vaksinasi terhadap HPV. Indikator ini mengukur persentase anak-anak dan remaja yang telah menerima semua imunisasi tersebut pada usia yang tepat, seperti yang dianjurkan oleh WHO.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kemungkinan lain untuk disagregasi perlu ditinjau lebih lanjut.

Komentar dan keterbatasan

Beberapa negara mungkin ingin memasukkan vaksinasi tambahan, seperti tetanus, demam kuning, dan lain-lain, seperti yang dianjurkan oleh Rencana Aksi Vaksin Global WHO.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator dihitung dari hasil Susenas maupun Riskesdas. Menurut Susenas, persentase balita yang sudah diimunisasi lengkap (PBD) adalah perbandingan antara jumlah balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak tiga kali, BCG dan campak dengan jumlah anak usia <5 tahun dan biasanya dinyatakan dalam persen. Sedangkan pada Riskesdas, anak disebut sudah mendapat imunisasi lengkap bila sudah mendapatkan semua jenis imunisasi satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Jadwal imunisasi untuk HB-0, BCG, polio, DPT-HB, dan campak berbeda, sehingga bayi umur 0-11 bulan tidak dianalisis. Analisis dilakukan pada anak umur 12-23 bulan, yang telah melewati masa imunisasi dasar. Dari kedua sumber di atas, data dapat dirinci berdasarkan wilayah kota-desa dan jenis kelamin.

29. Tingkat prevalensi kontrasepsi/CPR (Indikator MDG)

Konsep dan Definisi

Tingkat prevalensi kontrasepsi didefinisikan sebagai persentase wanita usia subur (atau pasangannya) yang menggunakan kontrasepsi pada titik waktu tertentu. Perempuan usia reproduksi biasanya didefinisikan sebagai wanita berusia 15 hingga 49, namun remaja yang aktif secara seksual di bawah 15 juga harus disertakan. Peningkatan prevalensi kontrasepsi juga merupakan determinan penting untuk mengetahui perbedaan antar negara dalam kesuburan dan penurunan kesuburan yang sedang berlangsung di negara-negara berkembang.

Prevalensi kontrasepsi dipengaruhi oleh keinginan kesuburan seseorang, ketersediaan produk dan layanan berkualitas tinggi, norma-norma sosial dan nilai-nilai, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain, seperti pola perkawinan dan praktek jarak-kelahiran. Indikator ini merupakan sebuah indikator kependudukan dan kesehatan, khususnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Tingkat penggunaan kontrasepsi memiliki efek langsung yang kuat pada tingkat fertilitas total (TFR) dan TFR terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini juga berfungsi sebagai ukuran pendekatan terhadap akses layanan kesehatan reproduksi yang penting untuk memenuhi banyak target kesehatan, terutama yang berkaitan dengan target kematian anak, kesehatan ibu, HIV/AIDS, dan kesetaraan gender.

Disagregasi

Berdasarkan usia dan status perkawinan.

Komentar dan keterbatasan

Keterbatasan indikator ini diantaranya yaitu penggunaan keseluruhan yang *under-reporting* dan *under-estimate*, referensi waktu yang samar-samar, dan kurang akurat .

Ketersediaan di Indonesia

CPR diperoleh dari Susenas dan SDKI. Data dapat didisagregasi berdasarkan umur dan status perkawinan (kawin, cerai hidup, atau cerai mati). Data yang dikumpulkan melalui Susenas belum mencakup remaja belum menikah yang aktif secara seksual, hanya pada wanita berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati saja, sedangkan SDKI dapat menggambarkan pemakaian kontrasepsi pada wanita belum kawin.

30. [Program-program fungsional dari promosi kesehatan mental multisektoral dan pencegahan yang berlaku]

Konsep dan Definisi

Adanya kebutuhan akan layanan kesehatan mental yang komprehensif untuk dijadikan sebagai bagian dari paket perawatan kesehatan universal (UHC). *Mental Health Action Plan WHO* mengusulkan sejumlah indikator kesehatan mental, termasuk indikator ini, yang mengukur efektivitas program untuk mempromosikan kesehatan mental dan mendapatkan layanan yang diperlukan untuk pasien.

Disagregasi

Peluang untuk disagregasi ditinjau setelah indikator telah dikembangkan.

Komentar dan keterbatasan

Metodologi yang sebenarnya untuk jenis pengumpulan data perlu dikembangkan. Negara-negara dapat memilih untuk melengkapi indikator di atas dengan indikator berbasis hasil, seperti jumlah orang yang menerima perawatan per 1000 penduduk, namun penelitian tambahan akan diperlukan untuk menentukan berbagai sasaran yang tepat untuk indikator tersebut.

Ketersediaan di Indonesia

Perkembangan kegiatan Program Kesehatan Jiwa oleh tenaga Puskesmas dapat tergambar pada hasil Rifaskes. Namun pada Rifaskes, informasi yang tersedia adalah mengenai fasilitas program yang ada di puskesmas, belum menggambarkan efektivitas program tersebut. Kegiatan Program Kesehatan Jiwa terdiri dari kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penemuan, penanganan, rujukan ke RS terhadap kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial, kegiatan konseling masalah psikososial kenakalan remaja, problem ruta, keluarga, dan kegiatan pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah. Perlu cakupan pengumpulan variabel yang lebih luas.

Indikator tambahan:

- **Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, sebagai persentase dari PDB**

Untuk mencapai cakupan kesehatan universal, negara membutuhkan mengerahkan dana yang cukup untuk sistem kesehatan nasional, sesuai dengan Deklarasi Abuja 2001. Indikator ini melacak pengeluaran publik nasional pada bidang kesehatan. Data dikumpulkan oleh Kemenkeu dan BPS sampai pada wilayah provinsi.

- **Persentase tempat pelayanan kesehatan dengan suplai dan peralatan yang menyeluruh dan konsisten untuk memberikan paket pelayanan dasar**

Berdasarkan paket peralatan yang dibutuhkan (misalnya instrumen bedah, mesin *ultrasound*) dan berbagai persediaan (misalnya sarung tangan karet, vaksin) yang ditentukan oleh *World*

Health Assembly dan/atau di tingkat nasional oleh departemen kesehatan, indikator ini melacak jumlah poin-poin pelayanan yang memenuhi persyaratan minimum. Pada tahun 2011, Kemenkes melakukan riset mengenai gambaran sarana dan prasarana kesehatan yang bernama Risfaskes (Riset Fasilitas Kesehatan) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan seperti fasilitas (rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium), termasuk SDM, peralatan kesehatan penting dan canggih dan penyediaan pelayanan. Sehingga, hasil Risfaskes dapat menjadi sumber data untuk indikator ini karena Risfaskes bermanfaat untuk mendukung pencapaian Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jamkesmas dengan menyediakan data fasilitas terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).

- **Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, perawat EmOC/perawatan kebidanan darurat)**

WHO saat ini hanya menghitung rasio dokter, perawat, dan bidan, Namun Tenaga Kesehatan Masyarakat (kader kesehatan masyarakat) harus dimasukkan dalam perhitungan WHO jika relevan. Data rasio tenaga kesehatan dapat diperoleh melalui Pendataan Podes (dokter, bidan, tenaga kesehatan lain, dan dukun Bayi). Selain itu, Risfaskes juga mencakup informasi mengenai tenaga kesehatan yang tersedia tetapi menurut fasilitas kesehatan (RS Pemerintah dan Puskesmas). Tenaga kesehatan yang tercakup pada Risfaskes adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan tenaga gizi.

- **Persentase penduduk dengan akses terhadap obat-obatan penting dan komoditas penting dengan harga yang terjangkau akses secara berkelanjutan**

Merupakan persentase penduduk yang memiliki akses fisik dan keuangan yang dapat diandalkan untuk obat-obatan esensial (misalnya vaksin, antibiotik, anti-retroviral) dan komoditas (peralatan non-farmasi dan perlengkapan). Oleh karena belum tersedianya indikator yang dapat menggambarkan penduduk yang memiliki akses obat-obatan penting, untuk sementara indikator ini dapat didekati dengan data puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh penduduk. Untuk mengetahui perkembangan akses dari sisi ketersediaan fasilitas, Risfaskes dapat memberi informasi mengenai persentase Puskesmas menurut ketersediaan obat umum, obat gigi, obat/alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, vaksin, dan alat kesehatan dalam dan luar gedung.

- **Persentase fasilitas perawatan kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan kode dan standar bangunan**

Indikator ini mengukur apakah fasilitas kesehatan baru sesuai dengan standar nasional untuk kesehatan dan keselamatan manusia, serta sesuai dengan standar untuk menahan bencana alam (banjir, gempa bumi, dan topan), yang merupakan komponen kunci dari kesiapan terhadap bencana. Indikator ini belum tersedia di Indonesia.

- **Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak**

Merupakan persentase anak di bawah satu tahun yang telah menerima setidaknya satu dosis yang mengandung vaksin campak. Data dikumpulkan melalui Susenas dan juga SDKI.

- **Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan setidaknya empat kali kunjungan)**

Merupakan persentase wanita usia 15-49 tahun dengan kelahiran hidup pada periode waktu tertentu yang menerima perawatan antenatal, yang disediakan oleh tenaga kesehatan

terampil, setidaknya sekali selama kehamilan mereka dan setiap empat kali atau lebih selama kehamilan mereka. Indonesia menganjurkan agar ibu hamil melakukan paling sedikit empat kali kunjungan untuk pemeriksaan selama kehamilan menurut jadwal 1-1-2 yaitu: paling sedikit sekali kunjungan dalam trimester pertama, paling sedikit sekali kunjungan pada trimester kedua, dan paling sedikit dua kali kunjungan dalam trimester ketiga. Sumber data indikator ini adalah SDKI dan dapat dirinci berdasarkan jumlah kunjungan pemeriksaan, daerah (kota-des), dan umur kandungan saat kunjungan.

- **Cakupan pelayanan Pasca Persalinan (satu kunjungan)**

Mirip dengan cakupan perawatan antenatal, persentase wanita usia 15-49 dengan kelahiran hidup pada periode waktu tertentu yang menerima perawatan pasca-persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih setidaknya sekali setelah kelahiran anak mereka dan penyedia lain, empat kali atau lebih setelah melahirkan. Pelayanan pasca persalinan atau perawatan nifas memberikan kesempatan untuk mengobati komplikasi yang timbul dalam persalinan dan untuk memberikan informasi penting kepada ibu tentang cara merawat dirinya dan bayinya. Masa nifas didefinisikan sebagai waktu antara keluarnya ari-ari (plasenta) sampai 42 hari (6 minggu) setelah persalinan. Data bersumber dari SDKI dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik latar belakang, daerah (kota-des), dan waktu pemeriksaan nifas pertama.

- **Cakupan suplemen asam folat-besi untuk ibu hamil (%)**

Merupakan persentase ibu hamil yang secara teratur meminum dosis suplemen asam folat-besi yang dianjurkan. Indikator ini tersedia di Indonesia berupa persentase pemberian Fe3 kepada ibu hamil. Data dikumpulkan Kemenkes tiap tahun dan sampai level kabupaten/kota.

- **Persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran**

Merupakan persentase ibu menyusui yang bayi dengan ASI eksklusif (bukan susu formula atau makanan padat) selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Indikator ini dapat diperoleh melalui Susenas, Riskesdas, maupun SDKI.

- **Persentase ibu hamil yang positif HIV + yang menerima PMTCT (Pencegahan penularan dari ibu-ke-bayi)**

Indikator ini melacak persentase ibu hamil yang mengidap HIV pada suatu resimen untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PMTCT). Dengan tidak adanya intervensi, 15-45% ibu hamil yang mengidap HIV menularkan virus kepada anak-anak mereka. Angka ini dapat dikurangi sampai di bawah 5% dengan adanya intervensi. Data dikumpulkan Kemenkes tiap tahun.

- **Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan langsung jangka pendek**

Merupakan persentase kasus tuberkulosis (TB) yang terdeteksi dan sembuh, juga dikenal sebagai tingkat keberhasilan pengobatan TB, adalah jumlah kasus TB baru pada tahun tertentu yang sembuh atau menyelesaikan pengobatan penuh dari *Directly Observed Treatment Short* (DOTS). Data dikumpulkan Kemenkes tiap tahun.

- **Persentase balita dengan demam yang diobati anti-malaria yang tepat**

Merupakan persentase anak usia 0-59 bulan yang menderita sakit dengan demam dua minggu sebelum survei dan yang menerima obat anti malaria selama survei dilakukan. Data diperoleh melalui Riskesdas. Data pengobatan yang tepat pada Riskesdas adalah pengobatan yang efektif yaitu harus memenuhi tiga kategori yaitu jenis obat yang diperoleh adalah ACT,

obat tersebut diperoleh penderita maksimum 24 jam setelah sakit, dan dosis obat diperoleh untuk 3 hari dan diminum seluruhnya.

- **Persentase penduduk di daerah endemik-malaria tidur di bawah kelambu anti nyamuk**

Merupakan persentase orang yang tidur di bawah kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei, dibedakan berdasarkan usia. Data diperoleh dari Riskesdas mengenai balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida.

- **Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi**

Di daerah endemik malaria, semua orang dengan demam yang mencari perawatan medis harus menjalani tes diagnostik sebelum pengobatan untuk malaria. Alat tes diagnostik yang cepat dan terjangkau memungkinkan diagnosa definitif untuk semua kasus malaria. Data tersedia oleh Kemenkes setiap tahunnya.

- **Persentase kasus malaria yang menerima terapi antimalaria lini pertama sesuai dengan kebijakan nasional**

Merupakan persentase kasus positif malaria yang diobati dengan obat yang tepat. Lini pertama program pengobatan malaria adalah dengan *Artemisin Combination Therapy* (ACT) yang dikumpulkan melalui Riskesdas.

- **Persentase wanita hamil yang menerima malaria IPT (*In Pregnant Treatment*) di daerah endemik**

Merupakan malaria pada kehamilan mempengaruhi ibu dan janin. Pengobatan pencegahan intermiten pada kehamilan (IPT) secara efektif dapat mencegah malaria pada ibu hamil; semua wanita hamil di daerah dengan transmisi malaria yang rendah sampai tinggi harus menerima IPT. Indikator ini tidak tersedia di Indonesia.

- **Persentase wanita yang melakukan *screening* /pemeriksaan kanker serviks**

Persentase perempuan yang menerima skrining untuk kanker serviks. Kerangka Monitoring Global di WHO untuk PTM merekomendasikan indikator ini. Namun, ketersediaan data untuk indikator ini belum dicakup oleh Kemenkes secara lengkap.

- **Persentase penderita hipertensi yang telah didiagnosa dan menerima pengobatan**

Kerangka Monitoring Global WHO untuk PTM menghimbau pengurangan sebesar 25 persen pada hipertensi (tekanan darah yang meningkat); untuk mencapai tujuan ini sebaiknya dilakukan pelacakan jumlah orang yang didiagnosa dengan hipertensi dan orang yang menerima pengobatan. Prevalensi hipertensi diperoleh melalui Riskesdas dengan pengukuran tekanan darah pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Prevalensi didapat melalui jawaban pernah atau tidak pernah didiagnosis tenaga kesehatan dan apakah sedang meminum obat hipertensi sendiri.

- **Angka Kesembuhan *Neglected Tropical Disease*/NTD (Penyakit Tropis Terabaikan)**

Sangat penting bagi miliaran orang yang terkena penyakit tropis terabaikan (NTD) setiap tahun untuk mendapatkan perawatan yang memadai untuk menyembuhkan penyakit ini. Cara yang pasti untuk mengukur angka ini masih perlu didefinisikan. Indikator angka kesembuhan belum tersedia, data yang dikumpulkan Kemenkes untuk menggambarkan keadaan mengenai penyakit ini adalah jumlah penderita kusta PB, kusta MB, dan filariasis.

- **Masa tunggu untuk operasi elektif**

Indikator ini mengukur berapa lama pasien harus menunggu untuk mendapatkan prosedur elektif. Waktu tunggu membantu mengukur ketersediaan layanan kesehatan, operasi katarak adalah salah satu contoh prosedur elektif yang bisa diukur oleh indikator ini. Indikator ini dapat diperoleh dari Kemenkes melalui data Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap fasilitas kesehatan, berupa standar dan realisasinya.

- **Persentase penerima manfaat dari rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan klinik yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan kebersihan yang memadai**

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, fasilitas sanitasi (yang dibedakan berdasarkan gender), dan fasilitas cuci tangan untuk pasien di fasilitas kesehatan, dengan menggunakan definisi dari WHO-UNICEF JMP. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga dilakukan pendekatan dengan menggunakan informasi mengenai ketersediaan air minum, sanitasi, dan kebersihan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan. Data yang tersedia dari Risfaskes adalah puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan yang memiliki pengelolaan limbah (SPAL).

- **Pengeluaran pemerintah dan swasta untuk penelitian dan pengembangan pada kesehatan (% PNB/Produk Nasional Bruto)**

Indikator ini menelusuri mobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta untuk litbang pada kesehatan sebagai bagian dari PNB. Pengeluaran pemerintah yang rutin didata tidak menyajikan pengeluaran litbang terpisah sehingga indikator ini tidak tersedia datanya.

- **Prevalensi usia terstandar (terhadap distribusi usia populasi dunia) penderita diabetes (sebaiknya berdasarkan HbA1c), hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan penyakit pernapasan kronis**

Selain melacak tingkat kematian dari penyakit tidak menular, pelacakan tingkat prevalensi sangat penting untuk dilakukan. Saat orang yang menderita PTM menerima perlakuan yang lebih baik dan hidup lebih lama, tingkat kematian mungkin tidak lagi menjadi ukuran yang memadai untuk menangani penyakit ini. Indikator ini akan membantu menilai pengelolaan jangka panjang dari kondisi ini.

Penyakit tidak menular (PTM) menurut Riskesdas merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Data PTM dalam Riskesdas 2013 meliputi, asma, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), kanker, DM, hipertiroid, hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kronis, batu ginjal, penyakit sendi/rematik. Data penyakit asma/mengi/bengek dan kanker diambil dari responden semua umur, PPOK dari umur ≥ 30 tahun, DM, hipertiroid, hipertensi/tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit sendi/rematik/encok dan stroke ditanyakan pada responden umur ≥ 15 tahun.

Data prevalensi penyakit ditentukan berdasarkan hasil wawancara berupa gabungan kasus penyakit yang pernah didiagnosis dokter/tenaga kesehatan atau kasus yang mempunyai riwayat gejala PTM (berdasarkan diagnosis atau gejala). Prevalensi kanker, gagal ginjal kronis, dan batu ginjal ditentukan berdasarkan informasi pernah didiagnosis dokter saja. Untuk hipertensi, selain berdasarkan hasil wawancara, prevalensi juga disampaikan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah.

Data yang tersedia dapat didisagregasi sampai level kota-desa dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

- **Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah**

Indikator ini mengukur akses air dan sabun di fasilitas cuci tangan di rumah, menggunakan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator dapat diperoleh dari SDKI. Informasi yang dikumpulkan adalah ketersediaan tempat khusus untuk mencuci tangan dalam rumahtangga dan penggunaan air serta bahan pembersih untuk mencuci tangan, menurut wilayah kota-desa, dan kekayaan.

Target 3C. Melaksanakan kebijakan untuk mendorong aktivitas fisik dan pola pangan yang sehat, mengurangi perilaku tidak sehat seperti penggunaan tembakau sebanyak 30 persen dan penggunaan alkohol yang berbahaya sebanyak 20 persen

31. Skor keragaman bahan makanan di rumah tangga (*Household Dietary Diversity Score*)

Konsep dan Definisi

Pola makan yang sehat sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Indikator ini mengukur sebuah gambaran pola makan rumah tangga, dan dapat memberi kesimpulan tentang kemampuan rumah tangga untuk membeli berbagai makanan. Keragaman pola makan seseorang merupakan indikator yang baik dari ketersediaan mikronutrien (vitamin dan mineral) dan porsi buah dan sayuran.

Disagregasi

Berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga dan jenis kelamin.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini memerlukan survei rumah tangga yang rinci yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pada beberapa kasus. Beberapa indikator alternatif, yaitu:

- Fraksi kalori dari tambahan lemak jenuh dan gula (%)
- Konsumsi daging per kapita (kg per kapita)
- Kontribusi jumlah kalori dari selain makanan pokok (juga disebutkan pada target 2A)
- Skor konsumsi makanan

Ketersediaan di Indonesia

Penghitungan skor keragaman pola makan rumahtangga belum dilakukan di Indonesia, sehingga indikator proksi yang dapat digunakan pada target ini adalah skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai tingkat keanekaragaman dan keseimbangan pangan. Pola pangan harapan atau *desireable dietary pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Skor PPH ideal adalah 100. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Penilaian kualitas konsumsi pangan melalui penghitungan skor PPH ini digunakan untuk rumah tangga dan daerah dengan menggunakan data ketersediaan pangan neraca bahan makanan (NBM) dan konsumsi rumahtangga Susenas. Analisis skor PPH bisa dilakukan sampai level penyajian kabupaten/kota dengan menghasilkan skor total dan skor 9 jenis kelompok bahan pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, lemak dan minyak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lainnya.

32. Persentase penduduk dengan kelebihan berat badan dan obesitas

Konsep dan Definisi

Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk suatu negara yang kelebihan berat badan atau obesitas. IMT atau indeks massa tubuh (*body mass index*) adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan yang dihitung dengan membagi berat badan seseorang dengan tinggi badan lalu dikuadratkan. Menurut WHO, definisi kelebihan berat badan untuk orang dewasa yaitu memiliki IMT lebih besar dari atau sama dengan 25. IMT yang lebih besar dari atau sama dengan 30 mendefinisikan obesitas. Kegemukan pada anak didefinisikan oleh *Child Growth Standards* WHO sebagai persentase anak usia 0-5 yang berat terhadap tinggi di atas median +2 standar deviasi *Child Growth Standards* WHO. Prevalensi kelebihan berat badan pada remaja adalah persentase remaja yang memiliki standar deviasi di atas IMT berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Komentar dan keterbatasan

IMT adalah suatu ukuran yang tidak sempurna, karena mengabaikan proporsi relatif tulang, otot dan lemak dalam tubuh, dan mengabaikan ukuran pinggang, yang merupakan indikator tingkat obesitas yang jelas.

Ketersediaan di Indonesia

Menurut Riskesdas, gemuk atau berat badan lebih memiliki IMT ≥ 25 dan kurang dari 27 sedangkan obesitas atau sangat gemuk memiliki IMT ≥ 27 . Pengumpulan data dilakukan melalui Riskesdas, tersedia sampai level kota-desa dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik penderita seperti umur (anak 5-12 th, remaja 13-15th, 16-18 th, dan >18 th), jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan.

33. Penggunaan produk tembakau saat ini (tingkat standarisasi umur)

Konsep dan Definisi

Penggunaan tembakau merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah di banyak negara maju, dan merupakan masalah yang berkembang dan menjadi penyumbang beban penyakit di negara berkembang. Indikator ini mengukur prevalensi merokok saat ini (harian, non-harian, atau sesekali) dari setiap produk tembakau, termasuk rokok, cerutu, pipa, dan lain-lain, untuk orang dewasa berusia lebih dari dan sama dengan 15 tahun. Indikator ini dikembangkan untuk memenuhi rekomendasi WHO untuk lebih menggambarkan penggunaan produk tembakau tanpa asap (termasuk mengunyah, tembakau, dan rokok elektronik). Tingkat prevalensi usia-standar penggunaan tembakau (d disesuaikan dengan metode regresi WHO) memungkinkan untuk perbandingan lintas negara dan lintas periode waktu untuk menentukan tren.

Disagregasi

Menurut umur dan jenis kelamin.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Informasi perilaku penggunaan tembakau dalam Riskesdas tahun 2013 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perilaku merokok dan perilaku penggunaan tembakau dengan mengunyah. Data tersedia sampai level kota-desa dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Selain itu juga dapat didisagregasi menurut kebiasaan merokok dan mengunyah tembakau (setiap hari dan kadang-kadang).

34. Penggunaan alkohol yang berbahaya

Konsep dan Definisi

WHO merekomendasikan pengurangan penggunaan berbahaya dari alkohol sebagai bagian dari Kerangka Monitoring Global untuk PTM. Dua dimensi yang direkomendasikan WHO terkait penggunaan alkohol berlebihan/penyalahgunaan alkohol adalah jumlah konsumsi alkohol (dicatat dan tidak tercatat) dalam satu tahun kalender alkohol murni dalam liter (untuk menilai konsumsi jangka panjang), dan prevalensi usia-standar kebiasaan minum alkohol berat atau *heavy episodic drinking* (HED) di kalangan remaja dan orang dewasa. HED didefinisikan sebagai konsumsi 60 atau lebih gram alkohol pada satu kesempatan setidaknya sekali dalam 30 hari terakhir.

Indikator ini memberikan informasi mengenai pola konsumsi alkohol di negara tertentu, dan menyoroti populasi yang memiliki risiko lebih tinggi akibat alkohol, seperti keracunan alkohol dan kecelakaan mobil, serta komplikasi kesehatan kronis, seperti kanker hati dan hipertensi.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Komentar dan keterbatasan

Kemungkinan lain Indikator penggunaan alkohol berlebihan/penyalahgunaan alkohol adalah dengan menggunakan *Alcohol Use Disorders Identification Test* (AUDIT) yang juga mendiagnosis penggunaan alkohol yang berlebihan baik jangka pendek dan jangka panjang.

Ketersediaan di Indonesia

Pengumpulan data mengenai kebiasaan meminum alkohol dilakukan pada Riskesdas 2007. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah minum minuman beralkohol dalam 12 bulan terakhir. Untuk penduduk yang menjawab "ya" ditanyakan dalam 1 bulan terakhir, termasuk frekuensi, jenis minuman dan rata-rata satuan minuman standar. Namun, Riskesdas tahun 2010 dan 2013 tidak mempublikasikan hasil indikator ini.

Indikator tambahan:

- **Prevalensi ketidakaktifan fisik**

Merupakan persentase orang dengan aktifitas fisik yang kurang dari rekomendasi WHO. Data dikumpulkan oleh Riskesdas mengenai frekuensi beraktivitas fisik dalam seminggu terakhir untuk penduduk umur >10 tahun. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang secara terus menerus melakukan kegiatan fisik minimal 10 menit sampai meningkatnya denyut nadi dan napas lebih cepat dari biasanya (misalnya menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dan lain-lain) selama minimal tiga hari dalam satu minggu dan total waktu beraktivitas ≥ 1500 *MET minute*. *MET minute* aktivitas fisik berat adalah lamanya waktu (menit) melakukan aktivitas dalam satu minggu dikalikan bobot sebesar 8 kalori. Aktivitas fisik sedang apabila melakukan aktivitas fisik sedang (menyapu, mengepel, dan lain-lain) minimal lima hari atau lebih dengan total lamanya beraktivitas 150 menit dalam satu minggu. Selain dari dua kondisi tersebut termasuk dalam aktivitas fisik ringan. Dalam Riskesdas 2013 ini, kriteria aktivitas fisik aktif adalah individu yang melakukan aktivitas fisik berat atau sedang atau keduanya, sedangkan kriteria kurang aktif adalah individu yang tidak melakukan aktivitas fisik sedang ataupun berat. Kriteria aktivitas kurang aktif yang digunakan pada indikator ini. Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan juga mengumpulkan data ini.

- **Fraksi kalori dari lemak jenuh dan gula tambahan (%)**

Persen dari asupan kalori yang berasal dari lemak jenuh dan gula tambahan, sebuah indikator pola makan yang sehat. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan data Susenas tetapi BPS belum menganalisis indikator ini.

- **Rata-rata usia terstandar penduduk dengan konsumsi garam (natrium klorida) per hari dalam gram pada orang berusia 18 tahun keatas**

Merupakan jumlah garam yang dikonsumsi per hari. Konsumsi garam berlebihan dapat mendorong hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya. Jumlah konsumsi garam dapat diperoleh dengan mengolah data Susenas dan BPS juga belum menganalisis indikator ini.

- **Prevalensi orang (yang berusia 18 tahun) yang mengkonsumsi kurang dari lima porsi (400 gram) buah dan sayur per hari**

Konsumsi buah-buahan dan sayuran sangat penting, baik untuk diet sehat atau untuk menjaga berat badan yang sehat; Indikator ini melacak persentase orang yang tidak makan buah-buahan dan sayuran sesuai jumlah yang disarankan. Riskesdas menghitung dengan menggunakan jumlah hari konsumsi dalam seminggu dan jumlah porsi rata-rata dalam sehari. Penduduk dikategorikan 'cukup' mengonsumsi sayur dan/atau buah apabila makan sayur dan/atau buah minimal 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. Dikategorikan 'kurang' apabila konsumsi sayur dan/atau buah kurang dari ketentuan di atas. Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan juga mengumpulkan data ini.

- **Persen perubahan konsumsi daging merah per kapita tahun dasar 2015**

Konsumsi yang berlebihan terhadap daging merah merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular; Indikator ini melacak perubahan konsumsi daging merah per kapita, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan di beberapa negara. Indikator ini dapat dihitung melalui Susenas tetapi belum dilakukan.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua

Target 4A. Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas

35. Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase anak-anak kelompok usia 36-59 bulan yang terdaftar dalam program anak usia dini. Program didefinisikan cukup luas mulai dari perawatan/pengasuhan privat atau berkelompok sampai program pra sekolah yang formal.

Indikator ini penting untuk mengukur perkembangan anak. Keikutsertaan pada pendidikan pra sekolah yang berkualitas tinggi setidaknya satu tahun memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan positif pada perkembangan anak. Dalam jangka pendek, keterampilan kognitif awal, seperti keterampilan membaca dan matematika, secara positif dipengaruhi oleh pendidikan anak usia dini. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, akses ke kualitas pendidikan prasekolah meningkatkan proporsi siswa yang masuk sekolah dasar tepat waktu. Tingginya kualitas prasekolah dapat menghasilkan manfaat seumur hidup bagi masyarakat, dengan efek positif diamati pada akhir tahun sekolah, akhir sekolah menengah, berkurangnya kejahatan, mengurangi kehamilan dini, dan meningkatkan pendapatan. Hasil ini mencakup program skala kecil dan skala besar, dan bertanggung jawab atas rasio manfaat dan biaya untuk prasekolah (6 tahun ke atas, di negara-negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah). Pendidikan anak usia dini bermanfaat bagi semua anak, tidak peduli latar belakang ekonomi mereka, tetapi seperti banyak layanan pengembangan anak usia dini lainnya, orang-orang dari latar belakang yang kurang beruntung memperoleh manfaat yang paling banyak.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin, lokasi, dan pendapatan rumah tangga.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini kurang membantu dalam mengukur kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini. Kualitas kerangka standar (aman, akses terhadap air bersih, ukuran kelompok kecil, dan lain-lain), (keterampilan instruksional dan interaktif dari guru atau pengasuh) dan proses penting bagi pembelajaran dan perkembangan anak, tetapi aspek tersebut jauh lebih sulit untuk diukur.

Ketersediaan di Indonesia

Di Indonesia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah untuk anak usia 0-6 tahun karena usia SD adalah 7-12 tahun. Indikator ini diperoleh melalui Susenas untuk anggota rumah tangga usia 0-6 tahun berupa pertanyaan pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah yang dimaksud adalah TK/BA/RA, kelompok bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/Posyandu, dan lembaga lainnya. Data bisa didisagregasi berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, wilayah, dan pendapatan rumah tangga.

36. Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI)

Konsep dan Definisi

Potensi perkembangan anak usia dini diukur sebagai indeks, saat ini diwakili dengan *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) yang menilai anak-anak berusia 36-59 bulan dalam empat domain, yaitu bahasa/melek huruf, berhitung, fisik, sosial-emosional, dan pengembangan kognitif. Masing-masing domain diukur dengan instrumen berdasarkan pengamatan *real-time*. Survei MICS menghitung skor Indeks Keseluruhan sebagai persentase anak usia 36-59 bulan yang setidaknya memiliki tiga dari empat domain.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin dan umur.

Komentar dan keterbatasan

Ukuran lain tumbuh kembang anak yang dilaporkan orangtua atau pengasuh telah atau sedang dalam tahap perkembangan, termasuk Instrumen perkembangan awal dan indeks kapabilitas manusia awal, yang menggabungkan item yang mewakili masing-masing domain dan sedang digunakan di negara berpendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Komplemen penting bentuk pengukuran ini adalah penilaian yang dapat menangkap pembangunan di daerah tertentu dari waktu ke waktu (misalnya perkembangan linguistik atau keterampilan emosional).

Ketersediaan di Indonesia

Indeks ini merupakan indeks global yang menggunakan data beberapa negara di dunia. Data diperoleh melalui MICS putaran ke empat pada tahun 2011 karena pada putaran ini ditambahkan item kuesioner pendidikan baru untuk menghitung indeks tersebut. BPS bekerja sama dengan UNICEF mengumpulkan data di enam kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya, Biak Numfor (Papua), Kaimana, Manokwari dan Sorong (Papua Barat).

Indikator tambahan:

- **Persentase balita yang memperoleh pengasuhan yang responsif dan stimulatif di lingkungan yang aman**

Indikator ini mengukur persentase anak-anak di bawah 5 tahun yang terlibat dalam empat atau lebih kegiatan dengan didampingi orang dewasa untuk mendorong pembelajaran dan kesiapan sekolah dalam 3 hari terakhir. Indikator ini diperoleh melalui MICS. Hasil MICS terbatas pada cakupan wilayah, karena hanya dilakukan pada sebagian kecil wilayah di Indonesia. Informasi lain yang berkaitan dengan hal ini dan dikumpulkan oleh BPS secara rutin sampai level kabupaten/kota adalah kriteria ketelantaran anak balita. Variabel yang menentukan derajat ketelantaran balita adalah: tidak pernah diberi ASI; tidak mempunyai bapak/ibu kandung lagi; makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu; makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) dimana nabati < 4 kali, hewani ≤ 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu; Ibu balita yang bertanggung jawab terhadap anak ini bekerja selama seminggu terakhir; bila balita sakit tidak diobati; dan anak ditinggal/diasuh oleh orang lain (tetangga, lainnya atau ditinggal sendiri) selama seminggu terakhir.

- **Persentase siswa sekolah yang terdaftar program pengembangan usia dini yang menyediakan air minum, sanitasi, dan jasa kebersihan yang memadai**

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, fasilitas sanitasi yang dipisahkan menurut jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan di sekolah-sekolah, dengan menggunakan definisi WHO-UNICEF JMP. Belum adanya data yang memadai mengenai akses air minum dan sanitasi berbasis sekolah membuat indikator masih sulit untuk diukur.

Target 4B. Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol

37. Angka kelulusan Pendidikan Dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang masuk kelas 1 dan telah menamatkan sekolah dasar. Penyelesaian pendidikan dasar diukur dengan Angka Masukan Kasar terhadap Kelas Akhir pendidikan dasar yaitu angka total pendaftar baru di kelas akhir pendidikan dasar (berdasarkan ISCED97 atau *International Standard Classification of Education*), tanpa memandang umur, yang dinyatakan dengan persentase penduduk pada usia yang sesuai dengan kelas terakhir di sekolah dasar (*Gross Intake Ratio to Last Grade of Primary School*). Pendidikan dasar didefinisikan oleh ISCED97 sebagai program yang didesain pada unit atau proyek dasar yang diberikan pada siswa sebagai sebuah pendidikan dasar dalam membaca, menulis dan matematika bersama dengan pemahaman dasar mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan musik.

Rasio Masukan Kasar di kelas terakhir SD dari laporan utama pada akses utama ke kelas terakhir saat ini, berasal dari tahun-tahun sekolah sebelumnya dan kebijakan pendidikan masa lalu. Indikator ini adalah ukuran siswa pertama kali menyelesaikan pendidikan dasar, karena tidak termasuk siswa mengulang kelas terakhir. Tingginya Rasio Masukan Kasar kelas terakhir menunjukkan tingginya penyelesaian pendidikan dasar. Karena perhitungan ini mencakup semua pendaftar baru untuk kelas terakhir (tanpa memandang usia), Rasio Masukan Kasar dapat melebihi 100 persen, karena memasukkan murid yang di atas atau di bawah umur yang memasuki kelas terakhir sekolah dasar untuk pertama kalinya.

Disagregasi

Sangat penting untuk memisahkan data untuk indikator ini menurut jenis kelamin, pendapatan, disabilitas, wilayah, dan kuintil pendapatan rumah tangga, dengan perhatian khusus pada anak-anak di daerah-daerah konflik, karena anak-anak di daerah-daerah tersebut berada pada risiko terbesar putus dari sistem pendidikan.

Komentar dan keterbatasan

Karena tingkat kelulusan pendidikan dasar ini biasanya tertinggal daripada indikator utama, akan menjadi penting untuk menemukan cara untuk memperkuat pelaporan indikator yang rutin dan tepat waktu untuk mengukur kemajuan.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator ini diperoleh dari Kemendiknas. Data hasil registrasi ini dapat dirinci hanya berdasarkan jenis kelamin, tidak dapat berdasarkan pendapatan, disabilitas, dan kuintil pendapatan rumah tangga.

38. [Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan matematika dasar pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel)]

Konsep dan Definisi

Indikator ini dirancang untuk mengukur proporsi anak-anak yang cakap dalam membaca dan memahami teks dalam bahasa utama mereka, serta memahami berbagai instruksi yang ada, seperti, menghitung dan memahami operasi dan konsep matematika inti, sebagai proporsi total anak-anak yang berada pada siklus akhir pendidikan dasar di negara tersebut. Kecakapan ini perlu disajikan pada level nasional, namun harus dapat mencakup kemampuan membaca, merumuskan, memahami dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka. Indikator ini merupakan indikator agregat baru yang diusulkan untuk dapat menangkap kecakapan dalam berbahasa sebagai bagian dalam pembelajaran kemampuan matematika dasar yang memiliki hubungan yang kuat dalam pendidikan akademik berikutnya.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin.

Komentar dan keterbatasan

Sejak tahun 2005, lebih dari 60 negara berkembang telah menggunakan beberapa ukuran membaca, atau telah berpartisipasi dalam kemampuan memahami bacaan pada penilaian internasional. Tidak ada standar yang diakui secara internasional untuk mendefinisikan "kemampuan membaca" terutama karena perbedaan bahasa, desain kurikulum, dan pendekatan pedagogis. Namun, disarankan bahwa setiap negara mengadopsi dan/atau mendefinisikan set inti standar yang dapat dinilai baik melalui penilaian berbasis rumah tangga atau berbasis sekolah. Beberapa negara memiliki standar nasional keterampilan berhitung dasar yang diidentifikasi dalam kerangka kurikulum nasional. Disarankan agar setiap negara mengadopsi dan/ atau mendefinisikan standar keterampilan berhitung, sementara yang relevan secara lokal, dirujuk dalam beberapa tolok ukur internasional. Kebutuhan untuk memiliki ukuran keterampilan membaca dan matematika telah ditekankan oleh berbagai inisiatif global termasuk Kelompok Kerja Khusus Pembentukan Matrik Pembelajaran (yang merekomendasikan keterampilan tersebut diukur pada kelas 3). Sebaiknya keterampilan tersebut diukur pada siklus akhir pendidikan dasar di negara tersebut untuk menangkap variasi struktur sistem pendidikan dalam dan antar negara. Indikator ini seharusnya tidak dibatasi untuk pengukuran membaca dan matematika; karena banyak negara mengembangkan indikator sebanding untuk domain pembelajaran lainnya (kesejahteraan fisik, keterampilan sosial dan emosional, budaya dan seni, literasi dan komunikasi, pendekatan dan kognisi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran), disarankan agar indikator ini dapat dilacak dalam ukuran gabungan pada siklus akhir pendidikan dasar. SDSN mendukung upaya berkelanjutan dari Kelompok Kerja Khusus Pembentukan Matrik Pembelajaran untuk mengembangkan indikator yang dapat menelusuri pengukuran di berbagai domain pembelajaran secara global. Kami juga mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung oleh Kelompok Kerja Khusus, UNESCO, UNICEF dan organisasi lainnya dalam mengembangkan tolak ukur internasional untuk indikator ini, dengan mempertimbangkan variasi sistem pendidikan dan konteks antar negara.

Ketersediaan di Indonesia

Lembaga-lembaga internasional sedang membahas domain dan tolak ukur internasional

untuk indikator ini. Di dalam negeri, hal ini menjadi tantangan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengukur kualitas pendidikan dasar secara nasional baik berbasis sekolah maupun rumahtangga dan mendefinisikan standar nasional untuk keterampilan dasar tersebut.

39. Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan kelas akhir pendidikan sekolah dasar. Dihitung dengan membagi jumlah siswa di kelas akhir sekolah dasar yang telah dikurangi dengan siswa tinggal kelas, dengan jumlah total siswa usia lulus resmi. Indikator ini bertujuan untuk menangkap angka putus sekolah selama sekolah dasar dan selama transisi sekolah dasar ke sekolah menengah dengan menggunakan pembagiannya yaitu jumlah total siswa dengan usia lulus resmi.

Angka kelulusan sekolah menengah penting untuk diukur karena angka putus sekolah tertinggi berada pada kelas menengah pertama. Sebab pada usia-usia tersebut, biaya aktual dan biaya pendidikan menjadi lebih tinggi sementara sistem pendidikan masih berjuang memperbaiki kualitas pendidikan. Serta terdapat perbedaan gender dimana keinginan anak perempuan untuk sekolah sangat ditentukan oleh pendapatan dan biaya pendidikan yang berbeda perlakuannya dengan anak laki-laki, dan masih banyak rumah tangga yang tidak mau berinvestasi untuk pendidikan anak perempuan disebabkan keuntungan (*return*) ekonomi yang tidak akan setara dan tidak langsung. Selain itu, paradigma masyarakat masih terpusat pada peran anak perempuan yang hanya akan dianggap sebagai istri dan ibu.

Disagregasi

Penting untuk memilah indikator ini menurut jenis kelamin, pendapatan, disabilitas, wilayah, dan dipisahkan untuk anak-anak di wilayah konflik karena anak-anak di wilayah tersebut beresiko besar mengalami putus sekolah.

Komentar dan keterbatasan

Angka kelulusan sekolah menengah jauh lebih sulit untuk dibandingkan antar negara karena struktur sekolah yang sangat bervariasi, dan adanya perbedaan kelompok umur. Angka kelulusan sekolah menengah hanya dapat dihitung pada level nasional dengan mengacu pada jumlah tahun sekolah di negara tersebut. Angka kelulusan sekolah menengah tidak dengan mudah dibandingkan antar negara.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator ini diperoleh dari Kemendiknas. Data hasil registrasi ini dapat dirinci hanya berdasarkan jenis kelamin, tidak dapat berdasarkan pendapatan, disabilitas, dan kuintil pendapatan rumahtangga.

40. [Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah menengah pertama]

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki usia 14 tahun yang pandai dalam hasil belajar, setidaknya dalam membaca dan matematika. Kecakapan ini perlu didefinisikan melalui standar level nasional, namun harus mencakup kemampuan membaca,

merumuskan, memahami, dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka, dan mampu memahami konsep, alasan dan penyelesaian masalah rumit matematika lanjutan.

Pengukuran matematika lebih mudah untuk dibandingkan antar negara, setiap negara perlu mengidentifikasi paket standar kecakapan ini. Upaya serius diperlukan menyejajarkan standar nasional sehingga dapat dibandingkan dengan standar internasional. Indikator ini juga dianjurkan diukur melalui penilaian berbasis sekolah atau rumah tangga setiap tahun untuk menelusuri progres sistem pendidikan. Bahaya fundamental indikator berbasis kemampuan yaitu hanya dapat menangkap bagian kecil kompetensi-kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, penilaian pada subset tersebut sering kali hanya terfokus pada subset itu saja sehingga mengabaikan kompetensi lain yang jauh lebih luas. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dasar yang seharusnya diperoleh siswa pada siklus akhir sekolah menengah pertama. Indikator lebih luas perlu dirancang untuk memastikan kompetensi-kompetensi lainnya tidak lagi diabaikan.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

Standar kecakapan tidak muncul begitu saja di suatu negara, akan lebih baik untuk mengadopsi kumpulan inti standar yang didesain berdasarkan referensi standar global. Kelompok Kerja Khusus Pembentukan Matrik pembelajaran sangat direkomendasikan untuk mengukur kecakapan matematika pada akhir sekolah menengah pertama. SDSN mendukung usaha Kelompok kerja Khusus Pembentukan Matrik Pembelajaran dalam mengembangkan indikator yang dapat menelusuri area ini secara global. Sama halnya dengan usaha yang dilakukan oleh Kelompok kerja Khusus, UNESCO, UNICEF, dan organisasi lainnya dalam mengembangkan patokan untuk indikator-indikator tersebut, menelaah berbagai variasi sistem dan konteks pendidikan antar negara.

Ketersediaan di Indonesia

Lembaga-lembaga internasional sedang membahas domain dan tolak ukur internasional untuk indikator ini. Di dalam negeri, hal ini merupakan tantangan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengukur kualitas pendidikan menengah secara nasional baik berbasis sekolah maupun rumah tangga dan mendefinisikan standar nasional untuk keterampilan dasar tersebut.

Indikator tambahan:

- **[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kewarganegaraan global dan pembangunan berkesinambungan (tolak ukur nasional untuk dikembangkan) pada akhir sekolah menengah pertama]**

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan bagi mereka untuk menjadi "warga dunia" produktif, mengakui bahwa di luar karya akademis dasar, ada nilai-nilai dan keterampilan yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh menjadi tanggung jawab sosial, emosional matang, dan anggota masyarakat yang produktif. Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan dapat menjadi sumber data untuk membangun indikator ini.

- **[Indikator jumlah tenaga guru/pengajar yang berkualitas]**

Indikator ini menggambarkan ketersediaan guru yang berkualitas. Setelah indikator ditentukan, indikator ini dapat disajikan oleh Balitbang Kemendiknas dengan mengacu pada ketentuan internasional tersebut.

Target 4C. Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif

41. Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur total pendaftaran di pendidikan tinggi tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk kelompok usia lima tahun sebagai lanjutan dari tamat sekolah menengah. Pendidikan tinggi didefinisikan sebagai Klasifikasi Baku Pendidikan Internasional (1997) tingkat 5 dan 6.

Angka partisipasi perguruan tinggi adalah indikasi dari kualitas angkatan kerja di negara ini, dan kesenjangan yang besar antara angka partisipasi perguruan tinggi dan tingkat pengangguran mengindikasikan apakah ketidakmampuan ekonomi dalam menyerap lulusan yang terlatih, atau kelayakan kerja para lulusan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang disampaikan melalui sistem perguruan tinggi dengan keterampilan yang dituntut oleh pasar.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin dan bidang studi (untuk melacak perempuan di bidang ilmu pengetahuan, matematika, teknik, ilmu dan teknologi).

Komentar dan keterbatasan

Angka partisipasi perguruan tinggi bukan prediktor tingkat pengangguran kaum muda.

Ketersediaan di Indonesia

Angka Partisipasi Perguruan Tinggi dapat diperoleh melalui Susenas dan Sakernas. Namun, data yang lebih rinci diperoleh melalui Sakernas karena dapat memberi gambaran partisipasi perguruan tinggi berdasarkan jenis kelamin dan jurusan pendidikan/bidang studi.

Indikator tambahan:

- **[Persentase remaja (usia 15-19 tahun) dengan akses terhadap program sekolah-ke-kejuruan]**

Indikator ini mengukur persentase remaja yang mendapat tawaran program yang memungkinkan mereka untuk transisi dari sekolah ke kerja dan pekerjaan, baik melalui keterampilan kerja, atau program pelatihan magang. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu persentase remaja yang pernah mendapatkan pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat. Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja atau berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh responden. Data juga dapat memberi informasi mengenai jenis pelatihan kerja utama.

- **Persentase orang dewasa muda (usia 18-24 tahun) dengan akses program pembelajaran**

Indikator ini mengukur persentase wanita dewasa muda dan laki-laki yang mendaftarkan diri dan belajar keterampilan baru atau kursus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Indikator ini terdapat pada Susenas modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Keterangan yang dikumpulkan adalah ART berumur 5 tahun ke atas yang telah selesai dan sedang mengikuti kursus selama 2 tahun terakhir. Data dapat dirinci menurut jenis kursus (bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, dan lain-lain), kursus utama, dan jangka waktu kursus.

- **Proporsi orang dewasa muda (usia 18-24 tahun) yang melek huruf**

Indikator ini mengukur proporsi wanita dewasa muda dan laki-laki yang melek huruf sebagai proporsi dari total populasi dalam kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat diperoleh melalui Susenas, selain itu juga dari Sensus Penduduk (SP), SUPAS, dan Sakernas. Indikator ini biasanya disajikan menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan

Target 5A. Mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak

42. Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir

Konsep dan Definisi

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* mengestimasi bahwa lebih dari 30 persen perempuan di atas 15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran. Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan *time lag* 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan resiko kekerasan dari waktu ke waktu dibanding dengan pengukuran menggunakan *time lag* seumur hidup.

Disagregasi

Menurut frekuensi, usia, status perkawinan, perkotaan/pedesaan, jenis dan tingkat keparahan kekerasan.

Komentar dan keterbatasan

Tindakan kekerasan oleh pasangan intim di negara-negara berpenghasilan tinggi perlu dihitung ulang agar sesuai dengan data yang tersedia secara global.

Ketersediaan di Indonesia

Saat ini, data prevalensi kekerasan yang rutin dikumpulkan oleh BPS menggunakan pendekatan persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Pendekatan tersebut kurang rinci sehingga belum tepat untuk indikator 40 ini. Survei *ad-hoc* yang pernah dilakukan untuk melihat gambaran kekerasan adalah survei berbasis rumah tangga yang terintegrasi dengan Susenas yang disebut Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian PPA. Responden adalah semua perempuan yang berusia 18 tahun ke atas atau perempuan berusia di bawah 18 tahun yang pernah menikah. Hasil survei dapat menyajikan data secara nasional maupun pada level provinsi. Kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat dirinci berdasarkan usia, status perkawinan, wilayah kota/desa, dan jenis tindak kekerasan yang dialami (kekerasan penghinaan, penganiayaan, penelantaran, seksual, dan lainnya).

43. Persentase kasus kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, diselidiki dan dijatuhi hukuman

Konsep dan Definisi

Kekerasan terhadap gender dan seksual terus meluas, dan sering berakhir kebal hukum. Indikator ini, direkomendasikan sebagai ukuran berdasarkan UNSCR 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan, menilai bagaimana sistem kepolisian dan proses peradilan dakam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tiga proses penting yang dapat dilakukan ketika terjadi kekerasan antara lain, pelaporan, penyelidikan, dan hukuman. Pelaporan menunjukkan kepercayaan terhadap sistem hukum, penyelidikan menunjukkan komitmen polisi/pembentukan hukum, sedangkan hukuman menunjukkan keadilan yang dapat dicapai.

Indikator ini merupakan pendekatan yang baik untuk ukuran kualitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan di negara tertentu. Untuk mengetahui apakah sistem peradilan berjalan dengan baik, beberapa aspek harus diukur yaitu kemampuan untuk memperbaiki kejahatan, apakah warga percaya dengan sistem kepolisian dan pengadilan, dan harga ganti rugi. Masing-masing dari potongan-potongan informasi memberikan gambaran penting dan fokus terhadap kelompok rentan dapat menjadi pengujian yang tepat bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin dan umur. Pada kesempatan berikutnya pemilahan akan ditinjau kembali.

Komentar dan keterbatasan

Keterbatasan yang ada mencakup kekurangan data dan inkonsistensi dalam pelaporan di berbagai negara; kurangnya kepekaan gender, kapasitas dan sumber daya polisi dan sistem peradilan, praktik dan sikap diskriminatif yang terus-menerus, dan penyelesaian kejahatan secara informal yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan tantangan utama yang sedang berlangsung.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator terkait yang dikumpulkan oleh BPS secara rutin melalui Susenas adalah persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi. Namun, indikator tersebut masih terbatas karena tidak memberi informasi apakah kasus tersebut ditindaklanjuti dan diputuskan. Data dapat dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

44. Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur prevalensi pernikahan dini seperti yang diterangkan oleh UNICEF. Pernikahan dini merupakan pelanggaran HAM dan dapat menimbulkan kerusakan seumur hidup. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah cepat banyak yang meninggalkan pendidikan formal dan sering mengalami kehamilan berisiko tinggi. Pengantin perempuannya juga berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi dan pemisahan oleh keluarga dan teman-teman yang dapat berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan.

Disagregasi

Menurut umur, perkotaan/pedesaan, etnis, tingkat pendapatan.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat diperoleh dari Susenas maupun SDKI. Data dihitung dengan menggunakan informasi umur responden wanita pada saat perkawinan pertama. Data dapat dirinci berdasarkan umur, wilayah kota-desa, dan berdasarkan kuintil pendapatan.

45. Prevalensi praktek tradisional yang berbahaya

Konsep dan Definisi

Prevalensi praktek tradisional yang berbahaya, khususnya praktek mutilasi kelamin perempuan atau **Female Genital Mutilation** (FGM) diukur sebagai persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang merespon positif survei yang menanyakan apakah mereka telah melakukan FGM. FGM mengacu pada semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau semua kelamin eksternal perempuan atau cedera lain pada organ kelamin perempuan karena alasan non-medis. FGM belum diketahui manfaatnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Praktek ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang telah mengakar kuat dan merupakan bentuk diskriminasi ekstrim terhadap perempuan.

Disagregasi

Menurut umur, etnis dan tingkat pendapatan. WHO lebih lanjut membedakan FGM ke dalam 4 kategori yakni Tipe I, II, III dan IV.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Untuk merespon polemik mengenai sunat perempuan, pada tahun 2013 variabel tersebut dicantumkan pada SDKI. Namun variabel yang dikumpulkan adalah persentase anak perempuan umur 0-11 tahun yang pernah disunat dan persentase kategori umur ketika disunat. Kelompok umur yang ditanyakan berbeda dengan SDSN. Data bisa didisagregasi berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga, wilayah kota-desa, kuintil pendapatan, dan umur ketika disunat. Indikator tidak bisa dirinci berdasarkan empat kategori FGM.

Target 5B. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender

46. Jumlah rata-rata jam yang dihabiskan untuk pekerjaan dibayar dan tidak dibayar (beban kerja total), berdasarkan jenis kelamin

Konsep dan Definisi

Indikator ini menangkap beban kerja individu, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Berdasarkan rekomendasi Komisi Stiglitz (2007) dan indikator gender minimum yang diusulkan oleh *Inter-agency and Expert Group on Gender Statistic* (IAEG-GS).

Pengukuran pekerjaan yang tidak dibayar dapat menggambarkan kontribusi ekonomi, termasuk barang dan jasa yang diproduksi rumah tangga dan juga menggambarkan beban kerja perempuan tak dibayar yang tidak proporsional. Misalnya, di Nepal dan Kenya, ketika pekerjaan dibayar dan tak dibayar digabungkan, perempuan bekerja 1,4 jam untuk setiap 1 jam bekerja laki-lakinya. Pengukuran pekerjaan tak dibayar ini juga penting untuk menjamin keefektifan program pemberdayaan perempuan. Waktu yang dihabiskan perempuan dan anak perempuan untuk mengumpulkan air misalnya, atau pada aktivitas rumah tangga dapat dikurangi secara signifikan dengan analisis dampak gender terhadap penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, seperti listrik, jalan sekolah di pedesaan dan air.

Disagregasi

Menurut jenis kelamin dan umur

Komentar dan keterbatasan

Meskipun terdapat kemajuan yang cukup besar dalam survei selama dua dekade terakhir, namun penggunaan waktu data masih relatif terbatas. Ulasan Divisi Statistik PBB tahun 2012 mengenai statistik gender mengemukakan bahwa survei penggunaan waktu ditemukan hanya 48% dari negara responden (hampir 60 negara). Hal ini dikarenakan investasi keuangan yang cukup besar diperlukan untuk meningkatkan kapasitas teknis Kantor Statistik Nasional dan untuk merancang waktu yang digunakan pada metode survei yang berlaku universal. Contohnya dapat dilihat pada UN *Trial international Classification of Activities for Time-Use Statistics* (ICATUS).

Ketersediaan di Indonesia

Data dapat diperoleh melalui Sakernas. Informasi yang diperoleh adalah jumlah jam kerja individu dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu. Data bisa dirinci menurut jenis kelamin dan umur dengan level penyajian sampai dengan provinsi.

47. Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/ atau daerah

Konsep dan Definisi

Indikator MDGs yang dimodifikasi ini digunakan untuk mengukur rasio persentase kursi yang diduduki perempuan dan kaum minoritas (termasuk masyarakat adat) di badan legislatif (nasional, regional, lokal) dibagi berdasarkan populasi masing-masing. Kaum minoritas yang dimaksud adalah kelompok yang secara jumlah lebih sedikit dibanding jumlah seluruh penduduk di suatu negara, berada dalam posisi non-dominan, yang anggotanya - menjadi

warga negara di suatu negara, memiliki karakteristik etnis khusus, agama atau bahasa yang berbeda dari penduduk seluruh populasi serta menunjukkan secara implisit rasa solidaritas, yang ditujukan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka.

Hal ini menunjukkan sejauh mana perempuan dan kaum minoritas memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dan kaum minoritas dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan mereka di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan dan kaum minoritas.

Disagregasi

Dapat didisagregasi menurut jenis kelamin dan pendidikan.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan dan kaum minoritas masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan dan kaum minoritas di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan dan kaum minoritas.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu data jumlah anggota DPR, DPD, dan DPRD dan dari BPS (estimasi jumlah penduduk). Anggota parlemen yang dimaksud pada indikator ini adalah perempuan dan kaum minoritas. Kaum minoritas yang dimaksud dapat berdasarkan agama dan suku bangsa.

Indikator tambahan:

- **Proporsi wanita dalam dewan direksi pada perusahaan nasional ataupun internasional**

Indikator ini adalah persentase keseluruhan perempuan di dewan perusahaan nasional/perusahaan multinasional yang mengukur kesetaraan gender. Indikator yang tersedia di Indonesia adalah persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di kehidupan ekonomi dan sosial. Indikator yang diperoleh melalui Sakernas ini juga merupakan komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- **Kesenjangan gender dalam upah, menurut sektor kegiatan ekonomi**

Indikator ini menunjukkan perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan laki-laki. Indikator ini mengukur kesetaraan dan diskriminasi gender, dan harus dipisahkan berdasarkan sektor kegiatan. Indikator kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia menggunakan rasio upah yang diterima pekerja perempuan terhadap laki-laki yang diperoleh dari Sakernas dan dapat dipisahkan berdasarkan sektor lapangan usaha. Indikator ini juga merupakan komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG).

- **Persentase perempuan tanpa pendapatan sendiri**

Indikator ini mengukur krtperempuan atau istri yang tidak memiliki pendapatan mandiri. Langkah ini memungkinkan beberapa indikasi ketergantungan ekonomi perempuan dalam

rumah tangga. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar.

Target 5C. Mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya, dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela.

48. Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi

Konsep dan Definisi

Indikator ini menggambarkan proporsi terpenuhinya kebutuhan keluarga berencana, yaitu persentase perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi atau menunda anak berikutnya dan sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini dapat diterima secara luas karena merefleksikan sejauh mana pasangan, masyarakat dan sistem kesehatan dalam mendukung perempuan untuk bertindak atas pilihan mereka dan memantau apakah keinginan perempuan untuk menggunakan kontrasepsi telah terpenuhi. Indikator ini mendapat perhatian lebih terhadap ketidakadilan dalam akses layanan dan digunakan untuk mendukung HAM dalam kesehatan reproduksi. Perempuan memiliki hak untuk menentukan untuk memiliki anak atau tidak, begitupun dengan pilihan berapa jumlah anak atau memberi jarak kehamilan, dan keluarga berencana merupakan dimensi utama kesehatan reproduksi. Di negara kurang berkembang, terdapat seperempat hingga seperlima kehamilan yang tidak diinginkan.

Disagregasi

Menurut umur, kuantil pendapatan, status perkawinan, perkotaan/pedesaan, etnis, dan lain-lain.

Komentar dan keeterbatasan

Indikator ini merupakan perbaikan indikator MDG yaitu belum terpenuhinya prevalensi kontrasepsi yang mudah dipahami. Indikator ini dihitung menggunakan persentase semua wanita yang berada pada usia reproduksi yang telah menikah. Hal ini menjadi kelalaian penting karena norma adat dan/atau kurangnya pendidikan seks dapat mencegah remaja aktif secara seksual untuk menggunakan hak mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi.

Ketersediaan di Indonesia

Informasi mengenai kebutuhan pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh melalui SDKI. Menurut SDKI, persentase kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern adalah pemakaian alat/cara kontrasepsi modern dibagi total dari *unmet need* dan jumlah pemakaian kontrasepsi modern. Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dapat dirinci menurut fungsinya (untuk menjarangkan kelahiran dan membatasi kelahiran). Data dapat dirinci menurut kelompok umur, daerah kota-desa, pendidikan, jumlah anak yang masih hidup, dan kuintil kekayaan.

49. Angka kelahiran total

Konsep dan Definisi

Angka kelahiran total adalah jumlah rata-rata kelahiran hidup seorang wanita yang akan berusia 50 tahun. Perhitungan ini mengasumsikan tidak ada kematian ibu. Turunnya angka kelahiran total menunjukkan peningkatan kemampuan perempuan dalam menggunakan hak mereka untuk membuat pilihan kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki.

Paragraf 13 Program Aksi yang diadopsi oleh *International Conference on Population and Development* (ICPD) dan Agenda Aksi SDSN juga menyorot suatu hal bahwa dalam mengurangi pertumbuhan penduduk melalui transisi sukarela seperti menurunkan angka kelahiran merupakan salah satu komponen dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Disagregasi

Dapat didisagregasi menurut umur, perkotaan/pedesaan.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur yaitu 15-49 tahun. Indikator ini dapat diperoleh melalui Susenas, SUPAS, SP, registrasi vital, dan SDKI.

Indikator tambahan:

- **Rata-rata usia ibu saat melahirkan bayi pertama**

Indikator ini adalah usia rata-rata ibu melahirkan dan dapat membantu mendeteksi kehamilan remaja. SDKI menyajikan informasi persentase wanita umur 15-49 tahun yang telah melahirkan pada umur tertentu dan median umur saat pertama kali melahirkan menurut umur. Data dapat dirinci menurut karakteristik latar belakang seperti daerah tempat tinggal (kota-desa), pendidikan, dan kekayaan.

- **[Indikator pendidikan kesehatan seksual]**

Pengembangan indikator ini dapat dilakukan oleh Kemenkes dengan mengacu pada ketentuan internasional.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan

Target 6A. Memastikan akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat

50. Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan pedesaan yang mengakses layanan dasar terhadap air minum, seperti yang dijelaskan dalam Program Monitoring Gabungan WHO/UNICEF. Air minum adalah air yang digunakan oleh manusia untuk konsumsi, persiapan makanan, dan kebutuhan kebersihan dasar lainnya. Rumah tangga dianggap memiliki layanan dasar terhadap air minum ketika mereka menggunakan air dari sumber yang layak dalam kurun waktu total 30 menit atau kurang untuk satu putaran, termasuk antriannya.

Sumber air minum yang layak adalah sumber atau titik penampungan air dari alam atau terlindung dari kontaminasi. Sumber air minum yang layak meliputi, pipa pasokan air minum lokal, kran umum, tabung penampung, sumur galian, mata air terlindung, air hujan, dan air

minum kemasan (sumber yang layak digunakan untuk mencuci tangan, memasak atau tujuan kebersihan lainnya).

Kekurangan air minum yang aman merupakan penyebab utama penyakit dan kematian, karena infeksi virus, polusi kimia dan kebersihan yang buruk. Kurangnya akses air di dalam rumah merupakan bentuk kerugian ekonomi, karena dibutuhkannya sumber daya manusia untuk mengambil dan membawa air. Indikator ini menyediakan proksi untuk mengukur paparan akses terhadap air minum yang aman dan tindakan efektif untuk mengaksesnya.

Disagregasi

Berdasarkan perkotaan/pedesaan. Pemilahan lebih lanjut perlu ditinjau ulang.

Komentar dan keterbatasan

Penggunaan sumber air minum layak adalah proksi untuk mengukur akses ke air minum yang aman. Keterbatasan indikator ini tidak menunjukkan jumlah air minum minimum yang tersedia.

Ketersediaan di Indonesia

BPS menyediakan indikator akses air minum layak dari Susenas. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator yang digunakan adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator dapat dirinci menurut daerah tempat tinggal (perkotaan-pedesaan).

51. **Persentase penduduk yang menggunakan sanitasi dasar, menurut daerah perkotaan/pedesaan**

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan pedesaan yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak, seperti yang dijelaskan dalam Program Monitoring Gabungan WHO/UNICEF. Fasilitas sanitasi layak di rumah adalah rumah tangga yang memiliki pembuangan kotoran terpisah dari kontak manusia dan memastikan kotoran tersebut tidak kembali ke lingkungan terdekat. Jenis fasilitas dikatakan memadai jika fasilitas tersebut dipakai oleh tidak lebih dari lima rumah tangga atau 30 orang, misalnya jamban cemplung dengan platform seadanya atau jongkok dengan lempengan dari bahan tahan lama (jamban kompos, jamban *pour-flush*, dan lain-lain), toilet yang terhubung ke septik tank, atau toilet yang terhubung ke saluran pembuangan.

Akses ke fasilitas pembuangan tinja yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan tinja. Penggunaan fasilitas sanitasi layak dapat mengurangi penyakit yang berhubungan dengan diare pada anak kecil dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di negara yang sanitasinya buruk yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan sekolah karena penyakit. Kaitannya dengan karakteristik sosial ekonomi lain (pendidikan, pendapatan) dan kontribusinya terhadap kesehatan umum dan kualitas hidup membuat indikator ini universal dan baik terhadap pembangunan manusia.

Disagregasi

Berdasarkan perkotaan/pedesaan. Pemilahan lebih lanjut perlu ditinjau ulang.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator dalam menentukan layak dan tidaknya sanitasi adalah fasilitas jamban/kakus dan tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Menurut BPS, sanitasi dikatakan layak jika memiliki fasilitas jamban sendiri atau jamban bersama, dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Indikator ini diperoleh melalui Susenas pada karakteristik perumahan dan dapat dirinci menurut daerah perkotaan-perdesaan.

Indikator tambahan:

- **[Indikator Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi]**

Indikator ini menelusuri pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkat, dan melalui kerjasama lintas batas yang sesuai. Indonesia telah melakukan langkah maju dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu. Sejalan dengan konsep PSAT yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air. Indikator ini dapat dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengacu pada ketentuan internasional.

- **Persentase siswa yang terdaftar dalam program pengembangan anak usia dini yang menyediakan air minum, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai.**

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, dipisahkan menurut jenis kelamin, fasilitas sanitasi, dan fasilitas cuci tangan di sekolah-sekolah, dengan menggunakan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator ini juga merupakan indikator tambahan untuk target 4A. Belum adanya data yang memadai mengenai akses air minum dan sanitasi berbasis sekolah membuat indikator masih sulit untuk diukur.

- **Persentase penerima manfaat rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan klinik yang menyediakan air minum, sanitasi, dan layanan kebersihan yang memadai.**

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, dipisahkan menurut jenis kelamin, fasilitas sanitasi, dan fasilitas cuci tangan untuk pasien di fasilitas kesehatan, dengan menggunakan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator ini juga merupakan indikator tambahan untuk target 3A. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga dilakukan pendekatan dengan menggunakan informasi mengenai ketersediaan air minum, sanitasi, dan kebersihan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan. Data yang tersedia dari Risfaskes adalah puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan yang memiliki pengelolaan limbah (SPAL).

- **Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah.**

Indikator ini menunjukkan akses ke air dan sabun di fasilitas cuci tangan di rumah, menggunakan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator yang diperoleh dari SDKI ini juga merupakan indikator tambahan untuk target 3A. Informasi yang dikumpulkan oleh SDKI adalah ketersediaan tempat khusus untuk mencuci tangan dalam rumahtangga dan penggunaan air serta bahan pembersih untuk mencuci tangan, menurut wilayah kota-desa, dan kuintil kekayaan.

- **Persentase penduduk yang membuang kotorannya di alam terbuka.**

Indikator ini menunjukkan penduduk yang tidak menggunakan fasilitas sanitasi apapun dan merupakan ukuran yang kuat yang mendefinisikan kemiskinan. Indikator ini dapat diperoleh dari Susenas dengan menggunakan informasi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL.

Target 6B. Memastikan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk saat ini dan yang akan datang

52. Persentase pengolahan aliran air limbah sesuai standar nasional, menurut sumber rumah tangga dan industri

Konsep dan Definisi

Kurangnya pengolahan limbah domestik dan industri menimbulkan bahaya kesehatan dan lingkungan yang serius di banyak kota, khususnya di negara sedang berkembang dimana 80-90 persen limbah perkotaan tidak ditangani dengan tepat. Bahkan di negara maju, limbah belum ditangani secara keseluruhan. Tingkat limbah secara global terus meningkat secara eksponensial sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Besarnya volume limbah yang tidak ditangani langsung saja dibuang ke berbagai sumber air, dan mengancam kesehatan manusia, ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber air. Oleh karenanya indikator ini diusulkan untuk memantau penanganan limbah pasca-2015. Terdapat banyak cara untuk mendefinisikan limbah. Secara garis besar, limbah merupakan kombinasi satu atau lebih limbah domestik yang terdiri dari air hitam (kotoran, urin dan lumpur tinja) dan air abu-abu (limbah dapur dan kamar mandi), air dari perusahaan dan institusi komersial, termasuk rumah sakit, limbah industri, air hujan, dan limbah kota lainnya, pertanian, hortikultura dan limbah budidaya.

Penanganan limbah adalah proses memisahkan limbah tersuspensi dan terlarut baik terkontaminasi bahan fisika, kimia maupun biologi untuk menghasilkan, (a) air yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali (b) lumpur padat yang dapat dibuang maupun digunakan kembali (misal pupuk). Penggunaan teknologi canggih memungkinkan untuk menggunakan kembali air yang telah diolah untuk pertanian, industri atau air minum.

Disagregasi

Berdasarkan limbah industri dan kota, berdasarkan kota.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Penyajian data untuk indikator ini merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup sebagai ukuran yang dapat digunakan untuk memantau setiap industri maupun instansi/badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, berdasarkan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, data pengolahan limbah masih minim sehingga dibutuhkan data yang lengkap dan tersedia secara nasional maupun regional sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

53. Persentase total sumber air yang digunakan

Konsep dan Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai volume total air tanah dan sari air permukaan dari berbagai sumber-sumber yang digunakan untuk kepentingan manusia (misal pada sektor pertanian, industri, atau kota), dinyatakan sebagai persentase total sumber daya air terbarukan setiap tahunnya. Indikator ini menunjukkan apakah suatu negara memiliki pasokan sumber air bersih yang berkelanjutan. Hal ini dapat melacak manajemen yang berkelanjutan, terintegrasi, dan transparan dari sumber air.

Disagregasi

Karena indikator dapat dipisahkan untuk menunjukkan abstraksi berdasarkan sektor (juga menunjukkan penggunaan efisiensi untuk masing-masing sektor), hal itu dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola klaim persaingan sumber daya air oleh pengguna yang berbeda.

Komentar dan keterbatasan

Banyak negara tidak memiliki penilaian yang baik dari volume akuifer dan resapan/debit, sehingga upaya-upaya penting perlu dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan data. Idealnya indikator harus dihitung untuk cekungan air individu karena permintaan dan kebutuhan pasokan harus seimbang pada tingkat cekungan.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan indikator yang secara internasional dihitung oleh FAO. FAO telah mengumpulkan dan menganalisis data tentang sumber daya air dan penggunaannya di tiap negara termasuk Indonesia melalui survei AQUASTAT sejak tahun 1992. Periodisitas survei negara adalah sekitar 10 tahun karena kendala anggaran, tetapi bisa dikurangi menjadi 5 tahun relatif mudah, jika lebih banyak sumber daya akan tersedia. Indikator ini diperkirakan oleh FAO berdasarkan informasi dari tiap negara, dilengkapi dengan dataset global yang tersedia, dan tersedia untuk semua negara.

54. [Pelaporan otoritas Daerah Aliran Sungai (DAS) internasional tentang manajemen DAS lintas-batas/negara]

Konsep dan Definisi

Sungai dan ekosistem air tawar lainnya sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Ekosistem tersebut juga sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Arus sungai yang melintasi dalam negara dan batas negara menjadi sasaran untuk bendungan, polusi dan waduk. Indikator yang cocok perlu dikembangkan untuk mengukur kemajuan pengelolaan sungai lintas batas berkelanjutan.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan indikator internasional.

Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern

Target 7A. Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030, dan 2050

55. Proporsi penduduk dengan akses terhadap solusi memasak modern, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil non-solid untuk memasak, yang didefinisikan dalam laporan kerangka kerja *Sustainable Energy For All* (SE4All). Basis data yang tersedia saat ini (termasuk basis data energi yang di gunakan rumahtangga secara global milik WHO dan Statistik dan Keseimbangan Energi Dunia milik IEA) hanya menelusuri akses secara biner (rumahtangga yang punya atau tidak punya akses). Hal itu menyebabkan SE4All menggunakan definisi sederhana tersebut sebagai titik awal untuk menelusuri akses solusi memasak modern. Meskipun pendekatan biner ini memenuhi kebutuhan penelusuran global, namun konsesus yang berkembang menuntut kemajuan yang berkelanjutan.

Tentu saja, mendefinisikan akses solusi memasak modern dengan menggunakan proporsi penduduk yang mengandalkan bahan bakar fosil non solid untuk memasak, mengabaikan peran penggunaan kompor masak. Namun indikator tersebut dapat menentukan tingkat efisiensi, polusi dan keamanan praktek memasak yang ada dalam masyarakat. Selain itu, kebiasaan kegiatan memasak dan karakteristik perumahan juga akan mempengaruhi performa solusi memasak di rumah tangga.

Untuk alasan ini SE4All berencana menggunakan matriks berlapis untuk menelusuri akses ke solusi memasak modern. Matriks ini akan mengukur akses tersebut melalui performa solusi memasak utama (termasuk bahan bakar dan kompor masak) dan menilai bagaimana kecocokan solusi ini dengan kehidupan sehari-hari. Matriks ini juga mencakup pertimbangan polusi udara dalam ruangan/ventilasi dan minyak tanah untuk memasak/pencahayaan. Pengukuran akses ke solusi memasak modern juga menyajikan kemungkinan untuk meningkatkan kesehatan rumah tangga miskin, khususnya perempuan dan anak perempuan yang umumnya bertanggung jawab untuk urusan dapur.

Disagregasi

Berdasarkan perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Data penggunaan bahan bakar utama untuk memasak diperoleh dari Susenas. Bahan bakar/ energi utama yang dapat disajikan adalah listrik, gas/elpiji, gas kota, minyak tanah, arang,

briket, kayu, dan lainnya. Bahan bakar yang berjenis bukan padat/non-solid adalah listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah. Sehingga indikator yang dapat digunakan adalah persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak. Data dapat dirinci menurut wilayah kota-desa dan jenis kelamin KRT.

56. Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik yang dapat diandalkan, menurut daerah perkotaan/pedesaan

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang memiliki listrik di rumah atau mengandalkan listrik sebagai penerangan utama, seperti yang didefinisikan dalam Laporan Kerangka Kerja SE4All. Basis data yang tersedia saat ini (termasuk basis data energi yang di gunakan rumahtangga secara global milik WHO dan Statistik dan Keseimbangan Energi Dunia milik IEA) hanya menelusuri akses secara biner (rumahtangga yang punya atau tidak punya akses). Indikator ini tidak dapat menangkap dimensi penting terhadap akses listrik diantaranya, (i) solusi *off-grid* dan *mini-grid* terisolasi, yang dibutuhkan di banyak negara sebagai alternatif transisi untuk listrik berbasis *grid*, yang berpotensi berfungsi sebagai solusi jangka panjang di daerah-daerah geografis terpencil; (ii) masalah pasokan, yang umum dijumpai di negara-negara berkembang, di mana jaringan listrik mengalami pasokan tidak teratur, sering terjadi kegagalan; dan (iii) masalah kualitas (seperti tegangan rendah atau berfluktuasi); (iv) perbedaan antara pasokan listrik dan jasa listrik, yang berarti kepemilikan alat listrik yang tepat dan penggunaan aktual listrik.

Untuk alasan ini, SE4All berencana untuk menggunakan matriks berlapis untuk mengukur akses listrik. Indikator ini akan mengukur tingkat akses terhadap pasokan listrik di berbagai dimensi, termasuk kuantitas (kapasitas tertinggi yang tersedia), durasi, pasokan malam, keterjangkauan, legalitas, dan kualitas. Hal ini dilengkapi dengan kerangka *multi-tier* paralel yang menangkap penggunaan layanan listrik utama.

Disagregasi

Berdasarkan perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Susenas menyediakan data rumah tangga dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN, listrik non PLN, petromak/aladin, pelita/ sentir/obor, dan lainnya. Akses listrik yang dapat diandalkan dapat diukur dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN. Data dapat dirinci menurut wilayah kota-desa dan jenis kelamin KRT.

57. Insentif implisit untuk energi rendah karbon pada sektor listrik (dihitung dalam US\$/MWh atau US\$ per ton CO₂ yang harus dihindari)

Konsep dan Definisi

Untuk mengurangi emisi GRK ke level optimal secara sosial, biaya sosial emisi GRK perlu diterapkan, yang pada gilirannya memerlukan kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga karbon dalam rentang ukuran tertentu, namun kebijakan ini tidak terbatas hanya pada

peraturan, pajak, atau pasar karbon. Indikator ini mengukur tingkat harga karbon (dalam \$/tCO₂e) yang efektif di sektor listrik, seperti yang didefinisikan oleh laporan OECD tentang harga karbon yang efektif, sebagai biaya bersih bagi masyarakat untuk setiap unit pengurangan GRK terinduksi. Definisi yang hampir sama diusulkan oleh laporan Komisi Produktivitas Australia tentang kebijakan emisi karbon di perekonomian penting.

Harga karbon bisa eksplisit seperti pajak karbon atau harga tunjangan emisi dalam sistem perdagangan emisi GRK, atau dapat menjadi implisit, yaitu harga karbon yang mencerminkan biaya untuk masyarakat per ton CO₂e yang berkurang sebagai akibat dari setiap jenis tindakan kebijakan yang memiliki dampak terhadap emisi GRK. Perbandingan harga efektif karbon berdasarkan kebijakan pada sektor dan negara yang berbeda memberikan pemahaman mengenai adanya insentif untuk mengurangi emisi dan adanya efektivitas biaya dari kebijakan alternatif untuk mengurangi emisi, dan dampak potensialnya terhadap daya saing. Hasil numerik dari perbandingan ini harus diperlakukan dengan hati-hati, karena harga satu karbon tidak bisa secara komprehensif dapat menangkap apa yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

Sebagai titik awal, SDSN mengusulkan bahwa kerangka pasca-2015 dapat menelusuri harga karbon yang efektif untuk pembangkit listrik. Indikator ini meliputi bagian besar dari emisi gas rumah kaca dan secara metodologi lebih mudah untuk ditelusuri karena teknologi yang relevan bersifat global, emisi dan kebijakan terkonsentrasi, serta beberapa informasi yang tersedia dapat dibandingkan antarnegara, internasional, dan organisasi lainnya.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

SDSN menggarisbawahi bahwa indikator ini agnostik terhadap jenis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Indikator ini tidak memberikan preferensi pajak, instrumen pasar atau peraturan. Sehingga pemerintah dapat mempertahankan fleksibilitas penuh mereka untuk mengidentifikasi dan mengerucutkan instrumen yang terbaik disesuaikan dengan konteksnya.

Metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Produktivitas dan OECD Australia dapat digunakan sebagai acuan. Setelah metodologi yang lebih baik tersedia untuk area emisi lainnya, indikator dapat diperluas untuk fokus sektoral.

Indikator ini mengestimasi biaya pengurangan GRK dan dampaknya terhadap harga tanpa membandingkannya dengan manfaat sosial.

Ketersediaan di Indonesia

Efektivitas harga karbon di sektor listrik belum diukur di Indonesia. Rentang harga karbon yang efektif untuk sektor listrik dapat dihitung oleh Ditjen EBTKE sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan sumber daya energi yang baru dan terbarukan dengan mengacu pada penghitungan OECD.

58. Tingkat perbaikan intensitas energi primer

Konsep dan Definisi

Indikator ini digunakan sebagai proksi efisiensi energi, salah satu pilar kerangka kerja SE4All. Indikator tersebut dapat menelusuri sejauh mana pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan energi, yang merupakan persyaratan utama untuk energi berkelanjutan dan

dekarbonisasi.

Efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio konsumsi energi bruto dengan PDB. Pada umumnya, konsumsi energi bruto dilaporkan dengan menggunakan lima sumber utama energi: bahan bakar padat/biomassa, minyak, gas, nuklir dan sumber daya terbarukan. Indikator dinyatakan sebagai laju pertumbuhan gabungan tahunan (CAGR) intensitas energi terhadap PDB, diukur melalui paritas daya beli (PPP).

Disagregasi

Menurut sektor.

Komentar dan keterbatasan

Intensitas energi merupakan indikator proksi yang tidak sempurna karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi volume dan struktur sektoral PDB. Namun hal itu dapat diatasi dengan metode dekomposisi statistik. Statistikawan akan perlu menentukan apakah indikator dinyatakan sebagai rata-rata bergerak lebih dari beberapa tahun atau apakah pertumbuhan ini dilaporkan *year-on-year*.

Ketersediaan di Indonesia

Intensitas energi primer dapat dihitung dengan menggunakan data konsumsi energi primer oleh Kementerian ESDM dan data PDB dari BPS. Data dapat dirinci menurut sektor pengguna seperti rumah tangga, industri, dan transportasi.

Indikator Tambahan:

- **Energi primer menurut tipe**

Terkait energi primer, IEA melaporkan data tahunan mengenai sumber energi utama yang digunakan oleh masing-masing negara, seperti batu bara, minyak, gas, energi terbarukan, atau biomassa. Di Indonesia, data konsumsi final energi primer seperti batubara, minyak bumi, biomassa, dan gas dilaporkan oleh Kementerian ESDM setiap tahunnya. Selain konsumsi, dilaporkan juga data penyediaan energi primer menurut jenisnya, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan.

- **Subsidi Bahan bakar fosil (dalam \$ atau % dari GNI/Pendapatan Nasional Bruto)**

Indikator ini mengukur subsidi untuk bahan bakar fosil yang dikonsumsi langsung oleh pengguna akhir atau dikonsumsi sebagai masukan untuk pembangkit listrik. Indikator ini menggunakan pendekatan gap harga, merupakan metodologi yang paling umum diterapkan untuk mengukur subsidi konsumsi, khususnya oleh IEA. Di Indonesia, pengumpulan data realisasi penyaluran dan konsumsi BBM bersubsidi di seluruh provinsi dilakukan oleh Pertamina dan BPH Migas sebagai penanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8A. Memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan laporan terintegrasi hingga 2020

59. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita (PPP, *current US\$ Atlas method*)

Konsep dan Definisi

Pendapatan Nasional Bruto mengukur total pendapatan penduduk berdasarkan biaya hidup di masing-masing negara (paritas daya beli, PPP). Pendapatan ini didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah oleh semua produsen yang ada di negara tersebut, ditambah dengan pajak netto (dikurangi subsidi) tidak termasuk nilai output, ditambah penerimaan bersih dari penghasilan utama (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri. *International Comparison Program* (ICP) dapat digunakan untuk menghitung paritas daya beli (PPP). Metode Atlas adalah metode Bank Dunia untuk menghitung nilai tukar untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar lintas negara dibandingkan dengan pendapatan nasional.

Disagregasi

Berdasarkan wilayah (kota/desa, provinsi/kabupaten).

Komentar dan keterbatasan

Seperti ditegaskan dalam laporan SDSN, Pendapatan Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto adalah indikator penting, namun alat tersebut hanya dapat mengukur sebagian dari dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan. Kedua ukuran ekonomi tersebut tidak cukup menangkap kondisi material masyarakat.

Oleh karena itu, SDSN merekomendasikan indikator dilengkapi dengan indikator yang lain (di luar PDB). Misalnya, Kerangka Sentral Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi 2012 dapat mendukung indikator yang lebih luas terkait pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memastikan sumber daya alam terus menyediakan sumber daya dan jasa lingkungan. Kerangka kerja ekonomi-lingkungan memungkinkan indikator terhubung dengan pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketergantungan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi juga harus diperhatikan. Isu-isu ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* dan kebijakan perlindungan sosial di negara berkembang.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dihitung setiap tahun oleh Bank Dunia dengan menggunakan pendapatan nasional negara-negara. Pendapatan Nasional Bruto per kapita belum dapat dirinci menurut wilayah (kota/desa maupun provinsi/kabupaten).

60. Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (*System of Environmental-Economic Accounting*)

Konsep dan Definisi

Komisi statistik PBB mengadopsi Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (SEEA) pada tahun 2012 sebagai standar internasional pertama untuk neraca ekonomi lingkungan. SEEA

membawa statistik lingkungan dan hubungannya dengan ekonomi ke dalam inti statistik resmi dan dengan demikian memperluas Sistem Neraca Nasional (SNN), yang berfokus pada pengukuran kinerja ekonomi. Contoh informasi yang diberikan oleh SEEA termasuk penilaian tren dalam penggunaan dan ketersediaan sumber daya alam, tingkat emisi dan pembuangan ke lingkungan dari kegiatan ekonomi, dan jumlah aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk tujuan lingkungan. Komisi statistik PBB akan mengembangkan templat pelaporan untuk Kerangka kerja sentral SEEA. Indikator ini mengukur apakah suatu negara memberlakukan dan melaporkan SEEA nasional. Indikator ini mempertimbangkan fakta bahwa beberapa elemen dari SEEA mungkin tidak berlaku untuk negara tertentu dan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai dari neraca yang dipilih tergantung pada prioritas kebijakan.

Disagregasi

SEEA merupakan indikator nasional, namun SEEA dapat sangat terpilah (berdasarkan sektor kegiatan, sumber daya lingkungan, unit sub-nasional, dan lain-lain).

Komentar dan keterbatasan

Tantangan indikator ini adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan kerangka kerja institusional untuk menyusun data yang terintegrasi, dan proses produksi statistik dan manajemen informasi dalam sistem statistik negara-negara.

Ketersediaan di Indonesia

BPS telah membuat SEEA setiap tahun dalam publikasinya yang berjudul Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi. Unit analisis pada penyusunan publikasi ini adalah nasional dengan sampel beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Penyusunan SEEA ini hanya terbatas pada penghitungan deplesi lingkungan saja (PDN 1), tidak termasuk degradasi. Selain itu, karena keterbatasan data, penyusunan baru terbatas pada 9 komoditi di 2 sektor, yaitu Pertambangan (minyak bumi, gas alam, batubara, bauksit, timah, emas, perak, bijih nikel) dan Kehutanan.

Indikator tambahan:

- **Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja**

Indikator ini merupakan ukuran kunci produktivitas tenaga kerja. Indikator yang merupakan indikator MDGs ini dapat diperoleh dari BPS yaitu dari data PDB nasional dan Sakernas. Dapat dirinci menurut sektor lapangan usaha dan tersedia sampai level provinsi.

Target 8B. Setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua

61. Tingkat pekerja muda, menurut sektor formal dan informal

Konsep dan Definisi

Tingkat pekerja muda adalah persentase angkatan kerja muda yang bekerja. Orang-orang muda didefinisikan sebagai orang yang berusia 15 hingga 24 tahun. Angkatan kerja terdiri dari semua orang yang saat ini berada dalam kelompok usia tersebut yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dan jumlah mereka yang berkerja dan tidak berkerja.

Sebisa mungkin tingkat ketenagakerjaan muda harus dilaporkan secara terpisah untuk pekerjaan formal dan informal. Hal ini sangat penting untuk negara berkembang. Konferensi Statistik Internasional yang Ke-17 dari Statistik Tenaga Kerja merekomendasikan cakupan

pekerjaan informal, yaitu (i) berusaha sendiri (wiraswasta tanpa pekerja) sektor informal (ii) berusaha (wiraswasta dengan pekerja) di sektor informal (iii) pekerja keluarga, terlepas dari jenis pekerjaan (iv) anggota koperasi produsen informal (tidak berbadan hukum) (v) karyawan informal seperti yang didefinisikan sesuai hubungan ketenagakerjaan (dalam hukum/prakteknya, pekerjaan tidak tunduk pada UU nasional tenaga kerja, pajak penghasilan, perlindungan sosial atau hak atas imbalan kerja tertentu (cuti tahunan atau sakit)) dan (vi) pekerja milik sendiri yang terlibat dalam produksi barang-barang khusus untuk penggunaan akhir oleh rumah tangga.

Disagregasi

Diusulkan indikator dipilah berdasarkan gender untuk mengidentifikasi pekerja laki-laki dan perempuan di sektor formal dan informal.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ketenagakerjaan untuk pekerja muda sektor formal dan informal lebih baik dibandingkan ukuran pengangguran standar yang hanya fokus pada sektor formal. Pekerja sektor informal tidak serta merta dapat dihitung di semua negara. Meskipun sudah banyak yang memulai mendefinisikan dan menghitung jumlah pekerja di sektor informal, namun kualitas hasil dan ketersediaan data masih kurang baik.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini diperoleh melalui Sakernas dan dapat dipilah menurut gender dan sektor formal-informal. Komponen penduduk bekerja pada sektor informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

62. [Indeks Pekerjaan layak]

Konsep dan Definisi

Indikator ini dipertimbangkan untuk menelusuri kepatuhan negara dengan agenda pekerjaan layak yang diadopsi oleh negara-negara anggota ILO. Pekerjaan yang layak seperti yang didefinisikan ILO, termasuk akses pekerjaan penuh dan produktif dengan hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan promosi dialog sosial, dengan kesetaraan gender sebagai isu lintas sektor. Saat ini indeks tunggal tidak ada, tapi indeks dapat dibuat (kemungkinan sebagai indikator komposit). ILO saat ini membangun indikator statistik yang meliputi sepuluh kategori komponen untuk pekerjaan layak yang dapat memenuhi indikator ini. Demikian pula, OECD membangun kerangka kerja konseptual dan operasional untuk mengukur kualitas kerja. Hal ini dapat diintegrasikan dengan Kelompok kerja Khusus UNECE untuk kualitas kerja, yang anggotanya mencakup OECD dan ILO.

Statistik ketenagakerjaan juga dapat diperoleh dari statistik sosio-demografis dari SNN dan SEEA. Berdasarkan Divisi Statistik PBB, sistem ini harus digunakan untuk menghasilkan statistik ekonomi dan ketenagakerjaan dalam penerapan kebijakan pasar tenaga kerja yang terintegrasi dan mengacu pada tujuan kebijakan lain untuk sektor riil, fisik dan moneter. Dengan mengimplementasikan SEEA di negara berkembang, juga dapat mempertegas konsep pekerjaan hijau/*green jobs*.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

Indikator yang memadai untuk ketenagakerjaan yang layak masih sedang dikembangkan. Untuk sementara, proksi yang tepat mungkin adalah proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Ketersediaan di Indonesia

BPS dengan menggunakan Sakernas sebagai sumber utama data ketenagakerjaan dapat menyediakan indikator ini jika indikator telah dikembangkan.

63. Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktek

Konsep dan Definisi

Konvensi ILO menjelaskan standar perburuhan utama yang bertujuan untuk mendorong peluang pekerjaan yang layak dan produktif, di mana pria dan wanita bisa bekerja dalam kondisi yang sama, non-diskriminasi, aman, bebas dan bermartabat. Indikator yang diusulkan menelusuri ratifikasi negara dan kepatuhan dengan 8 konvensi fundamental ILO, yang mencakup hal-hal berikut, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib, usia minimum untuk tenaga kerja dan penghapusan langsung dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk upah yang setara.

Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan konvensi yang telah diratifikasi setiap dua tahun. Sistem pelaporan didukung oleh sistem pengawasan yang membantu untuk memastikan implementasi. ILO secara teratur mengkaji penerapan standar di negara-negara anggota dan membuat rekomendasi.

Disagregasi

Berdasarkan negara dan konvensi.

Komentar dan keterbatasan

Metode yang tepat untuk pengukuran indikator ini perlu dikembangkan.

Ketersediaan di Indonesia

Indonesia sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950 memiliki kewajiban untuk meratifikasi Konvensi ILO. Proses ratifikasi dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri yang disahkan oleh Presiden. Laporan ratifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Dirjen ILO.

Indikator tambahan:

- **Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64 Tahun)**

Indikator ini melengkapi berbagai ukuran pengangguran karena menelusuri kontribusi keseluruhan penduduk yang dipekerjakan. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas setiap tahun dan tersedia sampai level provinsi.

- **Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja**

Indikator ini mencakup jumlah orang yang bekerja di lapangan kerja informal, yaitu pekerja

yang lapangan kerjanya tidak dikenakan undang-undang ketenagakerjaan, pajak penghasilan, perlindungan sosial atau kerja lain dalam hukum dan praktiknya. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu persentase pekerja sektor informal (penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar) terhadap seluruh tenaga kerja.

- **Persentase penduduk muda yang tidak sedang mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET)**

Indikator ini melacak jumlah kaum muda yang tidak sedang melakukan pekerjaan formal maupun dalam pendidikan dan pelatihan penuh waktu. Ini adalah ukuran dari persentase pemuda yang menganggur, bekerja di sektor informal, atau memiliki bentuk-bentuk pekerjaan tidak tetap. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas.

- **Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga dari total lapangan kerja**

Indikator ini menelusuri penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau yang berusaha sendiri. Ukuran ini sangat penting untuk negara-negara dengan pasar tenaga kerja informal yang besar. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas.

- **Angka penduduk miskin yang bekerja, diukur dengan PPP per kapita sebanyak \$2 per hari**

Indikator ini mengukur penduduk bekerja yang berpenghasilan kurang dari \$ 2 PPP per hari. Indikator penghasilan pekerja ini dapat diperoleh melalui Sakernas.

- **Pendapatan rumah tangga, termasuk dalam bentuk jasa (PPP, US \$ metode Atlas saat ini)**

Indikator ini berasal dari Sistem Neraca Nasional (SNN). Indikator ini digunakan sebagai salah satu komponen PDB. Data diperoleh melalui survei khusus yang dinamakan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berupa pendapatan upah dan gaji, pendapatan usaha rumah tangga, pendapatan kepemilikan, dan transfer. Survei dilakukan setiap tahun tetapi level penyajiannya hanya pada level nasional.

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

Target 9A. Menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi mobile dan broadband

64. Akses terhadap jalan untuk segala cuaca/*all weather road* (persentase akses pada [x] km jarak ke jalan)

Konsep dan Definisi

Akses jalan yang bisa dilewati dan handal sepanjang tahun sangat penting untuk banyak proses pembangunan pedesaan, termasuk akses ke masukan, pasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki jarak [x km] dari tempat tinggal ke jalan yang andal dan bisa dilewati sepanjang tahun. Sebaiknya jalan tersebut harus diaspal untuk memastikan akses untuk kendaraan berat.

Disagregasi

Indikator ini dapat dipilah secara spasial.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini lebih ambisius daripada ukuran alternatif lain yaitu akses jalan untuk segala musim (*all seasons road*), yang pembangunan dan pemeliharannya lebih murah.

Ketersediaan di Indonesia

Saat ini belum tersedia data penduduk dengan akses terhadap jalan *all weather road* dengan jarak x km. Pendekatan yang pernah digunakan untuk mengetahui penduduk yang memiliki akses terhadap jalan menggunakan data hasil pendataan PODES. Jenis jalan yang diasumsikan dari hasil PODES adalah jalan untuk segala musim/*all season road* karena keterangan jenis jalan tidak dirinci pada pendataan. Keterbatasan data ini menjadi tantangan untuk menambahkan keterangan yang lebih rinci pada PODES mengenai akses penduduk desa terhadap infrastruktur jalan, terutama jalan untuk segala cuaca (*all weather road*-seperti jalan aspal kondisi baik dan sedang) karena akses ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan pembangunan di perdesaan.

65. **Langganan *broadband handpone* per 100 penduduk perkotaan/pedesaan**

Konsep dan Definisi

Akses ***Broadband*** adalah teknologi pendukung utama yang dapat memberikan keuntungan ekonomi (akses ke ekonomi formal, akses ke pasar regional dan global untuk pengusaha lokal, dan akses ke layanan perbankan); manfaat kesehatan (menghubungkan tenaga kesehatan dengan sistem kesehatan nasional); dan mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan. Hal ini diproyeksikan bahwa dalam beberapa tahun mayoritas penduduk dunia, termasuk di sub-Sahara Afrika, akan memiliki akses ***mobile broadband***. Indikator ini mengukur jumlah pelanggan ***broadband*** per 100 penduduk. Komisi ***Broadband*** menjelaskan ***broadband*** sebagai, (a) selalu ON, (b) konektivitas berkapasitas tinggi, dan (c) memungkinkan penyediaan gabungan beberapa layanan secara bersamaan. Definisi ITU mengacu pada akses komunikasi data (misalnya Internet) di kecepatan downstream ***broadband*** lebih besar dari atau sama dengan 256 Kbit/s. Indikator ini harus dilihat dalam hubungannya dengan indikator 66.

Disagregasi

Berdasarkan jenis kelamin. Peluang lain untuk pemilahan ditinjau kembali.

Komentar dan keterbatasan

Sementara indikator ini memberikan ukuran yang berguna untuk memantau penyerapan teknologi ***mobile broadband***, data yang tersedia mungkin termasuk orang yang memiliki lebih dari satu langganan ***mobile broadband*** dan bisa melebihi persentase penduduk dengan akses ***mobile broadband***.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator ini dipublikasikan oleh ITU (*International Telecommunication Union*) dengan menggunakan konsep dan definisi mereka. Data pada tahun 2000-2008 bersumber dari Dirjen Pos dan Telekomunikasi, PT. Indosat, dan PT. Telkom, sedangkan pada tahun 2009-sekarang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data belum bisa dirinci berdasarkan gender.

Indikator tambahan:

- **Persentase rumah tangga yang memiliki internet, berdasarkan jenis layanan di daerah pedesaan**

Indikator ini mengukur persentase rumah tangga dengan akses internet berdasarkan jenis (*dial-up*, DSL, dan lain-lain). Di Indonesia, keterangan akses internet rumah tangga diperoleh melalui Susenas yaitu anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Data dapat dirinci berdasarkan lokasi/media (rumah sendiri, warnet, kantor, sekolah, HP/Ponsel, dan lainnya), belum bisa dirinci berdasarkan jenis layanan.

Target 9B. Mempercepat adopsi teknologi baru untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

66. [Indeks kinerja infrastruktur TIK]

Konsep dan Definisi

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan teknologi canggih lainnya sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Indeks yang akan dikembangkan ini dapat menelusuri kualitas dan kinerja infrastruktur TIK di setiap negara.

Indeks yang diusulkan akan mengukur tiga dimensi tertimbang kinerja infrastruktur TIK antara lain:

- Kualitas *broadband* tetap: diukur sebagai kecepatan *download* rata-rata (dalam kilobit per detik), sebagaimana ditetapkan melalui tes kecepatan pengguna;
- Kualitas *broadband* HP: diukur sebagai proporsi pengukuran uji kecepatan *download* dengan *download throughput* dari [1 megabit per detik] atau lebih; dan
- Kapasitas *bandwidth* internasional: diukur sebagai *bandwidth* terhubung melintasi perbatasan internasional ke daerah-daerah metropolitan pada pertengahan tahun (disajikan dalam megabit per detik (mbps)).

Setiap komponen dari indeks dan indeks secara keseluruhan dapat dinormalisasi dengan nilai-nilai antara 1 dan 100.

Disagregasi

-

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini dan indikator 61, mengukur dimensi penggunaan infrastruktur TIK perkotaan dan pedesaan, yang saling terkait dan harus ditinjau bersama-sama. Karena standar TIK dan penggunaan asosiasi berkembang cepat, setiap indeks untuk kualitas infrastruktur TIK suatu negara perlu ditinjau secara berkala - mungkin setiap lima tahun. Akses data bisa menjadi batasan untuk mengembangkan indeks ini.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dikembangkan oleh BPS pada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata terkait inovasi di bidang sains dan teknologi.

67. Peneliti dan teknisi di bidang penelitian dan pengembangan (per sejuta orang)

Konsep dan Definisi

Perkembangan, difusi, dan adopsi teknologi memerlukan staf terlatih yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Indikator ini mengukur jumlah peneliti dan teknisi yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan per juta orang. Negara-negara dapat mempertimbangkan indikator ini sebagai proksi untuk “pekerja teknologi”.

Disagregasi

Dalam beberapa kasus, data dapat dirinci berdasarkan sektor berikut: pemerintah, perusahaan bisnis, pendidikan tinggi, dan swasta nirlaba.

Komentar dan keterbatasan

Data tersedia untuk sekitar 140 negara, tetapi tantangan besar perlu diatasi untuk memastikan data dapat dibandingkan untuk seluruh negara. Indikator ini hanya menelusuri pekerja di bidang penelitian dan pengembangan dan cakupannya perlu diperluas sehingga menggambarkan jumlah peneliti dan teknisi di sektor berteknologi tinggi.

Ketersediaan di Indonesia

Data yang tersedia terkait indikator ini hanya data dari LIPI tentang jumlah peneliti di masing-masing Kementerian/Lembaga. Pengumpulan data untuk ketersediaan indikator dapat dilakukan oleh BPS (Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata) terkait inovasi di bidang sains dan teknologi.

Target 9C. Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan

68. Nilai tambah sektor industri manufaktur sebagai persentase terhadap PDB

Konsep dan Definisi

Indikator ini adalah ukuran kontribusi output industri terhadap perekonomian suatu negara. Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah adalah output bersih dari sektor manufaktur, dihitung setelah menambahkan semua output dan mengurangi input antara, ditentukan oleh *International Standard Industrial Classification* (ISIC) revisi 3, dan dihitung tanpa dikurangi depresiasi aset fabrikasi, atau deplesi dan degradasi sumber daya alam. Indikatornya diukur sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB).

Disagregasi

Bisa dipilah berdasarkan masing-masing sektor (sesuai definisi ISIC).

Komentar dan keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat diperoleh melalui Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan dan dapat dirinci menurut subsektor sesuai dengan KBLI.

69. Jumlah emisi gas rumah kaca terkait energi dan industri menurut jenis gas dan sektor, dinyatakan sebagai emisi berbasis produksi dan permintaan (tCO₂e)

Konsep dan Definisi

Indikator ini menelusuri jumlah gas rumah kaca (GRK) per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), dirinci menurut gas (termasuk CO₂, N₂O, CH₄, HFC, PFC, dan SF₆) dan sektor (termasuk penyulingan minyak bumi, listrik dan produksi panas, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, bangunan komersial dan residensial, emisi *fugitive*, serta emisi dari proses industri) sesuai dengan pedoman Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2006 untuk inventarisasi GRK nasional, dan bab khusus untuk energi dan emisi industri terkait.

UNFCCC mengumpulkan data emisi gas rumah kaca, diperkirakan dengan metode penghitungan berbasis produksi (kadang-kadang juga disebut berbasis wilayah). Dalam pendekatan ini, semua emisi yang terjadi “di dalam wilayah nasional dan daerah lepas pantai dimana negara tersebut memiliki yurisdiksi” (seperti yang didefinisikan oleh IPCC 2006 pedoman inventarisasi GRK nasional) ditugaskan kepada tiap negara.

Metode penghitungan komplementer berfokus pada emisi berbasis permintaan atau konsumsi. Berdasarkan pendekatan ini emisi dikaitkan dengan konsumsi akhir domestik dan semua yang disebabkan oleh produksi impor dikaitkan dengan suatu negara. Dengan kata lain emisi gas rumah kaca untuk negara pengimpor ditambah dengan konten gas rumah kaca dari impor. Demikian pula, emisi dikurangi untuk negara pengeksport. Permintaan atau emisi berbasis konsumsi diperkirakan menggunakan tabel input-output internasional dan oleh karena itu memerlukan metodologi yang lebih kompleks.

Disagregasi

Menurut sektor dan gas, seperti dijelaskan di atas. Disagregasi berdasarkan sektor harus sebisa mungkin dibuat konsisten dengan sistem statistik nasional. Data untuk indikator ini juga dilaporkan berdasarkan Klasifikasi Baku Industri Internasional untuk seluruh kegiatan ekonomi (ISIC).

Komentar dan keterbatasan

Penggunaan penghitungan emisi berbasis produksi ini konsisten dengan definisi dari PDB. Namun, karena menghilangkan emisi yang terkandung dalam perdagangan internasional, ada pengembangan literatur yang memperdebatkan penghitungan emisi berbasis permintaan atau konsumsi. Oleh karena itu SDSN merekomendasikan agar negara-negara melaporkan emisi mereka dengan menggunakan ukuran berbasis produksi dan permintaan.

Ketersediaan di Indonesia

Data emisi GRK yang dihitung di Indonesia mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diterbitkan sebagai Perpres No. 61/2011. Sektor utama yang menjadi target penurunan emisi GRK adalah (i) Kehutanan dan Lahan Gambut, (ii) Pertanian, (iii) Energi dan Transportasi, (iv) Industri, serta (v) Pengelolaan Limbah. Penyediaan data emisi ini merupakan tanggungjawab masing-masing Kementerian yang membawahi sektor utama tersebut dengan Bappenas sebagai penanggungjawab utama RAN-GRK. Rincian data juga dapat berdasarkan jenis gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yang dinyatakan paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO₂, CH₄, N₂O, NOX, CO, PFC dan SF₆. Namun, untuk Indonesia gas PFC dan SF₆ masih sangat kecil emisinya sehingga tidak diperhitungkan.

Indikator tambahan:

- **Lapangan pekerjaan di sektor industri (% dari total lapangan kerja)**

Indikator ini mengukur persentase tenaga kerja di sektor industri, termasuk di bidang pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan utilitas publik, sebagai bagian dari total lapangan kerja. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas dan dapat dirinci berdasarkan jenis industri (besar-sedang dan mikro-kecil) dan menurut subsektor sesuai dengan KBLI.

Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara**Target 10A. Mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah median pendapatan nasional****70. [Indikator ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya atau rasio Palma]***Konsep dan Definisi*

Kekhawatiran tentang ketimpangan berfokus pada pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan. Indikator 70, tentang “kemiskinan relatif”, menelusuri distribusi pendapatan bagian bawah, sementara indikator ini memantau perubahan di distribusi pendapatan bagian atas. SDSN melihat dua pilihan untuk indikator tersebut yaitu negara-negara dapat menelusuri kontribusi pendapatan oleh 10 persen penduduk terkaya dari populasi dan rasio Palma. Indikator alternatif yang semakin populer adalah Rasio Palma yang didefinisikan sebagai rasio kontribusi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya terhadap 40 persen penduduk termiskin dari populasi.

Rasio Palma berusaha untuk mengatasi beberapa keterbatasan koefisien Gini, yang gagal memperhitungkan perubahan struktur demografi (misalnya efek dari ledakan pertumbuhan penduduk atau populasi yang menua) dan tidak sensitif terhadap perubahan ekor (atas dan bawah) dari distribusi pendapatan, dimana pada bagian tersebut banyak terjadi perubahan. Dengan menggunakan rasio sederhana yang bertentangan dengan pengukuran koefisien Gini yang lebih kompleks ini dapat lebih intuitif bagi para pembuat kebijakan dan warga negara. Sebagai contoh, tingginya nilai Palma jelas menggambarkan apa yang perlu diubah yaitu untuk mempersempit kesenjangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan 40 persen penduduk termiskin dan/ atau dengan mengurangi kontribusi 10 persen penduduk terkaya.

Disagregasi

Kontribusi pendapatan desil atas dan rasio Palma diformulasikan menggunakan data survei rumah tangga yang berhubungan dengan pendapatan dan konsumsi (biasanya dari Bank Dunia/Indikator Pembangunan Dunia). Data tersebut dapat dipilah menurut desil pendapatan di negara-negara yang memungkinkan untuk analisis komparatif antara negara dan wilayah. Pemilahan lain dapat berdasarkan persentil, daerah atau kelompok yang memerlukan analisis kompleks dari data survei rumah tangga asli, yang saat ini mungkin tidak layak untuk skala nasional/global.

Komentar dan keterbatasan

Keterbatasan penting dari kontribusi pendapatan desil atas dan rasio Palma (serta Koefisien Gini) yaitu indikator tidak bisa dekomposisi (yaitu ketimpangan total terkait secara konsisten

terhadap ketimpangan antar sub-kelompok). Selain itu, data yang berdasarkan survei rumah tangga, beberapa di antaranya ada yang mengukur pendapatan dan ada yang mengukur konsumsi. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi tantangan perbandingan internasional, karena distribusi konsumsi yang cenderung kurang timpang dibandingkan dengan pendapatan. Oleh karena tidak ada cara untuk menyesuaikan pendapatan dan konsumsi, hal tersebut menyebabkan hasil survei yang tidak disesuaikan menjadi hal yang lumrah. Untuk meningkatkan kualitas data ini sebaiknya diperluas dengan pengumpulan data berdasarkan pada pendapatan-murni, misalnya melalui *Luxembourg Income Study*, yang saat ini memiliki data mikro untuk 40 negara.

Ketersediaan di Indonesia

Untuk menghitung ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran rumah tangga berdasarkan hasil Susenas. Penghitungan ketimpangan dengan menggunakan rasio Palma belum dilakukan sehingga nantinya dapat dihitung dengan menggunakan data pengeluaran tersebut. Namun, sebaiknya ada peningkatan kualitas pengumpulan data sehingga indikator dapat dihitung dengan menggunakan data pendapatan bukan dengan pendekatan pengeluaran. Data dapat dirinci berdasarkan desil maupun persentil, dan berdasarkan wilayah.

71. **Persentase rumah tangga dengan pendapatan di bawah 50 persen dari pendapatan rata-rata (“kemiskinan relatif”)**

Konsep dan Definisi

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai persentase rumah tangga dengan pendapatan kurang dari setengah dari pendapatan rata-rata nasional. Ini merupakan indikator ketimpangan di bagian bawah distribusi pendapatan, yang menjadi penyebab pengucilan sosial dan merusak persamaan kesempatan.

Disagregasi

Data harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga dan berdasarkan wilayah perkotaan/pedesaan. Jika metodologi survei memungkinkan, disagregasi berdasarkan etnis, agama, bahasa, disabilitas dan status adat juga harus dipertimbangkan.

Komentar dan keterbatasan

Indikator ini membutuhkan pengukuran distribusi nasional pendapatan rumah tangga, yang masih langka di sebagian besar negara. Sering pengukuran tersebut dilakukan sekali setiap dua sampai tiga tahun sehingga data dilaporkan dengan *lag* tiga tahun.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dihitung dengan data pengeluaran penduduk dari Susenas. Dapat dirinci menurut jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga dan berdasarkan wilayah kota-desa tetapi belum bisa dirinci berdasarkan etnis, agama, bahasa, disabilitas, dan status adat.

Indikator tambahan:

- **Koefisien Gini**

Koefisien Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau pengeluaran konsumsi antar individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari distribusi pemerataan sempurna. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, dan nilai 1

menunjukkan ketimpangan sempurna. Koefisien ini adalah indikator ketimpangan pendapatan yang terkenal, dan telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Indikator ini dihitung dan dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya pada level provinsi dan dapat juga dihitung hingga level kabupaten/kota.

- **Persistensi pendapatan/ upah**

Indikator ini adalah ukuran dari mobilitas sosial ekonomi antargenerasi, yang secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan status anak-anak mereka yang akan menjadi dewasa. Mobilitas ekonomi dapat diukur baik melalui upah atau pendapatan, dan dinyatakan sebagai sebagian pendapatan orang tua atau upah yang tercermin dalam keturunan mereka. Persistensi pendapatan ini belum pernah diukur secara nasional di Indonesia. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dengan menggunakan informasi dari hasil Sakernas.

Target 10B. Mencapai keuangan publik internasional dan domestik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memadai, yaitu proporsi BPR terhadap pendapatan nasional bruto sebesar 0,7 persen untuk semua negara berpenghasilan tinggi

Indikator tambahan:

- **Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) netto untuk negara kurang berkembang sebagai persentase terhadap pendapatan nasional bruto negara maju**

Indikator ini mengukur kemajuan terhadap komitmen bantuan. Kisaran target yang disepakati untuk indikator ini adalah 0,15-0,2 persen. Indikator ini adalah indikator untuk negara maju.

- **ODA sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto negara rentan**

Indikator ini adalah jumlah ODA yang diterima oleh suatu negara sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto. Indikator ini merupakan kelanjutan dari indikator MDG Tujuan 8 yang mengukur ketergantungan terhadap bantuan. ODA merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Kemenkeu (ODA) dan BPS (Pendapatan nasional bruto). Data ODA dapat dirinci berdasarkan negara/ lembaga kreditor.

- **[Biaya rata-rata remitansi]**

Remitansi semakin penting bagi banyak negara, tapi pengukuran yang akurat masih sulit dilakukan. G20 berkomitmen untuk mengurangi biaya remitansi rata-rata global sebesar 5%, sehingga peningkatan metodologi statistik diperlukan untuk pengumpulan data agar dapat memantau biaya remitansi. Indikator ini dapat dikembangkan oleh Bank Indonesia/ Kementerian Keuangan dengan mengacu pada ukuran internasional.

- **[Indikator migrasi]**

Indikator ini akan menelusuri migrasi dan mobilitas penduduk yang tertib, aman, dan bertanggung jawab. Setelah indikator dikembangkan, survei Pencacahan Migrasi Internasional dan Remitan yang terintegrasi oleh Susenas dapat menjadi sumber data. Selain itu, cakupan survei tersebut juga dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data indikator migrasi ini.

Tujuan 11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Target 11A. Meningkatkan standar hidup di pemukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan

72. Persentase peduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal

Konsep dan Definisi

Indikator ini dihitung dengan mengambil jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh kota dibagi dengan jumlah penduduk kota tersebut dan dinyatakan sebagai persentase. Di tingkat nasional, persentase ini dapat dihitung dengan mengambil jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh semua kota dibagi dengan total penduduk yang tinggal di semua kota di negara tersebut

UN-Habitat telah mengembangkan definisi dari rumah tangga kumuh agar dapat dilakukan survei atau sensus di tingkat rumah tangga untuk mengidentifikasi penghuni kawasan kumuh di kalangan penduduk perkotaan. Rumah tangga dalam permukiman kumuh (*slum household*) adalah kelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari indikator berikut:

- Rumah yang kokoh, yang dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca yang ekstrim,
- Ruang huni yang cukup, yang berarti tidak lebih dari 3 orang menghuni 1 ruang bersama,
- Akses yang mudah ke air bersih (aman) dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,
- Akses ke sanitasi yang memadai, dalam bentuk toilet pribadi atau toilet bersama,
- Kepastian atau rasa aman bermukim (*secure tenure*), yang dapat melindungi penghuninya dari pengusuran paksa.

Disagregasi

Indikator ini dapat disagregasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur kepala keluarga.

Komentar dan Keterbatasan

Tidak semua permukiman kumuh sama dan tidak semua penghuni kawasan kumuh menderita kekurangan pada tingkat yang sama. Tingkat kekurangan tergantung pada seberapa banyak dari lima kondisi tersebut tidak dimiliki oleh rumah tangga kumuh. Sekitar seperlima dari rumah tangga kumuh hidup dalam kondisi sangat miskin.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan salah satu indikator MDGs. Di Indonesia data pada indikator ini dapat dihasilkan oleh BPS melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data ini dapat disajikan setiap tahunnya. Sebagaimana data ini juga digunakan dalam laporan pembangunan milenium yang dilaporkan setiap tahun.

73. [Indikator pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan untuk setiap aglomerasi perkotaan pada kota yang penduduknya diatas 250.000 jiwa]

Konsep dan Definisi

Pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan memerlukan strategi jangka panjang yang mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan perkotaan, upaya dekarbonisasi dan penggunaan lahan. Strategi tersebut berbeda untuk masing-masing kota. Oleh karena itu, strategi ini perlu dikembangkan di tingkat kota. Diskusi publik dan konsultasi tentang strategi tersebut akan memastikan bahwa strategi dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk perkotaan, termasuk bisnis. SDSN mengusulkan pengembangan suatu indikator yang dapat menunjukkan apakah suatu kota besar, misalnya kota dengan populasi di atas 250.000, telah mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan. Idealnya masing-masing negara dapat mengembangkan strategi dan mengumpulkan target kinerja utama pembangunan berkelanjutan untuk setiap perkotaan di negaranya. Indikator-indikator tersebut akan membantu program pembangunan yang memfokuskan perhatian pada kebutuhan pembangunan berkelanjutan jangka panjang perkotaan.

Indikator ini merupakan tindak lanjut dari Agenda 21, rencana aksi sukarela yang tidak mengikat yang dikembangkan PBB saat UNCED di Rio pada tahun 1992. PBB telah merekomendasikan bahwa pemerintah daerah harus membuat program rencana lokal untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Program ini disebut dengan *Local Agenda 21*.

Disagregasi

Dalam pengembangan indikator ini selanjutnya, diharapkan indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan kota/kabupaten, provinsi dan ukuran perkotaan.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan kajian lebih lanjut untuk membentuk indikator ini yang dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun BPS.

Indikator Tambahan:

- [Indikator tentang keterkaitan ekonomi perkotaan-perdesaan]

Indikator ini akan mengukur hubungan ekonomi dan sosial antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan. Dapat dikembangkan oleh BPS dengan menggunakan sumber data dari Susenas.

Target 11B. Memastikan akses universal yang aman dan layak ke lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon

5. **Persentase perempuan dan laki-laki di daerah perkotaan dengan kepemilikan yang aman, yang diukur dengan persentase yang memiliki sertifikat rumah dan persentase yang tidak takut akan penggusuran sewenang-wenang terhadap rumahnya**

Konsep dan Definisi

Tidak adanya jaminan kepemilikan atas perumahan penduduk kota dapat memiliki implikasi penting bagi pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan inklusi sosial. Indikator yang diusulkan ini terdiri dari dua komponen yaitu persentase yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan persentase yang tidak takut penggusuran sewenang-wenang. Bukti kepemilikan dan persepsi memberikan informasi penting dan saling melengkapi tentang jaminan kepemilikan tanah. Walaupun bukti kepemilikan dianggap penting, tetapi tidak cukup untuk mengukur jaminan kepemilikan, karena persepsi juga memberikan informasi tambahan yang sangat berharga. Selain itu, ukuran persepsi dapat memfasilitasi perbandingan lebih berguna di negara-negara.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan. Untuk disagregasi indikator ini perlu kajian lebih lanjut.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator mengenai kepemilikan sertifikat rumah belum tersedia di Indonesia. Indikator dapat menjadi pertimbangan untuk ditambahkan pada Susenas terkait keterangan perumahan.

74. **Persentase rumah tangga di perkotaan dengan pengumpulan limbah padat regular (dan didaur ulang)**

Konsep dan Definisi

Rumah tangga di daerah perkotaan menghasilkan banyak limbah padat yang harus dikumpulkan secara teratur dan dibuang dengan benar agar kondisi hidup sehat dan sanitasi di daerah perkotaan tersebut tetap terjaga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penyumbatan pada saluran-saluran air yang dapat mengakibatkan banjir dan berbagai permasalahan kesehatan. Hal ini membuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Daur ulang dan pengomposan menjadi cara yang lebih disukai dan harus dicanangkan, karena mampu mengurangi penggunaan energi serta meminimalkan jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Disagregasi

Untuk disagregasi perlu dikajian lebih lanjut.

Komentar dan Keterbatasan

Di banyak negara, sistem pemantauan untuk pengumpulan limbah padat lemah, dengan data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Pengembangan sistem pemantauan yang memadai mungkin memerlukan upaya besar di beberapa negara.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini tersedia melalui hasil Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup oleh BPS. Informasi yang tersedia berupa perlakuan terhadap sampah yang ditanyakan terhadap rumah tangga dengan jawaban ya atau tidak. Perlakuan tersebut antara lain didaur ulang, dibuat kompos/pupuk, diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA, dijual ke pengumpul barang bekas, ditimbun/dikubur, dibakar, dibuang ke laut/sungai/got, dibuang sembarangan, dan dijadikan makanan ternak. Selain itu juga diperoleh informasi mengenai perlakuan terhadap sampah yang paling utama/sering dilakukan.

75. Ruang hijau perkotaan per kapita

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia untuk penduduk kota. Ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai ruang terbuka dan tempat rekreasi di luar ruangan, ruang terbuka informal dan taman bermain anak-anak, taman umum, taman warisan, kawasan konservasi alam dan hutan. Indikator ini dinyatakan dalam meter persegi per penduduk. Indikator alternatif lainnya adalah jarak penduduk menuju ruang terbuka hijau, tetapi untuk membentuk indikator ini dibutuhkan data yang kompleks dan rinci. Ruang terbuka hijau sangat penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat kota. Bukti empiris menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat sosial dan psikologis (rekreasi, relaksasi, meningkatkan kesehatan) bagi penduduk kota.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

Banyak ukuran yang tersedia untuk menilai ruang terbuka hijau. Beberapa bersifat universal, seperti penginderaan jauh, dan beberapa bersifat spesifik-lokasi seperti *on site surveys*.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator terkait ruang terbuka hijau di Indonesia hanya sebatas total luas taman dan jalur sebagai ruang terbuka hijau karena data tersebut menjadi ukuran pencapaian UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mensyaratkan luas ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Data ruang terbuka hijau per kapita belum tersedia tetapi dapat dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dari BPS. Indikator mengenai ruang terbuka hijau ini dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Datanya dilaporkan setiap tahun dan tersedia untuk setiap wilayah perkotaan, dan dapat dirinci berdasarkan fungsi RTH perkotaan seperti RTH taman kota, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, ruang pejalan kaki, di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu.

76. Akses penduduk ke transportasi umum

Konsep dan Definisi

Indikator akses ke transportasi umum yang memadai didekati dengan proksi persentase penduduk dalam [0,5] kilometer dari angkutan umum berjalan setidaknya setiap [20] menit. Transportasi umum didefinisikan sebagai layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk masyarakat umum. Yang dimaksud transportasi umum disini adalah bus, troli, trem, kereta api, kereta bawah tanah, dan kapal feri dan tidak termasuk taksi, kolam mobil, dan bus yang disewa.

Transportasi murah yang efektif sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan. Karena transportasi yang efektif akan memudahkan akses menuju tempat kerja, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan lain-lain. *The Partnership on Sustainable Low-Carbon Transport* (SLoCaT) mengusulkan indikator untuk akses untuk transportasi yang berkelanjutan di daerah perkotaan meliputi: waktu tempuh harian, persentase pendapatan yang dibelanjakan oleh keluarga perkotaan untuk transportasi, dan persentase rumah tangga dalam 500 meter dari kualitas yang baik, transportasi umum yang terjangkau.

Disagregasi

Rumah tangga harus dipisahkan secara spasial, jenis kelamin, umur, kecacatan untuk menjamin akses yang merata.

Komentar dan Keterbatasan

Tidak ada metodologi yang disepakati secara internasional untuk mengukur kenyamanan dan kualitas pelayanan transportasi umum. Selain itu, data global untuk sistem transportasi perkotaan tidak ada. Meskipun beberapa data tersedia pada perusahaan angkutan umum dan kota-kota tertentu, tetapi data yang selaras dan dapat dibandingkan pada tingkat dunia belum tersedia. Untuk memperoleh data ini akan membutuhkan level tingkat kota/ kabupaten, seperti transportasi perkotaan yang paling sering tidak berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah nasional. Secara umum, saat ini data tentang jumlah orang dengan akses ke transportasi massal dan infrastruktur transportasi kurang memadai.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut menghasilkan/ membentuk indikator ini.

Indikator Tambahan:

- **Indeks keanekaragaman hayati kota (Indeks Singapore)**

Terdapat 23 indikator *self-assessment* untuk mengevaluasi upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dapat melakukan evaluasi ketersediaan data terkait indikator ini.

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target 12A. Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer

77. Indikator kerugian pangan global (atau indikator lain yang perlu dikembangkan untuk mengetahui proporsi kerugian pangan atau pangan yang terbuang dalam rantai nilai setelah panen)

Konsep dan Definisi

Kerugian makanan karena ketidakefisienan dalam rantai dan sisa produksi pangan tersebar luas hampir di semua negara. Saat ini, data mengenai kerugian dan sisa makanan sangat jarang dan sulit untuk dibandingkan secara internasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk mengukur kerugian dan sisa dari berbagai kategori produk makanan dan seluruh tahapan dari panen hingga konsumsi akhir. Dilihat dari pentingnya kerugian dan sisa makanan, diperlukan indikator dasar untuk mengetahui perkembangan kerugian dan sisa makanan dari waktu ke waktu. FAO saat ini sedang mengembangkan indikator kerugian pangan global, yang diharapkan sudah jadi pada akhir 2015 walaupun masih perlu divalidasi. Indeks ini didasarkan pada model yang menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi kerugian pangan (misalnya kepadatan jalan, cuaca dan hama) untuk memperkirakan kerugian kuantitatif. Data variabel ini tersedia dari beberapa sumber, termasuk statistik di tiap-tiap negara, FAOSTAT, indeks kapasitas logistik WFP, *World Road Statistics*, dan lain-lain. Selain itu, tergantung juga pada prioritas dan sistem pemantauan, tiap-tiap negara dapat mengadopsi indikator lain untuk mengetahui kerugian pangan dan/atau sisa makanan.

Disagregasi

Disagregasi perlu dikaji lagi setelah indikator ini ditetapkan.

Komentar dan Keterbatasan

Tanaman pangan pokok yang sering digabungkan setelah panen untuk diproses akan memberikan data tentang kerugian pangan yang lebih baik. Tanaman pangan yang ditanam dalam skala kecil dan/atau dikonsumsi langsung oleh rumah tangga pertanian akan jauh lebih sulit untuk diukur, akan tetapi tanaman pangan inilah yang cenderung mengalami kerugian pangan tertinggi.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini masih dalam tahap pengembangan oleh FAO yang diharapkan pada akhir 2015 sudah tersedia. Data yang tersedia di Indonesia adalah berupa kerugian pascapanen yaitu susut hasil panen padi. Data bersumber dari Survei Susut Hasil Tanaman Pangan oleh BPS yang bekerjasama dengan Kementan. Variabel yang dikumpulkan pada survei tersebut adalah susut hasil pada saat panen, susut hasil pada saat perontokan, dan susut hasil pada saat pengeringan.

78. Konsumsi bahan perusak ozon (BPO)

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur pola konsumsi bahan perusak ozon (BPO) yang diatur dalam Protokol Montreal tentang zat-zat yang mengurangilapisan ozon, sehingga memungkinkan adanya pengurangan jumlah bahan perusak ozon (BPO) sebagai akibat dari protokol tersebut. Hal ini

dinyatakan dalam ton *ozone depleting potential* (ODP), yang didefinisikan sebagai metrik ton BPO ditimbang dengan ODP.

Disagregasi

Disagregasi indikator ini perlu dikaji lebih lanjut.

Komentar dan Keterbatasan

Montreal dan Konvensi Wina untuk perlindungan lapisan ozon menargetkan fase lengkap penggunaan BPO.

Ketersediaan di Indonesia

Potokol Montreal telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Penghapusan Konsumsi Bahan Perusak Ozon. Definisi konsumsi BPO yang diterapkan di Indonesia adalah jumlah impor BPO, karena Indonesia tidak memproduksi dan mengekspor BPO. Konsumsi BPO dinyatakan dalam Metrik Ton ODP. Data ini tersedia di Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat disajikan setiap tahun sebagaimana pada laporan MDGs pada level nasional.

79. Kedalaman optik aerosol (AOD)

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur jumlah aerosol (misalnya kabut perkotaan, partikel asap, debu gurun, garam laut) yang didistribusikan melalui udara permukaan bumi ke atas atmosfer.

Disagregasi

Indikator ini dapat dilaporkan dengan tingkat tinggi disagregasi spasial.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini belum tersedia dan belum disajikan di Indonesia. Namun, pengumpulan data dapat dilakukan melalui satelit sehingga bisa tersedia untuk seluruh negara. UNEP dapat bertanggungjawab untuk mengumpulkan data tersebut sehingga bisa dibandingkan antar negara.

Indikator Tambahan:

- **Intensitas CO₂ sektor bangunan dan bangunan baru (kgCO₂/m₂/tahun)**

Sektor bangunan (perumahan dan komersial) memiliki andil besar terhadap emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Indikator ini didefinisikan sebagai volume emisi CO₂ (diukur dalam kilogram) per unit permukaan bangunan (diukur dalam meter persegi) dan per tahun. Indikator ini dilaporkan untuk bangunan yang ada dan tambahan bangunan baru selama setahun. Data di Indonesia hanya bisa menyajikan emisi CO₂ dari sektor konstruksi saja (bagian dari sektor Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan), tetapi tidak tersedia data intensitas CO₂ sektor bangunan dan bangunan baru. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi agar data indikator ini dapat disajikan.

- **[Indikator polusi kimia]**

Polusi kimia merupakan dimensi penting dalam perubahan lingkungan global, namun sulit diukur untuk dijadikan dasar perbandingan secara internasional. Terdapat beberapa indikator untuk polusi kimia tertentu, namun biasanya hanya tersedia untuk subset kecil dan hanya untuk mengukur sebagian kecil polusi kimia. Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan di Indonesia belum tersedia.

- **[Indikator bahan kimia beracun]**

Indikator ini mengukur keamanan dan paparan bahan kimia pokok beracun yang mempengaruhi kesehatan dan ekosistem manusia. Indikator ini perlu dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan belum tersedia di Indonesia.

- **[Indikator kebijakan pariwisata berkelanjutan]**

Indikator ini mengukur kebijakan pariwisata berkelanjutan. Belum ada penjelasan rinci dan teknis bagaimana indikator ini dapat menjadi ukuran turis yang berkelanjutan. Indikator ini masih dikembangkan dan di Indonesia sudah mulai menggali ide-ide pariwisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan kementerian lain yang terkait.

Target 12B. Menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

80. [Proporsi perusahaan senilai lebih dari \$1.000.000.000 yang menerbitkan laporan terintegrasi]

Konsep dan Definisi

Saat ini, sebagian besar perusahaan hanya melaporkan hasil keuangan mereka tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya investor mungkin tidak menyadari risiko yang timbul dari proses produksi perusahaan, serta masyarakat juga tidak mengetahui kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Beberapa standar pelaporan terpadu sudah dikembangkan untuk mengetahuidampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Salah satu contoh yang menonjol adalah International Integrated Reporting Council (IIRC). SDSN mengusulkan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui persentase perusahaan besar (yaitu lebih besar dari US \$ 1 miliar (diukur dalam PPP)) yang menyiapkan laporan terpadu yang konsisten terhadap SDGs dan sesuai dengan standar yang perlu didefinisikan.

Disagregasi

Indikator ini dapat dipilah berdasarkan sektor kegiatan, kepemilikan (swasta atau perusahaan publik), dan karakteristik lainnya.

Komentar dan Keterbatasan

Standar dan metodologi yang dilacak oleh indikator ini perlu didefinisikan. Secara khusus, indikator akan perlu menentukan standar untuk pelaporan terpadu yang dapat diterapkan dalam berbagai yurisdiksi.

Ketersediaan di Indonesia

Di Indonesia belum tersedia indikator ini, karena indikator ini masih dalam tahap pengembangan. Namun, ketersediaan indikator dapat diakomodasi pada Survei Industri Besar Sedang BPS.

81. **Publikasi kontrak berbasis sumber daya**

Konsep dan Definisi

Yang tercakup dalam indikator ini adalah kontrak berbasis sumber daya antara pemerintah dan bisnis, termasuk yang terkait eksplorasi sumber daya ekstraktif dan produksi, serta kegiatan pertanian dan kehutanan yang diterbitkan pada waktu yang tepat. Transparansi kontrak merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keuntungan dari investasi sumber daya skala besar. Kerahasiaannya bisa menjadi cara mudah untuk menyembunyikan kesenjangan posisi tawar, ketidakmampuan, kesalahan pengelolaan, dan korupsi. Publikasi kontrak merupakan awalan yang diperlukan untuk pengelolaan yang terkoordinasi dan efektif dari sektor ini dengan instansi pemerintah. Hal ini juga memungkinkan warga untuk memantau kontrak di berbagai bidang. Transparansi kontrak juga akan menghalangi pejabat pemerintah untuk melakukan kecurangan atas kontrak yang dilakukan. Dan seiring waktu, pemerintah juga dapat meningkatkan daya tawar mereka dengan mengukur kontrak dari seluruh dunia.

Berdasarkan sistem rating untuk industri ekstraktif dengan Indeks Tata Kelola Sumber Daya, indikator akan dibangun sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menerima salah satu dari empat peringkat, yang artinya sebagai berikut:

- 100 = Ya, semua kontrak yang valid atau disetujui diterbitkan secara penuh,
- 67 = Ya, mayoritas kontrak dipublikasikan secara penuh tetapi ada beberapa proyek kontrak atau izin yang belum diterbitkan,
- 33 = Beberapa kontrak ini diterbitkan tetapi tidak ada aturan yang jelas untuk penerbitan dan hal ini masih jarang,
- 0 = Nomor kontrak tidak dipublikasikan.

SDSN mengusulkan bahwa indikator yang tersedia untuk industri ekstraktif diperluas untuk mencakup investasi skala besar di bidang pertanian, kehutanan, perikanan konsesi, dan kontrak sumber daya alam besar lainnya.

Disagregasi

Indikator ini bisa dibedakan berdasarkan Industri dan komoditas.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini di Indonesia belum tersedia karena belum ada yang melakukan *rating* terhadap publikasi kontrak berbasis sumber daya. Hanya perlu dilakukan pengumpulan data untuk menghasilkan indikator ini di Indonesia.

Indikator Tambahan:

- **[Strategi analisa dampak lingkungan dan sosial yang diperlukan]**
Indikator ini mengukur apakah strategi analisa dampak lingkungan dan sosial diperlukan untuk semua proyek berbasis sumber daya. Dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- **[Peran pengawasan cabang legislatif mengenai kontrak dan lisensi berbasis sumber daya]**
Indikator ini mengukur keberadaan dan pemberlakuan kerangka kerja legislatif di sekitar sumber daya alam. Dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya**Target 13A. Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050.**

82. **Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2°C atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050**

Konsep dan Definisi

Mempertahankan pemanasan global dalam 2°C atau lebih rendah, mensyaratkan negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi tahun 2050, yang meliputi semua sumber emisi GRK termasuk dari energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Strategi ini harus transparan dan rinci tentang bagaimana negara-negara ingin mencapai pengurangan emisi (termasuk emisi yang terkait dengan energi), bagaimana mengurangi konsumsi energi, zat arang sektor listrik, dan menyediakan listrik penggunaan energi (khususnya di sektor transportasi dan bangunan). Mencakup target untuk mengurangi emisi GRK pada tahun 2020, 2030 dan 2050. Indikator ini juga mengusulkan untuk mengukur pelaksanaan strategi tersebut.

Disagregasi

Disagregasi untuk indikator ini perlu dikaji lebih lanjut.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Di Indonesia belum ada strategi dekarbonisasi dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan SDGs di Indonesia seharusnya pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah mulai membuat strategi tersebut yang transparan dan rinci.

83. Intensitas CO₂ dari sektor listrik dan kapasitas pembangkit listrik baru (gCO₂ per kWh)

Alasan dan Definisi

Pembangkit tenaga listrik juga bertanggung jawab terhadap sebagian besar total emisi GRK. Untuk mencapai tingkat pengurangan emisi yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global 2°C atau lebih rendah, sektor listrik harus mendekati nol-karbon. Pendeteksian intensitas CO₂ dari sektor listrik sangat penting untuk mengetahui kontribusinya terhadap pengurangan emisi GRK secara keseluruhan. Pemahaman apa yang mendorong evolusi dari intensitas CO₂ dari sektor listrik juga penting untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi emisi CO₂ dari sektor ini. Selain intensitas CO₂ dari total stok, terasa perlunya untuk mengukur intensitas CO₂ dari kapasitas pembangkit listrik baru, dengan teknologi, dan dengan memperhatikan kontribusinya terhadap beban dasar dan pembangkit listrik.

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah (diukur dalam gram) emisi CO₂ per unit listrik (diukur dalam *kilo Watt hour*) yang dihasilkan dari sektor listrik secara keseluruhan (jumlah kapasitas) dan dari kapasitas pembangkit listrik (antara kedua tanggal pengukuran indikator).

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Data emisi CO₂ sektor pembangkit listrik dihitung oleh Kementerian ESDM. Namun data merupakan emisi secara keseluruhan, belum memisahkan data emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru. Oleh karena itu, penghitungan emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan.

84. Intensitas CO₂ dari sektor transportasi (gCO₂/vkm) dan mobil baru (gCO₂/pkm) dan truk (tCO₂/tkm)

Konsep dan Definisi

Konsumsi bahan bakar dan kandungan karbon bahan bakar sektor transportasi bertanggung jawab bagi sebagian besar dari total emisi GRK. Meningkatnya aktivitas transportasi adalah salah satu alasan utama atas peningkatan emisi CO₂ yang berhubungan dengan transportasi global, tetapi tingkat absolut emisi CO₂ dari sektor transportasi berkaitan dengan ukuran suatu negara, penduduk, dan tingkat aktivitas ekonomi. Pengukuran emisi yang menyangkut transportasi per kendaraan kilometer perjalanan yang memungkinkan perbandingan sejarah dan lintas negara yang lebih relevan, dengan memberikan pemahaman tentang seberapa baik negara melaksanakan pekerjaan transportasi, berdasarkan parameter kinerja fisik.

Pengetahuan tentang perkembangan intensitas CO₂ dari sektor transportasi juga penting untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi emisi CO₂ dari sektor tersebut. Emisi GRK dari udara internasional dan transportasi laut tidak mudah dikaitkan kepada suatu negara tertentu. Selain itu, di samping intensitas CO₂ agregat transportasi, penting untuk mengukur intensitas CO₂ dari mobil baru untuk transportasi penumpang dan truk baru untuk angkutan barang.

Indikator yang diusulkan didefinisikan sebagai jumlah (diukur dalam gram) emisi CO₂ per kendaraan, kilometer perjalanan secara agregat; dan per kilometer penumpang melakukan perjalanan (PKM) untuk mobil baru, dan per ton kilometer perjalanan (tkm) untuk truk baru (antara kedua tanggal pengukuran indikator).

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

Aktivitas transportasi biasanya digambarkan dengan mengukur kilometer kendaraan (VKM). Hal ini tidak memungkinkan adanya perbandingan atau memperhitungkan berbagai faktor terkait. Hal ini juga diperlukan untuk mengukur kilometer penumpang (PKM) atau ton kilometer (tkm) meskipun metrik ini memerlukan pengumpulan data yang lebih rinci.

Ketersediaan di Indonesia

Data emisi CO₂ sektor transportasi dihitung oleh Kementerian ESDM. Namun data merupakan emisi secara keseluruhan, belum memisahkan data emisi dari mobil baru dan truk. Oleh karena itu, penghitungan emisi dari mobil baru dan truk dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan.

Target 13B. Mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri

85. Emisi gas rumah kaca netto di sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (tCO₂e)

Konsep dan Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah GRK netto (ton CO₂ ekuivalen) di sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, dipilih menurut gas bumi (CO₂, N₂O, dan CH₄) dan menurut kategori lahan yang digunakan (lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lainnya), berdasarkan panduan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* 2006 untuk inventarisasi GRK nasional, dan *Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry (GPG-LULUCF)*.

Metode inventarisasi harus praktis dan operasional. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, GRK antropogenik dan pembuangan melalui wastafel didefinisikan sebagai semua yang ada pada lahan terkelola. Lahan terkelola merupakan lahan yang sudah terdapat intervensi kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi, fungsi ekologi dan sosialnya. Untuk lahan tak terkelola emisi GRK tidak perlu dilaporkan. Namun, menjadi sebuah tindakan yang baik apabila negara mengukur dan melacak luas lahan tak terkelola dari waktu ke waktu sehingga konsistensi pelaporannya tercatat sebagai perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

Disagregasi

Menurut gas bumi dan kategori penggunaan lahan. Selain itu, indikator ini juga dapat disajikan per ton basis produksi karena data per unit lahan dapat menyebabkan kesimpulan menyedatkan.

Komentar dan Keterbatasan

Sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya memiliki beberapa karakteristik yang unik yang berhubungan dengan pengembangan metode inventarisasi. Faktor-faktor yang mengatur emisi dan penyerapan dapat menjadi alami dan antropogenik (langsung dan tidak langsung) dan bisa sulit membedakan secara jelas antara faktor-faktor penyebab.

Ketersediaan di Indonesia

Indonesia telah melakukan pelaporan data emisi kepada UNFCCC karena berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK melalui mekanisme REDD+, termasuk melaporkan emisi GRK sektor ini. Data bersumber dari berbagai kementerian, salah satunya oleh Kementerian Kehutanan.

Indikator Tambahan:

- **Intensitas emisi gas rumah kaca di wilayah pengelolaan hutan (GtCO₂e/ha)**

Indikator ini mengukur manfaat karbon dari pengelolaan hutan yang lebih baik, melalui penerapan teknik RIL (*Reduced Impact Logging*), yang menjadi hal penting karena kehilangan karbon akibat degradasi bisa menjadi sama besarnya seperti akibat dari deforestasi. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, tetapi penelitian lebih lanjut dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan terkait penerapan RIL untuk menekan emisi.

Target 13C. Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

86. Pendanaan iklim resmi dari negara-negara maju yang menjadi tambahan untuk ODA (dalam US\$)

Konsep dan Definisi

Negara-negara maju telah menjanjikan pada Konferensi UNFCCC untuk memberikan sekitar \$100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim pada tahun 2020. Dengan indikator ini akan diketahui pendanaan iklim resmi yang disediakan oleh masing-masing negara maju sebagai perbandingan terhadap target keseluruhan pendanaan yang setidaknya sebesar \$ 100 miliar per tahun.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut tujuan pendanaan.

Komentar dan Keterbatasan

Komitmen keuangan ini di bawah COP tidak mendefinisikan pendanaan iklim resmi dengan cara yang memungkinkan untuk menciptakan indikator global yang tidak ambigu. Beberapa lembaga, termasuk OECD, mengusulkan standar dan definisi. Pekerjaan tambahan diperlukan sampai pada standar yang koheren diterima secara internasional untuk melaporkan pendanaan iklim resmi.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini untuk negara maju.

Indikator Tambahan:

- **[Indeks aksi perubahan iklim]**

Indikator ini merupakan indeks komposit yang mengukur kesiapan untuk perubahan iklim, termasuk adanya rencana aksi perubahan iklim, kebijakan yang berorientasi aksi perubahan iklim, apakah aksi perubahan iklim terintegrasi ke dalam rencana pemerintah kota lainnya, dan ketersediaan dana yang digunakan pada tingkat kota untuk mitigasi dan adaptasi. Indonesia (Bappenas dan kementerian terkait) telah menyusun rencana mitigasi dan adaptasi seperti Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Indikator ini akan dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia melalui kebijakan tersebut terhadap perubahan iklim.

Tujuan 14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target 14A. Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut

87. Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index)

Konsep dan Definisi

Dua pertiga permukaan bumi terdiri dari lautan, dan setengah dari permukaannya terdiri dari laut lepas. Kesehatan lautan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Belum ada satu variabel pun yang dapat menggambarkan kesehatan laut dan sistem pesisirnya, oleh karena itu SDSN mengusulkan untuk menggunakan indeks komposit kesehatan laut yang menilai kesehatan laut secara keseluruhan.

Indeks kesehatan laut ini diukur melalui 10 aspek ekosistem maritim dan penggunaannya oleh manusia yaitu penyediaan makanan, kesempatan memancing bagi nelayan, produk alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi, mata pencaharian dan ekonomi daerah pesisir, *sense of place*, air bersih, dan keanekaragaman hayati. Setiap aspek dievaluasi dengan empat dimensi yaitu status saat ini, tren saat ini, tekanan yang ada dan ketangguhan. Empat dimensi ini digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengemasan laut dan polusi nutrisi (seperti tekanan) dan faktor institusional seperti daerah perlindungan laut (sebagai kontribusi terhadap ketahanan). Dengan demikian indeks kesehatan laut menyediakan *shorthand* indeks untuk status laut dunia dan area pesisir.

Disagregasi

SDSN mengusulkan bahwa indeks kesehatan samudra dikompilasi di tingkat nasional dan regional. Negara juga perlu memisahkan indeks menurut sistem laut utama.

Komentar dan Keterbatasan

Indeks dapat dihitung disetiap negara dan wilayah. Setiap dimensi indeks dinilai oleh masyarakat ahli lokal yang menentukan titik referensi yang tepat, hal ini yang menentukan tujuan dan pengukuran kemajuan yang dapat dipantau setiap tahun.

Ketersediaan di Indonesia

Untuk pertama kali pada tahun 2014, indeks ini menghitung skor untuk seluruh lautan global. Pada tahun-tahun sebelumnya, skor hanya dibuat untuk pesisir laut, yaitu dari garis pantai ke batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pesisir dan wilayah, yang didefinisikan sebagai 200nm lepas pantai. Pada tahun 2014, Antartika dan samudera selatan serta 15 daerah seperti yang didefinisikan oleh FAO juga dinilai dan memiliki skor sendiri dalam laporan OHI Partnership tahun 2013. Indeks ini dibuat dan dipublikasikan oleh OHI Partnership. Oleh karena itu, di Indonesia tidak perlu dikembangkan indikator ini karena indikator ini sudah tersedia yang dilaporkan secara global oleh OHI Partnership.

88. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Konsep dan Definisi

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman didefinisikan sebagai persentase tangkapan ikan yang dieksploitasi dalam tingkat produktivitas yang maksimum dan berkelanjutan. Indikator ini memberikan ukuran penting dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di dunia. Klasifikasi terhadap tangkapan ikan dikategorikan sebagai : *non-fully exploited*, *fully exploited*, dan *overexploited*. Tangkapan ikan dalam batas biologis yang aman adalah yang diklasifikasikan sebagai *non-fully exploited* dan *fully exploited*.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut wilayah dan global. Untuk disagregasi yang lain perlu ditinjau kembali. FAO telah membagi lautan dunia menjadi 21 wilayah statistik dan penilaian tangkapan ikan dilakukan berdasarkan wilayah statistik ini. Secara total, 584 tangkapan ikan dan spesies telah dipantau sejak tahun 1974.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Dalam pengelolaan sumber daya ikan, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dapat dihasilkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang dinilai menurut WPP. Indikator ini tidak tersedia setiap tahunnya, hanya pada tahun-tahun tertentu saja. Oleh karena itu, sistem statistik untuk menghasilkan indikator ini perlu dikembangkan lagi sehingga indikator ini dapat disajikan setiap tahunnya.

Indikator Tambahan:

- **[Penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak]**

Indikator ini berguna untuk mengetahui penggunaan teknik penangkapan ikan yang destruktif, seperti troli memancing. Indikator ini masih perlu dikembangkan dan ketersediaan data dapat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau melalui Survei Perusahaan Perikanan BPS pada variabel sarana penangkapan.

- **[Eutrofikasi muara utama]**

Meningkatnya limbah yang tidak diolah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menjadi eutrofikasi, pemekaran alga berbahaya (HAB) dan "zona mati". Oleh karena itu, tingkat

eutrofikasi perlu dipantau dalam semua muara utama. Indikator ini masih perlu dikembangkan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat bertanggungjawab terhadap ketersediaan data.

- **[Indikator pelaksanaan strategi perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut]**

Perencanaan tata ruang laut merupakan suatu cara untuk mendistribusikan (spasial dan temporal) aktivitas manusia di wilayah pesisir dan laut yang berguna untuk menjamin ekologi, kehidupan sosial dan untuk tujuan ekonomi yang diputuskan melalui proses publik dan politik. Indikator ini masih perlu dikembangkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bertanggungjawab terhadap ketersediaan data.

- **Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup**

Indikator ini mengukur area cakupan ekosistem terumbu karang yang hidup dalam perairan nasional. Untuk melihat kondisi terkait terumbu karang, data yang tersedia di Indonesia adalah data luas dan kondisi terumbu karang yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini dapat disajikan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Indonesia (melalui LIPI) telah memprakarsai Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) yang bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil penelitian COREMAP tersebut menghasilkan data kondisi terumbu karang dan persentase tutupan karang hidup.

Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Target 15A. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian

89. Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya

Konsep dan Definisi

Indikator ini berguna untuk mengetahui perubahan neto dari kawasan hutan dan perluasan pertanian ke ekosistem alam, serta hilangnya lahan pertanian produktif untuk pertumbuhan daerah perkotaan, industri, jalan, dan penggunaan lainnya, yang dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara. Hal ini diukur sebagai persentase perubahan per tahun. Intensifikasi agroekologi yang berkelanjutan juga akan memungkinkan peningkatan produksi pangan tanpa mengubah ekosistem alami menjadi lahan pertanian.

Lahan budidaya didefinisikan oleh FAO sebagai lahan yang ditanami oleh tanaman sementara, padang rumput sementara untuk menyabit atau padang rumput, lahan yang ditanami untuk kebutuhan pasar atau dapur, dan lahan sementara yang ditanami. Kawasan hutan adalah tanah yang ditanam pohon, tidak termasuk pohon dalam sistem produksi pertanian (misalnya perkebunan atau sistem *agroforestry*) dan pohon di taman kota dan kebun.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasikan secara spasial.

Komentar dan Keterbatasan

Indikator dapat diperluas juga untuk mencakup lahan basah atau ekosistem penting lainnya.

Ketersediaan di Indonesia

Data luas kawasan hutan dicatat setiap tahunnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan serta Tata Guna Hutan Kesepakatan. Data dapat dirinci menurut fungsi kawasan hutan seperti hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan taman buru. Yang termasuk kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi seperti hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Data tersedia sampai dengan level provinsi tetapi tahun data sesuai dengan tahun terbit SK masing-masing provinsi.

Target 15B. Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs

90. Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Konsep dan Definisi

Indikator perubahan tahunan di kawasan hutan dan kawasan lindung dengan keanekaragaman hayati memberikan informasi penting tentang perubahan kawasan hutan dan perlindungan kawasan hutan. Indikator yang berkaitan dengan hutan diperlukan untuk mengetahui penggunaan hutan untuk kegiatan ekonomi dan lainnya yang berkelanjutan. *Global Forest Resources Assessment 2010* telah mengusulkan indikator tersebut untuk mengukur persentase hutan dengan pengelolaan yang berkelanjutan.

Disagregasi

Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang kuat dapat memilah indikator ini secara spasial.

Komentar dan Keterbatasan

Tantangan untuk indikator ini adalah pada pembentukan definisi yang konsisten secara internasional tentang praktik pengelolaan hutan lindung. Indikator dan data dasar yang membentuknya masih perlu disempurnakan.

Ketersediaan di Indonesia

Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan merupakan perbandingan antara luas kawasan hutan lindung dan total luas kawasan hutan dalam persen. Indikator ini juga merupakan indikator MDGs. Sama seperti sumber data indikator sebelumnya, data untuk indikator ini diperoleh berdasarkan SK Menteri Kehutanan yang tersedia pada level nasional setiap tahun serta pada level provinsi sesuai dengan tahun SK.

Indikator Tambahan:

- **Peningkatan kepemilikan lahan dan tata kelola hutan**

Indikator ini merupakan persentase kawasan hutan dengan kepemilikan lahan yang jelas dan aman. Pendataan dan publikasi kepemilikan lahan kawasan hutan belum lengkap dilakukan

sehingga indikator belum bisa disediakan. Kementerian Kehutanan maupun BPN dapat bertanggungjawab atas ketersediaan indikator ini.

- **Indeks vitalitas pengetahuan lingkungan tradisional (VITEK)**

Indikator ini berguna untuk mengetahui tren sejauh mana pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat/asli dan lokal dihormati/dihargai dan terintegrasi dengan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indikator ini dibangun oleh organisasi non-profit Terralingua. Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi indikator ini. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di <http://www.terralingua.org/vitek/>.

- **[Indikator konservasi ekosistem gunung]**

Indikator ini berguna untuk mengetahui konservasi dan pengelolaan ekosistem gunung yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat menyediakan indikator setelah indikator dikembangkan sesuai dengan kesepakatan internasional.

Target 15C. Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat paling lambat pada 2020

91. Red List Index (menurut kelompok spesies utama dan negara, untuk Internationally Traded Species)

Konsep dan Definisi

Red List Index (RLI) merupakan indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepunahan kelompok laut dan spesies darat dalam waktu dekat (yaitu 10-50 tahun) dengan tidak adanya tindakan konservasi. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa risiko kepunahan suatu spesies meningkat. RLI juga digunakan untuk mengukur kemajuan menuju target Aichi 12 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati dan MDGs.

IUCN *Red List* adalah sistem yang paling memiliki reputasi untuk mengetahui status spesies yang terancam menurut tujuh kategori risiko yang berkisar dari “punah” sampai “kurang perhatian”. Kriteria untuk menentukan status risiko masing-masing spesies mudah dipahami bagi masyarakat umum. *Red List Index* ini telah dikembangkan untuk berbagai kelompok spesies utama, seperti amfibi dan burung, namun tetap terdapat kesenjangan, khususnya untuk kelompok spesies utama, seperti jamur.

Disagregasi

RLI dapat dipisahkan untuk tingkat regional dan nasional. Sebaiknya RLI nasional dan global dilaporkan untuk kelompok spesies utama. Dalam kasus negara-negara kecil yang mencakup bioma laut atau darat yang berdekatan, mungkin lebih tepat untuk melaporkan RLI regional dengan kelompok spesies utama.

SDSN mengusulkan bahwa RLI juga diterapkan untuk perdagangan internasional spesies darat dan laut yang diidentifikasi dalam lampiran I dan II dari Konvensi tentang Perdagangan Internasional dan Spesies Terancam Punah (CITES). RLI untuk spesies internasional yang diperdagangkan akan mengukur risiko kepunahan jangka pendek untuk spesies yang memiliki perdagangan internasional dan yang kelangsungan hidupnya.

Komentar dan Keterbatasan

Salah satu keterbatasan dari indikator ini adalah fokus pada spesies liar yang bertentangan dengan jenis-jenis yang biasa digunakan sebagai makanan atau untuk pertanian oleh manusia. Selain itu, indeks ini tidak mempertimbangkan status genetik spesies, indeks ini hanya mengambil satu aspek tentang keanekaragaman hayati.

Ketersediaan di Indonesia

RLI merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kepunahan suatu spesies. Data RLI tersedia di Indonesia dan dikumpulkan oleh IUCN pada level nasional. Data dipublikasikan secara rutin setiap empat atau lima tahun sekali.

92. Daerah keanekaragaman hayati yang dilindungi

Konsep dan Definisi

Kawasan lindung darat dan laut merupakan sarana penting untuk mengamankan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan ini menjadi juga menjadi indikator di bawah target Aichi. Sistem kawasan lindung global yang belum mencakup sampel yang representatif menjadi tidak efektif jika dijadikan target dalam perjanjian yang paling penting bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Target Aichi Biodiversity dari Konvensi Keanekaragaman Hayati menekankan adanya pengembangan ekologis yang mewakili sistem kawasan lindung dan perlindungan daerah yang penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Indikator ini dikembangkan oleh UNEP-WCMC yang berkolaborasi dengan beberapa organisasi lainnya.

Indikator ini merupakan gabungan dari tiga sub indikator yaitu tingkat perlindungan ekoregion darat dan laut dunia, tingkat perlindungan *Important Bird Areas* (IBAs) dan tingkat perlindungan *Alliance for Zero Extinction sites* (AZEs). Sub indikator dihitung berdasarkan lapisan dari ekoregion, IBAs dan AZEs dengan semua kawasan lindung yang ditetapkan dan dicatat dalam Database Kawasan Lindung Dunia. Database Kawasan Lindung Dunia merupakan dataset spasial global yang paling komprehensif mengenai kawasan lindung darat dan laut.

Disagregasi

Meskipun sebagian besar digunakan pada skala global, indikator ini dapat dihitung untuk daerah, negara, atau bahkan bioma. Dalam kasus negara-negara kecil meliputi ekoregion bersebelahan, representasi regional indikator ini mungkin akan lebih tepat.

Komentar dan Keterbatasan

Indikator ini dapat digunakan untuk menilai status perlindungan dan tren dalam perlindungan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai skala untuk mengukur respon kebijakan hilangnya keanekaragaman hayati. Indikator ini lebih kompleks daripada indikator MDG, tetapi memberikan informasi yang jauh lebih kaya tentang keadaan keanekaragaman hayati di negara-negara. Indikator ini sederhana dan non-komposit untuk mencakup kawasan lindung serta dapat diturunkan dengan hanya berfokus pada komponen pertama. Dengan menggunakan cakupan kawasan lindung akan menyederhanakan tugas negara tentang pengumpulan data. Selain itu, persentase kawasan lindung tidak menyediakan wawasan tentang apakah kawasan lindung penting untuk mengamankan keanekaragaman hayati regional.

Ketersediaan di Indonesia

Data untuk indikator ini masih tersedia pada level global oleh IUCN. Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengadopsi indikator ini sehingga dapat menyediakan data pada level nasional.

Indikator Tambahan:

- **Kelimpahan spesies asing yang masuk**

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah spesies asing yang masuk yang ditemukan di suatu negara. Kelimpahan spesies adalah jumlah suatu spesies pada area tertentu. Data ini belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi ketidakterersediaan data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Kementerian Kehutanan, atau lembaga lain yang terkait.

Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target 16A. Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik

93. Cedera dan kematian akibat kekerasan per 100.000 penduduk

Konsep dan Definisi

Statistik ini mengukur cedera dan kematian akibat kekerasan, termasuk serangan (pemukulan, pelecehan, pembakaran) dan kekerasan bersenjata tetapi bukan kecelakaan atau cedera yang diakibatkan diri sendiri, dinyatakan dalam unit per 100.000 penduduk. SDSN mengusulkan adanya cedera, karena ada banyak bentuk kekerasan yang tidak mengakibatkan kematian.

Disagregasi

Data ini merupakan cerminan dari tingkat kekerasan di negara tertentu dan harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (untuk membedakan kekerasan terhadap perempuan), usia (untuk mengidentifikasi kekerasan terhadap anak), berdasarkan etnisitas (untuk melacak kemungkinan genosida), dan geografi (untuk mengidentifikasi daerah kekerasan dan untuk melacak kejahatan perkotaan). Selain itu, tingkat pembunuhan akibat konflik bersenjata yang disengaja harus dilaporkan secara terpisah dari kematian.

Komentar dan Keterbatasan

Tingkat kematian banyak dikaitkan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti halnya dengan tingkat kekerasan. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengumpulkan data statistik tahunan mengenai pembunuhan yang disengaja dan WHO mengumpulkan data tentang cedera. Namun, laporan dan realibilitas data nasional dari beberapa negara bervariasi, terutama bagi negara-negara yang mengalami konflik.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator mengenai kekerasan yang tersedia dan dijadikan indikator proksi adalah jumlah desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka). Keterangan

perkelahian massal diperoleh melalui PODES berdasarkan jenisnya yaitu perkelahian antar kelompok warga, warga antar desa kelurahan, warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintahan, antar pelajar/ mahasiswa, antarsuku, dan lainnya. Data ini dapat disediakan sampai dengan level provinsi. Karena keterbatasan indikator ini sebagai indikator proksi, PODES diharapkan dapat memiliki indikator baru yang menggambarkan kekerasan berupa jumlah korban (meninggal dan luka-luka) ini dan juga diharapkan rinci sehingga bisa didisagregasi.

94. **Pengungsi dan pengungsian internal akibat konflik dan kekerasan**

Konsep dan Definisi

Indikator ini berguna untuk jumlah pengungsi akibat konflik atau kekerasan, termasuk pendatang dari bencana alam atau sebab-sebab lainnya. Indikator ini meliputi pengungsi di daerah perbatasan nasional serta pengungsi internal. Indikator ini mengukur populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah orang yang terlantar sebagai persentase dari total penduduk negara tersebut. Pengasingan dan perpindahan akibat konflik atau kekerasan dapat merusak proses perdamaian dan kemungkinan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan suatu daerah ketika pengungsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga akibat konflik penduduk lokal.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut jenis kelamin, umur, agama, dan asal-usul kebangsaan dan etnis.

Komentar dan Keterbatasan

Sulit untuk mendapatkan angka yang akurat karena populasi yang terus berfluktuasi dan tidak ada definisi internasional yang seragam.

Ketersediaan di Indonesia

Sumber data untuk indikator ini dapat menggunakan laporan dari IDMC. Lembaga internasional IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) merupakan lembaga yang menjadi sumber utama informasi dan analisis mengenai pengungsian internal. Indikator mengenai pengungsi dan pengungsian internal yang dianalisis berasal dari data yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), LSM internasional, dan masyarakat sipil. Data pengungsi dan pengungsian internal belum tersedia secara akurat sehingga sulit untuk didisagregasi baik menurut umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

Sementara itu, sejumlah program yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir oleh badan-badan lokal dan internasional di provinsi-provinsi seperti Aceh, Maluku dan Nusa Tenggara Timur membuat sebagian data menjadi tersedia sampai level provinsi.

95. **Persentase darurat banding PBB yang disampaikan**

Alasan dan Definisi

Bantuan Darurat PBB adalah permohonan dana kemanusiaan darurat dari PBB yang digunakan untuk mendukung penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi akibat konflik atau bencana selama tiga sampai enam bulan pertama dari situasi krisis. PBB mengeluarkan permohonan dana ini kepada negara-negara anggota dan donor lainnya. Indikator akan menunjukkan seberapa jauh bantuan tersebut mendanai negara-negara yang rentan. Hal ini juga berfungsi

sebagai ukuran langsung dari dukungan internasional untuk situasi krisis di negara-negara yang rentan.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

Keterbatasan utama dari indikator ini adalah tidak dapat mengevaluasi efektivitas atau dampak dari bantuan.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan indikator internasional yang menggambarkan permohonan dana kemanusiaan dari PBB untuk negara-negara anggota dan lainnya.

Indikator Tambahan:

- **[Indikator anak putus sekolah karena konflik atau bencana alam]**

Indikator ini mengukur persentase anak usia sekolah putus sekolah karena konflik, ketidakamanan, atau bencana. Kementerian Pendidikan dapat mengatasi ketersediaan data setelah indikator dikembangkan.

- **Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka**

Persentase perempuan dan laki-laki yang melaporkan bahwa mereka merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah di mana mereka tinggal. Hal ini penting untuk memahami pengalaman warga terhadap keamanan pribadi dalam beradaptasi dengan layanan keamanan dan keadilan. Indikator ini merupakan salah satu dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Gallup, dan Indonesia termasuk dalam negara yang disurvei tersebut.

- **Frekuensi pembayaran gaji pasukan keamanan**

Indikator ini mengukur frekuensi dan keteraturan yang dilakukan anggota pasukan polisi dan militer dalam menerima gaji penuh mereka. Hal ini mencerminkan sumber daya dan kapasitas pemerintah. Keterlambatan pembayaran sebagian gaji dikenal sebagai faktor kekerasan dan konflik. Sebelumnya, memang belum ada publikasi terkait indikator ini. Namun, indikator ini dapat dibentuk dan di publikasikan, dan TNI dan Kepolisian RI dapat memberikan informasi.

- **[Indikator kerjasama internasional dalam mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan]**

Indikator ini akan berfungsi untuk mengetahui kerja sama internasional untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan.

- **[Indikator reformasi sektor keamanan]**

Reformasi sektor keamanan pasca konflik sangat penting untuk membangun perdamaian abadi. Indikator perlu dikembangkan untuk mengukur sejauh mana institusi keamanan yang efektif dan akuntabel.

Target 16B. Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu pada tahun 2020, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan

96. Persepsi korupsi di sektor publik

Konsep dan Definisi

Korupsi di sektor publik merupakan hambatan bagi pembangunan, upaya pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi sulit diukur karena data obyektif cenderung sangat lengkap dan sulit untuk dibandingkan. *Transparency International* (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global yang bekerja untuk memerangi korupsi dan telah mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Peringkat indeks persepsi korupsi negara-negara didasarkan atas seberapa korup sektor publik mereka (administrasi dan politik). Indeks ini merupakan indeks komposit berbasis data persepsi terkait korupsi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka. Indeks ini mencerminkan pandangan pengamat dari seluruh dunia, termasuk para ahli yang tinggal dan bekerja di negara dan wilayah yang dievaluasi.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indeks ini sudah tersedia untuk hampir seluruh negara. CPI yang dihitung oleh TI setiap tahun sejak 1995 pada level nasional untuk dapat dibandingkan dengan negara lain. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Selain itu, perwakilan TI di Indonesia juga menghitung CPI atau IPK pada beberapa kota di Indonesia. Berbeda dengan CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap responden pelaku bisnis. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Nilai IPK berada pada rentang 0-10, dimana 0 sangat korup dan 10 sangat bersih. IPK kota di Indonesia dihitung sejak tahun 2004 setiap 2 tahun sekali.

97. Aset dan kewajiban Bank for International Settlements (BIS) melaporkan bank di havens pajak internasional (sesuai definisi OECD), menurut negara

Konsep dan Definisi

Indikator ini menunjukkan sejauh mana aset dan kewajiban bank secara geografis pada suaka pajak internasional. *Bank for International Settlements* (BIS) melaporkan data kuartalan, dengan menggunakan prinsip yang konsisten dengan neraca pembayaran. Data dilaporkan pada level kantor pusat bank negara. BIS telah mempengaruhi banyak negara untuk melaporkan data, termasuk bebas pajak.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut suaka pajak dan jenis aset keuangan.

Komentar dan Keterbatasan

Data global dari waktu ke waktu ini menunjukkan posisi bebas pajak sebagai pusat keuangan telah berubah, meskipun informasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai perilaku ilegal, hal ini menggambarkan ukuran aktivitas keuangan pada suaka pajak.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dihasilkan oleh BIS. Sehingga data ini bisa dibentuk dan disediakan oleh BIS.

98. Penerbitan semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pada kontrak berbasis sumber daya

Konsep dan Definisi

Investasi skala besar dalam proyek-proyek sumber daya alam, seperti pertambangan atau konsesi lahan, sering diatur dalam aturan fiskal yang kompleks yang membuat sulit para pemangku kepentingan untuk mengetahui besar sewa terkait pembayaran pajak. Kurangnya transparansi terhadap pajak dan sewa yang dibayarkan kepada pemerintah melemahkan akuntabilitas publik dan meningkatkan peluang untuk korupsi atau manajemen yang buruk terhadap pendapatan negara dari sumber daya. Transparansi pembayaran yang dilakukan pemerintah akan memperkuat kesempatan pengawasan publik untuk investasi sumber daya dan transfer serta penggunaan aliran pendapatan. Indikator ini mengukur publikasi pembayaran kepada negara sebagai tuan rumah atas kontrak sumber daya. Dalam hal ini termasuk pajak, royalti, dividen, bonus, biaya lisensi, pembayaran untuk perbaikan infrastruktur, pembayaran dalam bentuk lainnya yang signifikan dan menguntungkan.

Indikator ini melacak publikasi pemerintah sebagai penerimaan pendapatan minyak, gas, pertambangan, tanah, pertanian dan proyek-proyek kehutanan, serta keberadaan dan pelaksanaan persyaratan pemerintah terhadap perusahaan yang mempublikasikan pembayaran dengan kategori yang sama pada kontrak-kontraknya. Untuk negara-negara tuan rumah, data yang mencakup semua pendapatan yang diterbitkan, dipilah menurut sektor, perusahaan, dan jenis pendapatan. Berdasarkan indeks, negara tuan rumah akan diranking sebagai berikut:

- 100 : Pemerintah menerbitkan semua pendapatan sumber daya dipisahkan menurut perusahaan dan kategori,
- 67 : Pemerintah menerbitkan semua pendapatan sumber daya berdasarkan kategori, tetapi tidak menurut perusahaan,
- 33 : Pemerintah menerbitkan beberapa, tidak semua pendapatan sumber daya,
- 0 : Pemerintah tidak mempublikasikan pendapatan sumber daya.

Untuk negara asal, indeks akan mengungkapkan apakah semua perusahaan yang berdomisili di suatu negara diwajibkan untuk secara sistematis mengungkapkan pembayaran kepada pemerintah asing untuk investasi sumber daya alam. Ini akan menunjukkan apakah persyaratan berlaku untuk semua perusahaan yang berdomisili atau perusahaan yang terdaftar di bursa saham utama, untuk sektor yang berlaku persyaratan, apakah pelaporan diperlukan berbasis *country bu country* atau *project-by-project*, apakah jenis pembayaran harus terpilah, dan

apakah ada ambang batas pembayaran yang harus dilaporkan. Untuk negara asal, indeks akan dilaporkan sebagai berikut:

- 100 : Pemerintah mengharuskan semua perusahaan yang berdomisili untuk mengungkapkan pembayaran investasi sumber daya alam berdasarkan kategori berbasis *project-by-project*,
- 67 : Pemerintah membutuhkan emiten perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran untuk investasi sumber daya alam berdasarkan kategori berbasis *project-by-project*,
- 33 : Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran berdasarkan negara, tetapi berbasis *project-by-project*,
- 0 : Pemerintah tidak memerlukan pengungkapan pembayaran oleh perusahaan berdomisili.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut industri dan komoditi.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Di Indonesia selama ini belum ada sistem yang mengatur publikasi semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pada kontrak berbasis sumber daya. Oleh karena itu, agar indikator ini dapat tersedia di Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk aturan dan sistem agar kontrak-kontrak berbasis sumber daya dapat dipublikasikan sehingga kedepannya indikator ini dapat tersedia.

Indikator Tambahan:

- **[Indikator total arus keuangan terlarang]**

Indikator ini akan menelusuri arus keuangan terlarang masuk dan keluar negara.

- **[Kepatuhan dengan OECD atau Konvensi Anti Suap lainnya]**

Indikator ini masih perlu dikembangkan. Selain itu, belum ada penjelasan rinci mengenai indikator ini dari SDSN.

Target 16C. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial

99. Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang lahir terdaftar dengan otoritas sipil

Konsep dan Definisi

Di banyak negara berkembang, hampir sebagian besar kelahiran dari anak-anak tidak terdaftar. Mendaftarkan kelahiran sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Pencatatan kelahiran gratis adalah titik awal kunci untuk pengakuan dan perlindungan hak setiap orang untuk identitas dan eksistensi. Kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran baik karena sistem

administrasi tidak cukup, diskriminasi, atau isolasi merupakan penyebab utama pengucilan sosial. Dengan memastikan pendaftaran semua kelahiran, negara akan meningkatkan peluang penduduk untuk mengakses layanan, kesempatan dan kemampuan mereka untuk menelusuri statistik kesehatan (angka kematian bayi, cakupan vaksinasi, dan lain-lain).

Disagregasi

Data ini dapat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, kecacatan, status adat, dan lokasi geografis untuk mengidentifikasi diskriminasi penduduk.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Kepemilikan akte kelahiran terdeteksi pada Susenas dengan pertanyaan untuk anggota rumah tangga umur 0-17 tahun apakah mempunyai akta kelahiran dari kantor catatan sipil. Disagregasi data dapat berdasarkan umur (balita), jenis kelamin, dan wilayah geografis. Disagregasi tidak bisa dilakukan berdasarkan agama dan disabilitas.

100. Kepatuhan terhadap rekomendasi dari Universal Periodic Review dan perjanjian PBB

Konsep dan Definisi

Indikator ini menilai sejauh mana keterlibatan negara dengan mekanisme HAM PBB. *Universal Period Review* (UPR) adalah *peer review* yang dilakukan oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB. Kelompok Kerja UPR mendalami apa yang negara telah dilakukan untuk meningkatkan hak asasi manusia dan memenuhi hak-hak asasi mereka. Setiap negara anggota PBB akan dikaji setiap 4,5 tahun. Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB adalah badan ahli kuasa-hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian hak asasi manusia. Ketika negara meratifikasi perjanjian, ia berkewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada badan perjanjian yang relevan.

Baik UPR maupun masalah Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB memerlukan negara untuk melakukan perubahan administratif, legislatif, atau yudikatif yang memungkinkan realisasi penuh atas hak asasi manusia. Indikator ini kemudian akan mengukur sejauh mana negara telah terlibat dalam mengadopsi rekomendasi dari kedua proses tersebut.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan perjanjian.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Kedua indikator di atas merupakan indikator dari UN OHCHR, dan data tersedia untuk 197 negara PBB termasuk Indonesia.

101. [Indikator kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan asosiasi]

Alasan dan Definisi

Kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas, untuk berkumpul secara damai, dan untuk mengasosiasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting untuk mencapai masyarakat yang damai dan inklusif. Indikator untuk kebebasan berekspresi mencakup langkah-langkah dari kebebasan pers, seperti sensor, persepsi kebebasan pers, dan intimidasi, pelecehan atau penjara bagi para jurnalis. Kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat mencakup langkah-langkah apakah kebebasan tersebut dijamin dalam hukum dan dihormati pada prakteknya.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Untuk mengukur kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan asosiasi dapat digunakan Indeks Demografi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada 3 aspek dan 11 variabel yang terdapat di IDI. Aspek yang relevan dengan indikator 94 adalah aspek kebebasan sipil. Variabel dari aspek kebebasan sipil yang dapat digunakan adalah kebebasan berkumpul dan berserikat dan kebebasan berpendapat. Masing-masing variabel memiliki dua indikator. Data skor indikator tersebut dapat disajikan pada level provinsi.

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target 17A. Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

102. Rata-rata tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju pada produk pertanian dan tekstil dan pakaian dari negara-negara berkembang

Konsep dan Definisi

Indikator MDG ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengurangi atau menghilangkan tarif (bea masuk yang menjadi hambatan keuangan untuk impor) dalam tiga sektor (pertanian, tekstil dan pakaian) yang sangat penting bagi negara berkembang dan negara miskin. Menghapus tarif negara maju, khususnya di sektor ini yang mencakup sebagian besar ekspor negara berkembang, bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi menurut sektor dan kategori produk.

Komentar dan Keterbatasan

Indikator ini tidak menangkap hambatan perdagangan non tarif seperti standar teknis atau peraturan lainnya.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan indikator untuk negara maju.

- 103. Laporan tahunan yang dibuat oleh Bank for International Settlements (BIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual Property Organization (WIPO), dan World Trade Organization [organisasi lain yang diperlukan tentang hubungan antara aturan internasional dan SDGs]**

Konsep dan Definisi

Indikator ini menunjukkan penilaian lembaga-lembaga internasional tentang apakah aturan internasional konsisten dengan pencapaian SDG. Laporan juga harus menjelaskan pilihan untuk perbaikan untuk membuat aturan yang konsisten dengan pencapaian tujuan. Institusi dan laporan yang tercakup dalam indikator ini meliputi:

BIS : Laporan standar peraturan keuangan internasional.

IASB : Laporan standar akuntansi internasional.

IFRS : Laporan standar pelaporan keuangan internasional.

IMF : Laporan sistem keuangan internasional.

WIPO : Laporan rezim kekayaan intelektual internasional.

WTO : Laporan pada sistem perdagangan internasional.

Atau laporan dari organisasi-organisasi lain juga dapat ditambahkan ke indikator ini.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

Keterbatasan mengenai indikator ini perlu ditinjau setelah indikator telah dibangun.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator berupa laporan-laporan dari organisasi internasional.

- Target 17B. Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap pendapatan nasional sebanyak 0,7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi**

- 104. Bantuan pembangunan resmi (ODA) dan hibah swasta netto dalam Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi di dunia**

Konsep dan Definisi

Indikator ini mengukur bantuan resmi pembangunan (ODA) ditambah hibah swasta bersih sebagai bagian dari PNB negara-negara berpendapatan tinggi. Target nilai ODA adalah sebesar 0,7% dari PNB.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan tujuan, sektor, dan dimensi lain yang dilaporkan di bawah database DAC.

Komentar dan Keterbatasan

Komite Bantuan Pembangunan OECD sedang merevisi dan memperbaiki indikator ODA agar lebih mencerminkan upaya penyedia untuk pengembangan, menjelaskan penerimaan sumber daya penerima, dan mengatasi beberapa kelemahan dari tindakan ODA saat ini. Langkah-langkah baru ini juga berpotensi memungkinkan untuk pemantauan yang lebih komprehensif pembangunan eksternal untuk tujuan global atau barang publik.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini untuk negara berpendapatan tinggi. Bank Dunia mengeluarkan klasifikasi pendapatan negara-negara yang terdapat di seluruh dunia berdasarkan estimasi pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita mulai tahun 2013. Berdasarkan klasifikasi World Bank, Indonesia berada dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah-bawah, seperti Filipina, Laos dan Vietnam.

105. Pendapatan domestik yang dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam persen terhadap Pendapatan Nasional Bruto

Konsep dan Definisi

Indikator ini berguna untuk mengetahui alokasi sumberdaya pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari PNB. Data dapat dikumpulkan secara internasional oleh IMF, yang harus menentukan kategori belanja pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan (misalnya pengeluaran paling militer dan beberapa subsidi harus dikeluarkan). Setelah kategori pengeluaran pemerintah yang relevan telah ditetapkan, indikator dapat dikompilasi untuk semua negara. Secara umum, semakin kaya suatu negara, belanja pemerintah yang lebih tinggi sebagai bagian dari PNB. Masuk akal bahwa negara-negara mengalokasikan setidaknya 15-20% dari PNB sebagai pengeluaran pemerintah.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini dapat dikumpulkan oleh IMF secara internasional dengan level penyajian sampai level nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung penyediaan data melalui kementerian keuangan dan BPS agar indikator ini dapat disajikan.

106. Arus netto swasta untuk pembangunan berkelanjutan pada harga pasar dalam bentuk proporsi dari Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi

Konsep dan Definisi

Keuangan swasta internasional sangat penting untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Keuangan swasta tertentu dapat mendanai pengembangan sektor swasta (termasuk

pertanian) dan infrastruktur. Indikator yang diusulkan akan menelusuri aliran dana swasta internasional dengan harga pasar menggunakan definisi Komite Bantuan Pembangunan OECD, yang meliputi: investasi langsung, pinjaman bank internasional (jatuh tempo > satu tahun), pinjaman obligasi (*maturity* > 1 tahun), dan arus lain (kepemilikan terutama dilaporkan ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara penerima bantuan).

Disagregasi

Dapat didisagregasi berdasarkan tujuan, jenis aliran swasta.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator untuk negara berpendapatan tinggi.

107. **Persen bantuan pembangunan resmi (ODA), hibah swasta netto dan pembiayaan iklim resmi yang disalurkan melalui prioritas yang dikumpulkan dengan mekanisme pembiayaan multilateral**

Alasan dan Definisi

Indikator ini berguna untuk mengetahui pangsa bantuan dan pendanaan iklim resmi yang melewati mekanisme *pooling* multilateral berikut, diantaranya *Global Alliance for Vaccine Initiative* (GAVI), *Global Environment Facility* (GEF), the Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB, and Malaria, *Green Climate Fund*, *International Development Association* (IDA), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), UNFPA, UNICEF, [mekanisme lain yang akan ditambahkan, misalnya untuk pendidikan, pertanian, transfer teknologi]. Mekanisme pencairan ini menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah untuk penerima dan donor. Mereka juga dapat memastikan skalabilitas yang lebih besar dari aliran bantuan. Indikator ini perlu disediakan untuk setiap negara berpenghasilan tinggi.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi dengan mekanisme multilateral.

Komentar dan Keterbatasan

Komite Bantuan Pembangunan OECD sedang merevisi dan memperbaiki indikator pada ODA. Hal ini dapat membantu meningkatkan ukuran ini.

Ketersediaan di Indonesia

Indikator untuk negara berpendapatan tinggi.

Indikator Tambahan:

- **[Dukungan total resmi untuk pembangunan]**

Indikator ini merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh OECD untuk mengukur semua upaya publik dalam mendukung pengembangan agenda pembangunan yang lebih luas.

Target 17C. Memperkuat sarana dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

108. [Indikator investasi pada data dan pemantauan]

Alasan dan Definisi

Untuk menjadi alat manajemen dan rapor yang efektif, SDGs perlu didukung oleh kualitas data yang dilaporkan setiap tahun. Hal ini akan membutuhkan investasi yang signifikan untuk meningkatkan instrumen pengukuran yang ada (misalnya untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan disagregasi), membuat instrumen baru, dan membangun kapasitas kantor statistik negara, terutama di negara miskin, dan lembaga statistik internasional. Indikator investasi di data dan monitoring bisa menelusuri investasi langsung dalam program tersebut, atau mengukur investasi sebagai bagian dari ODA atau GNI.

Disagregasi

-

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

-

109. Kesejahteraan evaluatif dan *positive mood affect*

Alasan dan Definisi

Ukuran kesejahteraan evaluatif ini dapat menangkap penilaian reflektif kepuasan secara keseluruhan individu dengan kehidupannya. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai ukuran kesejahteraan evaluatif adalah *Self-Anchoring Striving Scale* atau yang dikenal dengan Tangga Cantril. Skala ini meminta responden untuk membayangkan sebuah tangga dengan langkah-langkah bernomor 0 (bawah) sampai 10 (atas), dengan 10 yang mewakili kemungkinan kehidupan yang paling baik dan 0 yang paling buruk.

Tangga Cantril dapat mengevaluasi kehidupan individu-individu yang dilengkapi dengan "*Positive Mood*", yang mengukur naik turunnya emosi sehari-hari. Meskipun laporan emosional jangka pendek membawa informasi jauh lebih sedikit tentang keadaan hidup daripada evaluasi kehidupan, hal ini sangat berguna untuk mengungkapkan sifat dan kemungkinan penyebab perubahan suasana hati pada jam demi jam atau hari demi hari.

Disagregasi

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Komentar dan Keterbatasan

-

Ketersediaan di Indonesia

Indikator ini merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur kepuasan secara keseluruhan individu dengan kehidupan. Di Indonesia sudah ada indeks kebahagiaan yang juga dapat dijadikan ukuran kepuasan keseluruhan individu dengan kehidupannya. Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang dan mencakup indikator

kepuasan terhadap 10 domain kehidupan yang esensial. Sepuluh domain secara substansial dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan, meliputi kepuasan terhadap pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan dan kondisi keamanan. Indeks kebahagiaan merupakan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh BPS yang dirancang untuk merepresentasikan tingkat kebahagiaan kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga. Survei ini merupakan survei yang baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2013 dengan level penyajian indeks ini hanya pada tingkat nasional. Walaupun begitu, indeks ini dapat disajikan menurut karakteristik ekonomi dan demografi.

Indikator Tambahan:

- **Pengeluaran domestik bruto pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk proporsi dari PDB**

Indikator ini mencakup semua pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah nasional. Indikator ini belum tersedia di Indonesia tetapi dapat dikembangkan oleh BPS.

- **[Indikator keberlanjutan utang]**

Indikator ini berguna untuk melacak keberlanjutan utang suatu negara. Data untuk indikator ini nantinya dapat diperoleh melalui Kementerian Keuangan.

- **[Indikator difusi teknologi]**

Indikator ini akan mengukur difusi teknologi di seluruh negara.

- **[Indikator penciptaan/berlangganan *Technology Bank* dan mekanisme *capacity building* STI (*science, technology, and innovation*) untuk negara kurang berkembang tahun 2017]**

Indikator ini akan menelusuri kemajuan menuju operasionalisasi *Technology Bank* dan mekanisme *capacity building* STI untuk negara kurang berkembang. Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh PBB.

PENUTUP



<http://www.bps.go.id>

Dari 17 tujuan SDGs, terdapat 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan yang diusulkan pada publikasi SDSN. Indikator utama dan tambahan untuk SDGs tersebut dapat dipetakan ke dalam 40 target. Dari indikator usulan SDSN tersebut terdapat 73 indikator utama dan 62 indikator tambahan yang tersedia di Indonesia. Berkurangnya jumlah indikator disebabkan ketidakterediaan indikator, adanya indikator untuk lembaga tertentu, indikator global/internasional, indikator untuk negara maju (*developed country*), dan untuk negara berpendapatan tinggi (*high income country*).

Bab 5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan mengenai tujuan, target, serta indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berikut beberapa butir pokok yang dapat disarikan:

- Dari 17 tujuan SDGs, terdapat 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan yang diusulkan pada publikasi SDSN. Indikator utama dan tambahan untuk SDGs tersebut dapat dipetakan ke dalam 40 target.
- Dari indikator usulan SDSN tersebut terdapat 73 indikator utama dan 62 indikator tambahan yang tersedia di Indonesia. Berkurangnya jumlah indikator disebabkan ketidakterediaan indikator, adanya indikator untuk lembaga tertentu, indikator global/ internasional, indikator untuk negara maju (*developed country*), dan untuk negara berpendapatan tinggi (*high income country*).
- Indikator yang tersedia bersumber dari beberapa kementerian/ lembaga berupa registrasi, dan banyak juga dari sensus/ survei yang dilakukan oleh BPS. Selain itu juga diperoleh dari lembaga internasional karena merupakan indikator khusus yang dibangun dan dihitung agar bisa dibandingkan antarnegara.
- Dari indikator yang tersedia, masih terdapat banyak keterbatasan terkait level dan periode penyajian serta disagregasi data yang belum rinci.

5.2. Saran

Berdasarkan ketersediaan indikator dan kelengkapan data, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

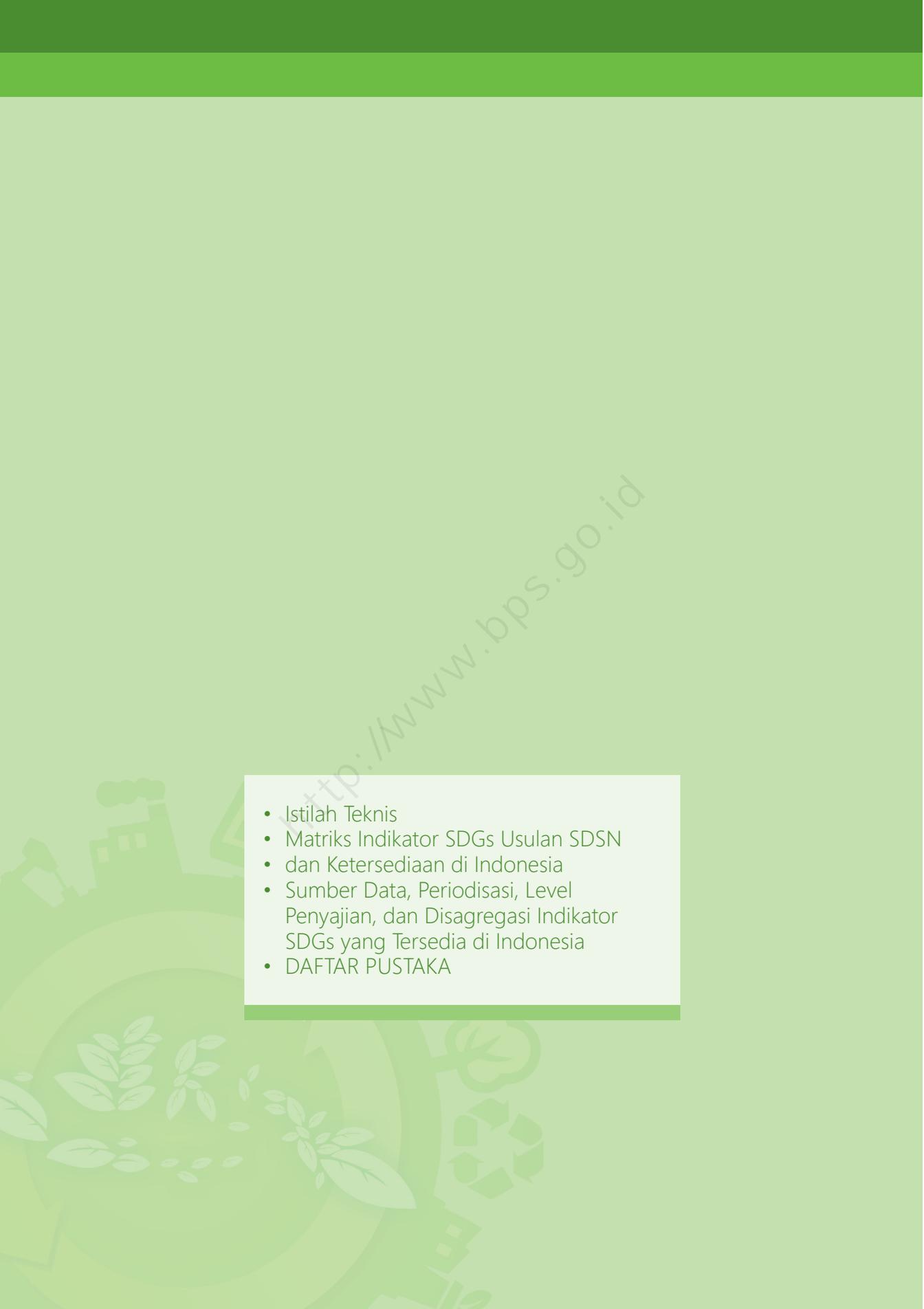
1. Persiapan untuk memantau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan membutuhkan adanya revolusi data seperti memperkuat kapasitas dan kualitas pengumpulan data. Diharapkan kementerian/ lembaga sebagai penanggungjawab atas ketersediaan data dapat memperluas cakupan pengumpulan data yang dapat merujuk pada keterangan dan disagregasi tiap indikator pada publikasi ini.
 - BPS dapat melakukan pertimbangan untuk perluasan cakupan pengumpulan data dengan menambahkan indikator baru yang rutin dikumpulkan seperti prevalensi kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak, akses penduduk terhadap infrastruktur jalan yang andal, akses penduduk terhadap transportasi umum, penduduk dengan aset (tanah dan rumah) yang disertifikasi, cedera dan kematian akibat kekerasan, rasio Palma, dan indikator lainnya.
 - BPS dapat mengembangkan beberapa indikator seperti indikator kemiskinan multidimensi ekstrim (revisi dari MPI), Angka Harapan Hidup Sehat saat Lahir, Indeks

Perkembangan Anak Usia Dini, Indeks Pekerjaan Layak, Indeks Kinerja infrastruktur TIK, Indikator di bidang penelitian dan pengembangan atau STI, dan sebagainya.

- Indikator pendidikan masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pemantauan tujuan pembangunan berkelanjutan. BPS maupun Kementerian Pendidikan diharapkan dapat memperbaiki cakupan data seperti ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sekolah dan ukuran kemampuan/ penguasaan siswa sekolah dasar dan menengah di berbagai keterampilan dan matematika.
 - Indikator kesehatan walaupun sudah cukup lengkap tetapi masih ada keterbatasan seperti ketidakterediaan data yang lengkap mengenai kematian akibat malaria, probabilitas kematian akibat PTM, wanita hamil yang menerima malaria IPT, wanita dengan *screening* kanker serviks, dan sebagainya. Sehingga diharapkan Kementerian Kesehatan dapat melengkapi data dan membentuk indikator yang lebih baik untuk mengganti beberapa indikator proksi yang digunakan.
 - Beberapa indikator mengenai lingkungan hidup juga masih memerlukan pengumpulan data yang lebih lengkap seperti data intensitas CO₂, kepemilikan lahan dan tata kelola hutan, daerah keanekaragaman hayati yang dilindungi, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat beberapa indikator yang perlu dikembangkan dan dapat menjadi pertimbangan untuk Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian ESDM.
2. Publikasi ini merupakan kajian awal, sehingga diharapkan ada kajian lanjutan yang lebih sempurna dan mengacu pada SDSN maupun lembaga internasional terkait lainnya, untuk memantau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan diadopsi pemerintah pada September tahun 2015 mendatang.

LAMPIRAN



- 
- <http://www.bps.go.id>
- Istilah Teknis
 - Matriks Indikator SDGs Usulan SDSN dan Ketersediaan di Indonesia
 - Sumber Data, Periodisasi, Level Penyajian, dan Disagregasi Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia
 - DAFTAR PUSTAKA

Istilah Teknis

Angka Kematian Neonatal

Banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Angka Kematian Bayi

Banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain (Budi, Utomo, 1985).

Angka Melek Huruf (AMH)

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Bantuan Pembangunan Resmi (ODA)

Statistik yang disusun oleh Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) untuk mengukur aliran bantuan internasional.

Case Detection Rate (CDR)

Angka penemuan kasus TB Paru BTA+ merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan upaya pendeteksian kasus. Indikator ini menggambarkan proporsi antara penemuan TB Paru BTA+ terhadap jumlah perkiraan kasus TB Paru.

Degradasi

Terjadinya penurunan kemampuan tanah secara aktual maupun potensial untuk memproduksi barang dan jasa.

Desertifikasi

Tipe degradasi lahan di mana lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga kehidupan liar.

Eutrofikasi

Masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat (PO_3^-), khususnya dalam ekosistem air tawar, atau pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem air.

Insiden

Jumlah kasus baru dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan populasi yang berisiko.

Jalan segala cuaca/ *all-weather road*

Jalan beraspal yang dibangun dari bahan yang tidak menciptakan lumpur saat hujan.

Jalan segala musim/ *all-season road*

Jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun dengan sarana transportasi umum pedesaan (misal pick-up atau truk yang tidak beroda empat). Gangguan seperti cuaca buruk (misalnya hujan lebat) yang berlangsung singkat dapat diterima, terutama di jalan-jalan yang bervolume rendah

Penyakit Tropis Terabaikan/ *Neglected Tropical Diseases*

Jenis penyakit tropis terabaikan menurut WHO adalah *dengue*, *rabies*, *trakom*, *buruli ulcer*, *treponematoses*, lepra, penyakit chagas, *human African trypanosomiasis*, *leishmaniasis*, *cysticercosis*, *dracunculiasis*, *echinococcosis*, infeksi *trematode* lewat makanan, *lymphatic* filiarisis (kaki gajah), *onchocerciasis*, *schistosomiasis*, dan cacing perut.

Prevalensi

Jumlah kejadian penyakit dalam kurun waktu 1 tahun dibanding dengan jumlah populasi.

Success Rate (SR)

Persentase kasus baru BTA positif yang sembuh plus pengobatan lengkap di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati

Terapi Antiretroviral (ART)

Terapi untuk orang yang terinfeksi HIV dengan menggunakan obat anti-HIV.

Tingkat daya beli (PPP)

Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang atau jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi

Tingkat Elastisitas Energi

Persentase pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai persentase tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Tingkat Intensitas Energi

Perbandingan volume penggunaan energi nasional (Ton Oil Equivalent) terhadap nilai Produk Domestik Bruto. Merupakan salah satu indeks makro yang menyatakan seberapa efisien pemanfaatan energi di suatu negara untuk menghasilkan nilai tambah ekonominya.

<http://www.bps.go.id>

Matriks Indikator SDGs Usulan SDSN dan Ketersediaan di Indonesia

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
Tujuan 1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan		
Target 1A. Mengakhiri kemiskinan ekstrem, termasuk kemiskinan absolut (kurang dari \$ 1,25 per hari)		
1	Persentase penduduk dengan daya beli dibawah \$1,25 (PPP) per hari	Persentase penduduk dengan daya beli dibawah \$1,25 (PPP) per hari
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan
3	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial
4	[Persentase penduduk yang mengamali kemiskinan multidimensi ekstrem]	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kedalaman kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kedalaman kemiskinan
Target 1B. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah pedesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana		
5	Persentase perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki hak atas lahan, diukur dengan (i) persentase yang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase yang tidak takut akan penyitaan terhadap lahannya	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat di pedesaan, Persentase realisasi terhadap target sertifikasi tanah di pedesaan, indikator proksi
6	Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut perkotaan/pedesaan (dalam US\$ dan korban jiwa)	Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia, Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan \$US
	<ul style="list-style-type: none"> [Indeks Pengurangan Resiko Bencana] Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan perbankan (termasuk mobile banking) 	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator perlu dikembangkan] Persentase penduduk terhadap akses jasa keuangan formal/perbankan, dan Persentase rumahtangga yang menerima kredit usaha
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan		
Target 2A. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang, dan stunting pada anak		
7	Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum	Persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1400 dan 2000 kkal per kapita per hari)
8	[Persentase penduduk yang kekurangan salah satu dari mikronutrien (vitamin dan mineral) berikut: zat besi, zink, yodium, vitamin A, folat dan vitamin B12]	[Indikator perlu dikembangkan]

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
9	Prevalensi balita dengan keadaan stunting (tinggi badan kurang)	Prevalensi balita dengan keadaan stunting
	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi kalori dari bahan pangan non-pokok 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi jumlah kalori dari bahan pangan non-pokok
	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi anemia pada perempuan usia subur yang tidak hamil 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi anemia pada perempuan usia subur yang tidak hamil
Target 2B. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan hasil panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah		
10	Kesenjangan hasil panen pertanian (persentase hasil panen sebenarnya dibanding hasil panen potensial)	Persentase produksi yang dicapai terhadap target produksi pertanian tanaman pangan
11	Jumlah petugas penyuluh pertanian per 1.000 petani (atau proporsi petani tercakup dalam program dan layanan penyuluhan pertanian)	Jumlah penyuluh pertanian per 1000 petani, persentase petani yang mendapatkan penyuluhan
12	[Efisiensi penggunaan pupuk nitrogen (%)]	[Indikator perlu dikembangkan]
13	[Kerugian besar akibat nitrogen reaktif dan fosfor terhadap lingkungan]	[Indikator perlu dikembangkan]
14	[Akses terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan]	[Indikator perlu dikembangkan]
15	Perubahan tahunan lahan rusak atau yang menjadi gurun (% atau ha)	Perubahan tahunan luas lahan kritis
16	[Produktivitas air tanaman (hasil panen (ton) per satuan air irigasi)]	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator pergerakan harga bahan pangan] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang penelitian dan pengembangan untuk pertanian dan pembangunan pedesaan (% dari GNI) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan pedesaan, indikator proksi
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator keanekaragaman genetik] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan hasil ternak (persentase hasil ternak sebenarnya dibanding hasil produksi ternak yang dapat dicapai) 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase hasil ternak yang dicapai terhadap target produksi ternak
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pertumbuhan hasil panen sereal (persentase per tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pertumbuhan hasil panen sereal (padi dan jagung)
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator kesenjangan akses irigasi] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Persentase petani yang memiliki asuransi tanaman yang sesuai secara nasional] 	[Indikator perlu dikembangkan]

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia		
Target 3A. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan mengurangi kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, kematian ibu menjadi setidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengurangi angka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun setidaknya 30 persen dari angka pada tahun 2015		
17	Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita	Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita
18	Rasio dan Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu
19	Prevalensi, angka pengobatan dan angka kematian HIV	Prevalensi HIV/AIDS, jumlah kasus baru dan kasus kumulatif, proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan ARV, kematian akibat HIV/AIDS
20	Insiden, prevalensi dan angka kematian terkait TB (Indikator MDG)	Insiden, prevalensi, dan angka kematian akibat TB
21	Insiden dan angka kematian terkait malaria (Indikator MDG)	Insiden malaria
22	Probabilitas kematian antara usia tepat 30 dan 70 tahun dari setiap penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	(Indikator belum tersedia)
23	Kematian di lalu lintas per 100.000 penduduk	Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk
24	Rata-rata polusi udara dari benda-benda partikuler di perkotaan (PM10 dan PM2.5)	Rata-rata polusi udara perkotaan (PM10)
25	Angka Harapan Hidup Sehat saat Lahir	(Indikator belum tersedia)
	• [Kematian disebabkan polusi udara dalam ruangan]	[Indikator perlu dikembangkan]
	• Insiden diare pada balita	• Insiden diare pada balita
	• Tingkat kejadian dan kematian terkait dengan hepatitis.	• Prevalensi hepatitis
Target 3B. Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatan dasar		
26	[Konsultasi dengan provider kesehatan berlisensi di fasilitas kesehatan atau dalam masyarakat per orang, per tahun]	[Indikator perlu dikembangkan]
27	[Persentase penduduk tanpa perlindungan keuangan yang efektif untuk perawatan kesehatan]	[Indikator perlu dikembangkan]
28	Persentase anak yang menerima imunisasi lengkap sesuai rekomendasi WHO	Persentase balita yang menerima imunisasi lengkap
29	Tingkat prevalensi kontrasepsi (Indikator MDG)	Tingkat prevalensi kontrasepsi

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
30	<p>[Program-program fungsional dari promosi kesehatan mental multisektoral dan pencegahan yang berlaku]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap PDB • Persentase tempat pelayanan menyeluruh dan konsisten dilengkapi dan disediakan untuk memberikan paket pelayanan dasar. • Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (orthopaedi, bidan perawat, perawat, pekerja kesehatan masyarakat, pengasuh EmOC). • Persentase penduduk dengan akses ke obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan akses komoditas secara berkelanjutan. • Persentase fasilitas perawatan kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan kode dan standar bangunan. • Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak (Indikator MDG). • Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan setidaknya empat kali kunjungan) (Indikator MDG). • Cakupan pelayanan Pasca Persalinan (satu kunjungan). • Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (MDG Indikator). • Cakupan suplemen asam folat-besi untuk ibu hamil (%). • Persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran. • Persentase HIV + ibu hamil yang menerima PMTCT (Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission). • Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS) (Indikator MDG). • Persentase balita dengan demam yang diobati dengan obat anti-malaria yang tepat (Indikator MDG). • Persentase penduduk di daerah endemik-malaria tidur dengan kelambu berinsektisida (Indikator MDG). 	<p>Fasilitas program kesehatan jiwa di RS dan puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap PDB • Persentase fasilitas kesehatan (rumah sakit umum/pemerintah, dan puskesmas) yang memberikan paket pelayanan dasar • Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan tenaga gizi) • Persentase fasilitas kesehatan menurut ketersediaan obat umum, obat gigi, obat/alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, vaksin, dan alat kesehatan dalam dan luar gedung <p>(Indikator belum tersedia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak • Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan setidaknya empat kali kunjungan) • Cakupan perawatan nifas (satu kunjungan) • Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir • Persentase pemberian Fe3 ibu hamil • Persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran • Persentase HIV + ibu hamil yang menerima PMTCT • Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS) • Persentase balita dengan demam yang diobati dengan obat anti-malaria yang tepat • Persentase balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus malaria yang menerima terapi antimalaria lini pertama sesuai dengan kebijakan nasional yang telah dikonfirmasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus malaria yang menerima terapi antimalaria lini pertama sesuai dengan kebijakan nasional yang telah dikonfirmasi.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase wanita hamil yang menerima malaria IPT (In Pregnant Treatment) di daerah endemik. 	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase wanita dengan screening kanker serviks. 	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penderita hipertensi yang didiagnosa dan menerima pengobatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi hipertensi dan penderita yang sedang minum obat hipertensi sendiri.
	<ul style="list-style-type: none"> Angka Kesembuhan Penyakit Tropis Terabaikan (NTD). 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penderita kusta PB, MB, dan Filariasis, indikator proksi
	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu operasi elektif. 	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu operasi elektif
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penerima manfaat dari rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan klinik yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan kebersihan yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah sakit umum/ pemerintah dan puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran pemerintah dan swasta untuk penelitian dan pengembangan pada kesehatan (% thd PNB) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (% thd PNB), indikator proksi
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase usia terstandar (terhadap distribusi usia populasi dunia) penderita diabetes (sebaiknya berdasarkan HbA1c), hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan penyakit pernapasan kronis 	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) berdasarkan jenis
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah.
Target 3C. Melaksanakan kebijakan untuk mendorong aktivitas fisik dan pola pangan yang sehat, mengurangi perilaku tidak sehat seperti penggunaan tembakau sebanyak 30% dan penggunaan alkohol yang berbahaya sebanyak 20%		
31	Skor keragaman bahan makanan di rumah tangga	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), indikator proksi
32	Persentase populasi kelebihan berat badan dan obesitas	Prevalensi gemuk dan sangat gemuk
33	Penggunaan produk tembakau saat ini (tingkat standarisasi-umur)	Prevalensi perokok saat ini penduduk usia 15 tahun ke atas
34	Penggunaan alkohol yang berbahaya	Prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan 1 bulan terakhir
	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi ketidakaktifan fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penduduk umur ≥ 10th dengan aktivitas fisik yang kurang
	<ul style="list-style-type: none"> Fraksi kalori dari lemak jenuh dan gula tambahan (%). 	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata populasi berusia standar dengan konsumsi garam (natrium klorida) per hari dalam gram pada orang berusia 18 tahun keatas. 	(Indikator belum tersedia)

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi orang (usia 18 + tahun) yang mengkonsumsi kurang dari lima porsi (400 gram) buah dan sayur per hari. Persen perubahan konsumsi daging merah per kapita tahun dasar 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi konsumsi buah dan sayur penduduk umur ≥ 10th menurut jumlah porsi dalam seminggu (Indikator belum tersedia)
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua		
Target 4A. Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas.		
35	Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan pra-dasar yang berkualitas	Persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah
36	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI)	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase balita yang memperoleh pengasuhan yang responsif dan stimulatif di lingkungan yang aman. Persentase siswa yang terdaftar dalam program pengembangan anak usia dini yang menyediakan air minum dasar, sanitasi yang memadai, dan layanan kesehatan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase balita terlanjar, indikator proksi (Indikator belum tersedia)
Target 4B. Semua anak perempuan dan anak laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol.		
37	Angka kelulusan Pendidikan Dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki	Angka Kelulusan SD menurut jenis kelamin
38	[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan mendasar dalam matematika pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel)]	[Indikator perlu dikembangkan]
39	Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki	Angka Kelulusan SMP dan SMA menurut jenis kelamin
40	[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah menengah]	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kewarganegaraan global dan pembangunan berkelanjutan (tolak ukur nasional perlu dikembangkan) hingga usia 14 tahun] [Indikator untuk tenaga guru/pengajar yang berkualitas] 	[Indikator perlu dikembangkan] [Indikator perlu dikembangkan]
Target 4C. Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif.		

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
41	Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki. <ul style="list-style-type: none"> Persentase remaja (15-19 tahun) yang memiliki akses program transisi sekolah ke bekerja Proporsi orang dewasa muda (18-24 tahun) yang memiliki akses program pembelajaran Proporsi orang dewasa muda (18-24 tahun) yang melek huruf. 	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat) Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/ sedang mengikuti kursus Persentase penduduk (18-24 tahun) yang melek huruf
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan		
Target 5A. Mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak.		
42	Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir	Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir (ad-hoc) atau persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan (rutin) yang merupakan indikator proksi
43	Persentase kasus kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, diselidiki dan dijatuhi hukuman	Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi
44	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun	Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin/ hidup bersama atau berstatus kawin/ hidup bersama sebelum berusia 18 tahun
45	Prevalensi praktek tradisional yang berbahaya, termasuk sunat pada perempuan	Persentase pernah disunat pada anak perempuan umur 0-11 tahun
Target 5B. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender		
46	Jumlah rata-rata jam yang dihabiskan untuk pekerjaan dibayar dan tidak dibayar (beban kerja total), berdasarkan jenis kelamin	Rata-rata jam kerja pekerja dibayar dan tidak dibayar
47	Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/atau kantor daerah <ul style="list-style-type: none"> Proporsi perempuan di perusahaan multinasional Kesenjangan gender dalam upah, menurut sektor kegiatan ekonomi Persentase perempuan tanpa pendapatan sendiri 	Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/atau kantor daerah <ul style="list-style-type: none"> Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan dan teknisi Rasio upah yang diterima pekerja perempuan terhadap laki-laki Persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar
Target 5C. Mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya, dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela.		
48	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi (Indikator MDG yang dimodifikasi)	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi
49	Angka kelahiran total	Angka kelahiran total

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata usia ibu saat kelahiran anak pertama [Indikator pendidikan kesehatan seksual] 	<ul style="list-style-type: none"> Usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama [Indikator perlu dikembangkan]
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan		
Target 6A. Menjamin akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat		
50	Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut perkotaan/ pedesaan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak
51	Persentase penduduk yang menggunakan sanitasi dasar, menurut perkotaan/ pedesaan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi] Persentase siswa yang mendaftar masuk sekolah dasar dan menengah yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan layanan kesehatan yang memadai. Persentase penerima manfaat rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan klinik yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan layanan kesehatan yang memadai. Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan di rumah. Persentase penduduk yang membuang kotorannya di alam terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator perlu dikembangkan] (Indikator belum tersedia) Persentase rumah sakit umum/ pemerintah dan puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL) Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/ SPAL.
Target 6B. Memastikan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk saat ini dan yang akan datang		
52	Persentase pengolahan air limbah sesuai standar nasional, menurut sumber rumah tangga dan industri	(Indikator belum tersedia)
53	Persentase total sumber air yang digunakan	Persentase total sumber air yang digunakan
54	[Pelaporan otoritas DAS internasional tentang manajemen DAS lintas batas/negara]	[Indikator perlu dikembangkan]
Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern		
Target 7A. Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030 dan 2050.		
55	Proporsi penduduk dengan akses terhadap solusi memasak modern, menurut perkotaan/pedesaan	Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/ elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak
56	Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik yang dapat diandalkan, menurut perkotaan/ pedesaan	Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN
57	Insentif implisit untuk energi rendah karbon pada sektor listrik (diukur sebagai US\$/MWh atau US\$ per ton CO2 yang harus dihindari)	(Indikator belum tersedia)
58	Tingkat perbaikan intensitas energi primer	Tingkat intensitas energi primer

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> Energi primer menurut jenisnya Subsidi bahan bakar fosil (\$ atau %GNI) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi final energi primer menurut jenisnya Subsidi bahan bakar fosil (\$ atau %GNI)
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua		
Target 8A. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan laporan terintegrasi hingga 2020		
59	Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PPP, metode US\$ Atlas saat ini)	Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PPP, metode US\$ Atlas saat ini)
60	Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (SEEA)	Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (SEEA)
	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Indikator MDG) 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
Target 8B. Setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua		
61	Tingkat pekerja muda, baik sektor formal maupun informal	Persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut sektor formal dan informal
62	[Indeks pekerjaan layak]	[Indikator perlu dikembangkan]
63	Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktik	Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktik
	<ul style="list-style-type: none"> Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64) Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja Persentase penduduk muda yang tidak sedang mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan Angka penduduk miskin yang bekerja, diukur dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari Pendapatan rumahtangga, termasuk dalam bentuk jasa-jasa (PPP, US\$ terkini) 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64) Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja Persentase penduduk muda yang tidak sedang mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan Persentase pekerja dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari Pendapatan rumahtangga, termasuk dalam bentuk jasa-jasa (PPP, US\$ terkini)
Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi		
Target 9A. Menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi mobile dan broadband)		
64	Akses terhadap jalan untuk segala cuaca/ all weather road (persentase akses pada [x] km jarak ke jalan)	Akses terhadap jalan untuk segala musim/ all season road, indikator proksi
65	Langganan broadband telepon genggam per 100 penduduk, menurut perkotaan/pedesaan	Langganan broadband telepon genggam per 100 penduduk, menurut perkotaan/pedesaan
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumahtangga yang memiliki internet, menurut tipe layanan di daerah pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumahtangga dengan akses internet di pedesaan
Target 9B. Mempercepat adopsi teknologi baru untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
66	[Indeks kinerja infrastruktur TIK]	[Indikator perlu dikembangkan]
67	Peneliti dan teknisi di bidang penelitian dan pengembangan (per sejuta penduduk)	(Indikator belum tersedia)
Target 9C. Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan		
68	Nilai tambah sektor manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB	Nilai tambah sektor manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB
69	Jumlah emisi gas rumah kaca terkait energi dan industri menurut jenis gas dan sektor, dinyatakan sebagai emisi berbasis produksi dan permintaan (tCO ₂ e)	Jumlah emisi gas rumah kaca menurut jenis gas dan sektor
	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan pekerjaan di sektor industri (% dari total lapangan pekerjaan) 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah pekerja sektor industri terhadap jumlah tenaga kerja
Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara		
Target 10A. Mengurangi hingga setengah proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah median pendapatan nasional		
70	[Indikator ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi Pendapatan Nasional Bruto dari 10% penduduk terkaya atau rasio Palma]	[Indikator perlu dikembangkan]
71	Persentase rumah tangga dengan pendapatan dibawah 50% dari median pendapatan (kemiskinan relatif)	Persentase rumah tangga dengan pendapatan di bawah 50% dari median pendapatan (kemiskinan relatif)
	<ul style="list-style-type: none"> Koefisien gini 	<ul style="list-style-type: none"> Koefisien gini
	<ul style="list-style-type: none"> Persistensi pendapatan/ upah 	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator migrasi] 	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 10B. Mencapai keuangan publik internasional dan domestik yang memadai untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu proporsi BPR terhadap pendapatan nasional bruto sebesar 0,7 persen untuk semua negara berpendapatan tinggi		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase BPR netto untuk negara kurang berkembang sebagai persentase terhadap Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi (Indikator MDG yang dimodifikasi) 	Indikator untuk negara berpendapatan tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> BPR sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto negara rentan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase BPR terhadap pendapatan nasional bruto
	<ul style="list-style-type: none"> [Biaya rata-rata remitansi] 	<ul style="list-style-type: none"> [Biaya rata-rata remitansi]
Tujuan 11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan		
Target 11A. Meningkatkan standar hidup di permukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan		
72	Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau permukiman informal (Indikator MDG)	Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh
73	[Indikator pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan untuk setiap aglomerasi perkotaan yang penduduknya di atas 250.000]	[Indikator perlu dikembangkan]

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator keterkaitan ekonomi perkotaan-pedesaan] 	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 11B. Memastikan akses universal yang aman dan layak terhadap lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah, dan transportasi yang rendah karbon		
74	Persentase perempuan dan laki-laki di daerah perkotaan dengan kepemilikan yang aman, yang diukur dengan (i) persentase yang memiliki sertifikat rumah, dan (ii) persentase penduduk yang tidak takut akan pengusuran terhadap rumahnya	(Indikator belum tersedia)
75	Persentase rumah tangga di perkotaan dengan pengumpulan limbah padat reguler (dan didaur ulang)	Persentase rumah tangga di perkotaan menurut perlakuan terhadap sampah
76	Ruang terbuka hijau di perkotaan (per kapita)	Ruang terbuka hijau di perkotaan (per kapita)
77	Akses penduduk terhadap angkutan umum	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman Hayati Kota (Indeks Singapore) 	(Indikator belum tersedia)
Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan		
Target 12A. Menjamin kerugian makanan yang rendah, dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer		
78	Indikator Kerugian Pangan Global (atau indikator lain perlu dikembangkan untuk mengetahui proporsi kerugian pangan atau pangan yang terbuang dalam rantai nilai setelah panen)	Kerugian pascapanen (susut hasil panen padi), indikator proksi
79	Konsumsi bahan perusak ozon (Indikator MDG)	Konsumsi bahan perusak ozon
80	Kedalaman optik aerosol (AOD)	Kedalaman optik aerosol (AOD)
	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas CO₂ sektor bangunan dan bangunan baru (kgCO₂/m²/tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas CO₂ sektor konstruksi, indikator proksi
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator polusi kimia] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator bahan kimia beracun] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator kebijakan pariwisata berkelanjutan] 	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 12B. Menjamin pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs		
81	[Proporsi perusahaan senilai lebih dari [\$ 1000000000] yang menerbitkan laporan terintegrasi]	[Indikator perlu dikembangkan]
82	Publikasi kontrak berbasis sumber daya	(Indikator belum tersedia)
	<ul style="list-style-type: none"> [Strategi analisa dampak lingkungan dan sosial diperlukan] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Peran pengawasan cabang legislatif mengenai kontrak dan lisensi berbasis sumber daya] 	[Indikator perlu dikembangkan]
Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya		
Target 13A. Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk 2020, 2030, dan 2050		

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
83	Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2° C atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050	(Indikator belum tersedia)
84	Intensitas CO ₂ dari sektor listrik dan kapasitas pembangkit listrik baru (gCO ₂ per kWh)	Intensitas CO ₂ dari sektor listrik (gCO ₂ per kWh)
85	Intensitas CO ₂ dari sektor transportasi (gCO ₂ /vkm), mobil baru (gCO ₂ /pkm) dan truk (tCO ₂ /tkm)	Intensitas CO ₂ dari sektor transportasi (gCO ₂ /vkm)
Target 13B. Mengurangi emisi GRK yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah, dan industri.		
86	Emisi GRK netto di Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya(AFOLU) (tCO ₂ e)	Emisi GRK netto di Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya(AFOLU) (tCO ₂ e)
	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas emisi rumah kaca di wilayah pengelolaan hutan (GtCO₂e/ha) 	(Indikator belum tersedia)
Target 13C. Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim		
87	Pendanaan iklim resmi negara-negara maju yang menjadi tambahan untuk BPR (dalam US\$)	Indikator untuk negara maju
	<ul style="list-style-type: none"> [Indeks Aksi Perubahan Iklim] 	[Indikator perlu dikembangkan]
Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan		
Target 14A. Menjamin jasa ekosistem kelautan yang aman , dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut		
88	Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index)	Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index)
89	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Indikator MDG)	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
	<ul style="list-style-type: none"> [Penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Eutrofikasi muara utama] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> [Indikator pelaksanaan strategi perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut] 	[Indikator perlu dikembangkan]
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup
Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati		
Target 15A. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian		
90	Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya [Indikator MDG yang dimodifikasi]	Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya
Target 15B. Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.		

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
91	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
	• Peningkatan kepemilikan lahan dan tata kelola hutan	(Indikator belum tersedia)
	• Indeks Vitalitas Pengetahuan Lingkungan Tradisional (VITEK)	(Indikator belum tersedia)
	• Indikator konservasi ekosistem gunung]	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 15C. Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau, dan melindungi jasa ekosistem darat paling lambat pada 2020		
92	Red List Index (kelompok spesies utama negara dan species yang diperdagangkan untuk internasional)	Red List Index (kelompok spesies utama negara dan species yang diperdagangkan untuk internasional)
93	Daerah keanekaragaman hayati yang dilindungi	(Indikator belum tersedia)
	• Kelimpahan spesies asing yang masuk	(Indikator belum tersedia)
Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan		
Target 16A. Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang, untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik		
94	Cedera dan kematian akibat kekerasan per 100.000 penduduk	Jumlah desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka), indikator proksi
95	Pengungsi dan pengungsian internal akibat konflik dan kekerasan	Pengungsi dan pengungsian internal akibat konflik dan kekerasan
96	Persentase darurat banding PBB yang disampaikan	Indikator internasional
	• [Indikator anak putus sekolah karena konflik atau bencana alam]	[Indikator perlu dikembangkan]
	• Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau area mereka tinggal	• Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka
	• Frekuensi pembayaran gaji pasukan keamanan	(Indikator belum tersedia)
	• [Indikator kerjasama internasional dalam mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan]	[Indikator perlu dikembangkan]
• [Indikator reformasi sektor keamanan]	[Indikator perlu dikembangkan]	
Target 16B. Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu pada tahun 2020, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan,		
97	Persepsi korupsi di sektor publik	Corruption Perception Index (CPI), Indeks Persepsi Korupsi
98	Aset dan kewajiban BIS melaporkan bank di havens pajak internasional sesuai definisi OECD), menurut negara	Indikator internasional

No	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia
99	Penerbitan semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pada kontrak berbasis sumber daya	(Indikator belum tersedia)
	• [Indikator total arus keuangan terlarang]	[Indikator perlu dikembangkan]
	• [Kepatuhan dengan OECD atau Konvensi Anti-Suap lainnya]	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 16C. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial		
100	Persentase anak di bawah usia 5 yang lahir terdaftar dengan otoritas sipil	Persentase balita yang memiliki akta kelahiran
101	Kepatuhan terhadap rekomendasi dari UPR dan Perjanjian PBB	Kepatuhan terhadap rekomendasi dari UPR dan Perjanjian PBB
102	[Indikator kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, asosiasi]	Indikator dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat (ID)
Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan		
Target 17A. Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan		
103	Rata-rata tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju pada produk pertanian dan tekstil dan pakaian dari negara-negara berkembang (Indikator MDG)	Indikator untuk negara maju
104	Laporan Tahunan BIS, IASB, IFRS, IMF, WIPO, WTO [organisasi lain yang akan ditambahkan] pada hubungan antara aturan internasional dan SDGs	Indikator internasional
Target 17B. Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap Pendapatan Nasional sebanyak 0.7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi		
105	ODA dan hibah swasta netto dalam Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi	Indikator untuk negara berpendapatan tinggi
106	Pendapatan Domestik dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai persen dari Pendapatan Nasional Bruto	Indikator belum tersedia
107	Arus netto swasta untuk pembangunan berkelanjutan pada harga pasar dalam bentuk proporsi dari Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi	Indikator untuk negara berpendapatan tinggi
108	Persen bantuan pembangunan resmi (ODA), hibah swasta netto, dan pembiayaan iklim resmi yang disalurkan melalui prioritas yang dikumpulkan dengan mekanisme pembiayaan multilateral	Indikator untuk negara berpendapatan tinggi
	• [Total Dukungan Resmi untuk Pembangunan]	[Indikator perlu dikembangkan]
Target 17C. Memperkuat sarana dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
109	[Indikator investasi pada data dan pemantauan]	[Indikator perlu dikembangkan]
110	Kesejahteraan evaluatif dan positive mood affect	Indeks Kebahagiaan

Sumber Data, Periodisasi, Level Penyajian, dan Disagregasi Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat					
Target 1A. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kemiskinan absolut (kurang dari \$ 1,25 per hari)					
1	Persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari (PPP)	BPS (Susenas)	Tahunan	Nasional	Jenis kelamin, usia KRT,
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ Kota	Jenis kelamin dan usia KRT
3	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial	BPS (Susenas/ Survey Perlindungan Sosial 2013)	Tahunan/ Ad-hoc	Provinsi	Jenis kelamin dan umur (Sejak tahun 2013)
	• Indeks kedalaman kemiskinan	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ Kota	-
Target 1B. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah perdesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana					
4	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat di perdesaan	BPN	Tahunan	Provinsi	Jenis hak
	Persentase realisasi terhadap target sertifikasi tanah di perdesaan	BPN	Tahunan	Provinsi	Jenis program
5	Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia	BNPB	Tahunan	Kabupaten/ Kota	Jenis kelamin dan usia korban, jenis bencana
	Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan \$US	BNPB	Tahunan	Kabupaten/ Kota	-
	• Persentase penduduk terhadap akses jasa keuangan formal/perbankan	BI (Survey Neraca Rumah Tangga)	Tahunan	Nasional	Umur, jenis kelamin dan jenis akses
	• Persentase rumahtangga yang menerima kredit usaha	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ kota	-
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan					
Target 2A. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang dan stunting pada anak					
6	Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ kota	-
7	Prevalensi balita dengan keadaan stunting (tinggi badan kurang)	Kemenkes (Riskasdas)	3 Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin, pendapatan ruta, kota-desa
	• Kontribusi jumlah kalori dari bahan pangan non-pokok	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ kota	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi anemia pada perempuan usia subur yang tidak hamil 	Kemendes (Risksdas)	3 tahunan	Provinsi	Kota-desa
Target 2B. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan hasil panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah					
8	Persentase produksi yang dicapai terhadap target produksi pertanian tanaman pangan	BPS dan Kementan	Tahunan	Provinsi	Jenis tanaman pangan
9	Jumlah penyuluh pertanian per 1000 petani	Kementan, BPS	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin
	Persentase petani yang mendapatkan penyuluhan	BPS (ST)	10 Tahunan	Kabupaten/kota	Jenis penyuluhan
10	Perubahan tahunan luas lahan kritis	Kemendhut	Tahunan	Provinsi	Tingkat kekritisian
	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan perdesaan (persentase terhadap Pendapatan Nasional Bruto) 	Kemendek dan BPS	Tahunan	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase hasil ternak yang dicapai terhadap target produksi ternak 	BPS dan Kementan	Tahunan	Provinsi	Jenis ternak
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pertumbuhan hasil panen sereal (padi dan jagung) 	BPS (Survei Ubinan)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia					
Target 3A. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan mengurangi kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, kematian ibu menjadi setidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengurangi angka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun setidaknya 30 persen dari angka pada tahun 2015					
11	Angka kematian neonatal, bayi dan balita	BPS (SDKI, SP dan Supas)	Tahunan (Proyeksi)	Provinsi	Usia kematian bayi, kota-desa
12	Angka Kematian Ibu	BPS (SDKI, SP, SUPAS)	Tahunan (Proyeksi)	Provinsi	Usia, tingkat pendapatan, dan kota-desa
13	Prevalensi HIV/AIDS, jumlah kasus baru dan kasus kumulatif	Kemendes	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin, umur
	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan ARV	Kemendes	Tahun	Provinsi	Umur dan jenis kelamin penderita
	Angka kematian akibat HIV yang dilaporkan (CFR)	Kemendes	Tahunan	Provinsi	Umur dan jenis kelamin penderita
14	Angka kejadian tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	WHO (Laporan TB Global)	Tahunan	Nasional	-
	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	WHO (Laporan TB Global) atau Kemendes (Risksdas)	Tahunan atau 3 Tahunan	Nasional atau provinsi	Karakteristik penderita, kota-desa

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	WHO (Laporan TB Global)	Tahunan	Nasional	-
15.	Insiden malaria	Kemenkes (Risikesdas)	3 Tahunan	Provinsi	Umur, jenis kelamin, kota-desa, kuintil pendapatan
16	Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	Polri, BPS	Tahunan	Provinsi	Akibat kecelakaan
17	Rata-rata polusi udara perkotaan (PM10)	WHO	Tahunan	Nasional	5 kota besar
	• Insiden diare pada balita	Kemenkes (Risikesdas)	3 Tahunan	Provinsi	-
	• Prevalensi hepatitis	Kemenkes (Risikesdas)	3 Tahunan	Provinsi	-
Target 3B. Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatan dasar					
18	Persentase balita yang menerima imunisasi lengkap	BPS (Susenas) atau Kemenkes (Risikesdas)	Tahunan atau 3 Tahunan	Kabupaten/kota atau Provinsi	Usia, jenis kelamin
19	Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR)	BPS (Susenas atau SDKI)	Tahunan atau 5 Tahunan	Kabupaten/kota	Usia, status perkawinan
20	Fasilitas program kesehatan jiwa di RS dan Puskesmas	Kemenkes (Risfaskes)	(survei baru)	Provinsi	-
	• Persentase pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap PDB	Kemenkeu dan BPS	Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan paket pelayanan dasar	Kemenkes (Risfaskes)	(survei baru)	Provinsi	-
	• Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan tenaga gizi)	BPS (Podes)	3 Tahunan	Kabupaten/Kota	Jenis profesi tenaga kesehatan
	• Persentase fasilitas kesehatan menurut ketersediaan obat umum, obat gigi, obat/alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, vaksin, dan alat kesehatan dalam dan luar gedung	Kemenkes (Risfaskes)	(survei baru)	Provinsi	-
	• Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin
	• Cakupan pelayanan antenatal, setidaknya 1 dan 4 kali kunjungan	BPS (SDKI)	5 Tahunan	Provinsi,	Kota-desa

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
	• Cakupan perawatan nifas (1 kunjungan)	BPS (SDKI)	5 Tahunan	Provinsi	Kota-desa
	• Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Kemenkes (STBP)	2 Tahunan	Nasional	Kelompok risti
	• Persentase pemberian Fe3 ibu hamil	Kemenkes	Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Persentase pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama kelahiran	BPS (Susenas dan SDKI) dan Kemenkes (Riskasdas)	Tahunan, 3 Tahunan, atau 5 Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Persentase HIV + ibu hamil yang menerima PMTCT	Kemenkes	Tahunan	Provinsi	-
	• Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS	Kemenkes	Tahunan	Provinsi	-
	• Proporsi balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Kemenkes (Riskasdas)	3 tahunan	Provinsi	Kota-desa
	• Proporsi balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Kemenkes (Riskasdas)	Per 3 tahun	Provinsi, kota-desa	-
	• Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologik	Kemenkes	Tahunan	Provinsi	-
	• Persentase kasus malaria yang menerima terapi antimalaria lini pertama	Kemenkes (Riskasdas)	3 Tahunan	Provinsi	-
	• Prevalensi hipertensi dan penderita yang sedang minum obat hipertensi sendiri.	Kemenkes (Riskasdas)	3 Tahunan	Provinsi	-
	• Jumlah penderita kusta PB, MB, dan Filariasis	Kemenkes	Tahunan	Provinsi	-
	• Masa tunggu operasi elektif	Kemenkes	Tahunan	Provinsi	-
	• Persentase rumah sakit umum/pemerintah dan puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)	Kemenkes (Risfaskes)	(survei baru)	Provinsi	-
	• Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (% thd PNB)	Kemenkes, BPS	Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) berdasarkan jenis	Kemenkes (Riskasdas)	3 Tahunan	Provinsi	Kota-desa
	• Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah	BPS (SDKI)	5 Tahunan	Kabupaten/kota	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
Target 3C. Melaksanakan kebijakan untuk mendorong aktivitas fisik dan pola pangan yang sehat, mengurangi perilaku tidak sehat seperti penggunaan tembakau sebanyak 30 persen dan penggunaan alkohol yang berbahaya sebanyak 20 persen					
21	Skor pola pangan harapan (PPH)	BPS (Susenas)	Tahunan	Provinsi	Jenis kelompok bahan pangan, kota-desa
22	Prevalensi gemuk dan sangat gemuk	Kemenkes (Risksedas)	3 Tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
23	Prevalensi perokok saat ini penduduk usia 15 tahun ke atas	Kemenkes (Risksedas)	3 Tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
24	Prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan 1 bulan terakhir	Kemenkes (Risksedas)	3 Tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
	• Proporsi penduduk umur ≥10 tahun dengan aktivitas fisik kurang	Kemenkes (Risksedas)	3 Tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
	• Proporsi konsumsi buah dan sayur penduduk umur ≥10 tahun menurut jumlah porsi dalam seminggu	Kemenkes (Risksedas)	3 Tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua					
Target 4A. Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas					
25	Persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Usia, jenis kelamin, pendapatan rata
	• Persentase balita terlantar	BPS	Tahunan	Kabupaten/kota	-
Target 4B. Semua anak perempuan dan anak laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol					
26	Angka Kelulusan SD	Kemendiknas	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin
27	Angka Kelulusan SMP dan SMA	Kemendiknas	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin
Target 4C. Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif					
28	APK Pendidikan Tinggi	BPS(Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Jenis kelamin
	• Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat)	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin
	• Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/ sedang mengikuti kursus	BPS (Susenas)	3 Tahunan	Kabupaten/kota	Jenis kelamin
	• Persentase penduduk (18-24 tahun) yang melek huruf	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Jenis kelamin

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan					
Target 5A. Mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak					
29	Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir (ad-hoc)	BPS & Kemen PPA (SKTPA)	-	Provinsi	Usia, status perkawinan, kota-desa, jenis kekerasan
	Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan (rutin)	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Usia, status perkawinan
30	Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Jenis kelamin dan umur
31	Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama atau berstatus kawin/hidup bersama sebelum berusia 18 tahun	BPS (SDKI, Susenas)	5 Tahunan, Tahunan	Provinsi, Kabupaten/kota	Usia, kota-desa, pendapatan
32	Persentase pernah disunat pada anak perempuan umur 0-11 tahun	BPS (SDKI)	5 Tahunan	Provinsi	-
Target 5B. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender					
33	Rata-rata jam kerja pekerja dibayar dan tidak dibayar	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	Jenis kelamin, umur
34	Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/atau kantor daerah	KPU	Tahun pemilu	Provinsi	-
	• Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan dan teknisi	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	• Rasio upah yang diterima pekerja perempuan terhadap laki-laki	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	• Persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
Target 5C. Mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya, dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela.					
35	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi	BPS (SDKI)	5 tahunan	Provinsi	Karakteristik responden, kota-desa
36	Angka Kelahiran Total	BPS (Susenas, SDKI)	Tahunan atau 5 Tahunan	Kabupaten/kota	Kelompok umur
	• Usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama	BPS (SDKI)	5 tahunam	Provinsi	Kota-desa

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan					
Target 6A. Memastikan akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat					
37	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
38	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak,	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Persentase rumah sakit umum/pemerintah dan puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)	Kemenkes (Risfaskes)	(survei baru)	Provinsi	-
	• Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah	BPS (SDKI)	5 Tahunan	Kabupaten/kota	-
	• Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL.	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
Target 6B. Memastikan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk saat ini dan yang akan datang					
39	Persentase total sumber air yang digunakan	FAO (AQUASTAT)	10 Tahunan	Nasional	-
Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern					
Target 7A. Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030, dan 2050					
40	Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
41	Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
42	Tingkat intensitas energi primer	Kemen ESDM, BPS	Tahunan	Nasional	Sektor
	• Konsumsi final energi primer menurut jenisnya	Kemen ESDM	Tahunan	Nasional	Jenis sumber
	• Subsidi bahan bakar fosil (\$ atau Rp atau % thd GNI)	Kemen ESDM, BPS	Tahunan	Nasional	-
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua					
Target 8A. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan lapangan kerja terintegrasi hingga 2020					
43	PNB per kapita (PPP, current US\$ Atlas method)	Bank Dunia	Tahunan	Nasional	-
44	Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan	BPS	Tahunan	Nasional	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 	BPS (PDB Nasional dan Sakernas)	Tahunan	Nasional	-
Target 8B. Setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua					
45	Persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut sektor formal dan informal	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
46	Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktek	Kemenakertrans/ Kemenlu	Tahunan	Nasional	-
	<ul style="list-style-type: none"> Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64) 	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja 	BPS (Sakernas)	Per Tahun	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penduduk muda yang tidak sedang mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) 	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan 	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pekerja dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari 	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	-
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan rumah tangga, termasuk dalam bentuk jasa-jasa (PPP, US\$ terkini) 	BPS (SKTIR)	Tahunan	Nasional	-
Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi					
Target 9A. Menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi mobile dan broadband					
47	Akses terhadap jalan untuk segala musim/ <i>all season road</i>	BPS (PODES)	3 Tahunan	Nasional	-
48	Langgan broadband telepon genggam per 100 penduduk, menurut perkotaan/ pedesaan	ITU	Tahunan	Nasional	-
	Persentase rumah tangga dengan akses internet di pedesaan	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ kota	-
Target 9B. Mempercepat adopsi teknologi baru untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan					
-	-	-	-	-	-
Target 9C. Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan					
49	Nilai tambah sektor manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB	BPS (PDB Nasional)	Triwulanan	Nasional	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
50	Jumlah emisi gas rumah kaca	ESDM	Tahunan	Nasional	Sektor, gas
51	Persentase jumlah pekerja sektor industri terhadap total tenaga kerja	BPS (Sakernas)	Tahunan	Provinsi	Subsektor
Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara					
Target 10A. Mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah median pendapatan nasional					
52	Persentase rumahtangga dengan pendapatan di bawah 50% dari median pendapatan ("kemiskinan relatif")	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Karakteristik ruta
	Koefisien Gini	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/Kota	-
Target 10B. Mencapai keuangan publik internasional dan domestik yang memadai untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu proporsi BPR terhadap pendapatan nasional bruto sebesar 0,7 persen untuk semua negara berpendapatan tinggi					
	Persentase BPR terhadap Pendapatan Nasional Bruto	Kemenkeu, BPS	Tahunan	Nasional	-
Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan					
Target 11A. Meningkatkan standar hidup di pemukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan					
53	Persentase penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh	BPS (Susenas)	Tahunan	Kabupaten/kota	Usia dan jenis kelamin KRT
Target 11B. Memastikan akses universal yang aman dan layak terhadap lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon					
54	Persentase rumah tangga di perkotaan menurut perlakuan terhadap sampah	BPS (SPPLH)	Tahunan	Kabupaten/kota	-
55	Ruang terbuka hijau di perkotaan	Kemen PU	Tahunan	Provinsi	-
Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan					
Target 12A. Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer					
56	Kerugian pascapanen (susut hasil panen padi)	BPS (Survei Susut)	Tahunan	Provinsi	-
57	Konsumsi bahan perusak ozon	Kemen LH	Tahunan	Nasional	-
58	Kedalaman optik aerosol (AOD)	UNEP	-	Nasional	-
	• Intensitas CO2 sektor konstruksi	Kemen ESDM	Tahunan	Nasional	-
Target 12B. Menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs					
-	-	-	-	-	-
Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya					
Target 13A. Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050					
59	Intensitas CO2 dari sektor listrik (gCO2 per KWh)	Kemen ESDM	Tahunan	Nasional	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
60	Intensitas CO2 dari sektor transportasi (gCO2/vkm)	Kemen ESDM	Tahunan	Nasional	Jenis kendaraan
Target 13B. Mengurangi emisi GRK yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri					
	<ul style="list-style-type: none"> Emisi GRK netto di pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya 	Kemen ESDM	Tahunan	Nasional	-
Target 13C. Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim					
-	-	-	-	-	-
Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan					
Target 14A. Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut					
61	Ocean Health Index	OHI Partnership	Tahunan	Nasional	-
62	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	KKP	Tahunan	Nasional	-
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup 	KKP, LIPI	Tahunan	Nasional	-
Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati					
Target 15A. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian					
63	Perubahan tahunan kawasan hutan dan lahan budidaya	Kemehut	Tahunan	Provinsi	-
Target 15B. Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan					
64	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Kemehut	Tahunan	Provinsi	-
Target 15C. Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat paling lambat pada 2020					
65	Red List Index	IUCN Red List	4 atau 5 Tahunan	Nasional	-
Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan					
Target 16A. Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik					
66	Jumlah desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka), indikator proksi	BPS (PODES)	3 Tahunan	Provinsi	-

No	Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia	Sumber Data	Periodisasi	Level Penyajian	Disagregasi
67	Pengungsi dan pengungsian internal akibat konflik dan kekerasan	IDMC	Tahunan	Nasional	-
	• Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendiri di malam hari di kota atau area mereka tinggal	Gallup Survey	Tahunan	Nasional	-
Target 16B. Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu pada tahun 2020, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan					
68	Corruption Perception Index (CPI), IPK Kota di Indonesia	TI, TI-Indonesia	Tahunan, 2 tahunan	Nasional, provinsi (ibukota)	-
Target 16C. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial					
69	Persentase balita yang memiliki akta kelahiran	BPS(Susenas)	Tahunan	Kabupaten/ kota	Jenis kelamin
70	Kepatuhan terhadap rekomendasi dari UPR dan perjanjian PBB	UN OHCHR	Tahunan	Nasional	-
71	Indikator dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat	BPS (IDI)	Tahunan	Provinsi	-
Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan					
Target 17A. Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan					
-	-	-	-	-	-
Target 17B. Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap pendapatan nasional sebanyak 0,7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi					
-	-	-	-	-	-
Target 17C. Memperkuat sarana dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan					
72	Indeks Kebahagiaan	BPS (SPTK)	(survei baru)	Nasional	Karakteristik responden, kota- desa

Ket: Baris (indikator) yang bertanda bintang (*) menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan indikator tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2014. Indicator for Sustainable Development Goals. New York: SDSN.
- _____. 2013. Sebuah Kemitraan Global Yang Baru: Hapuskan Kemiskinan Dan Transformasi Ekonomi Melalui Pembangunan Berkelanjutan. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- _____. 2012. Kajian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi. Jakarta: Kemen ESDM.
- _____. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sekretariat Negara: Jakarta.
- _____. 2011. Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2011. Jakarta: Kemenpan/Bappenas.
- _____. 2012. Satu tahun tentang RAN-GRK. Jakarta: Kemenpan/Bappenas http://www.bappenas.go.id/files/5413/5229/8518/a-year-in-progress-ran-grk__20121226153604__0.pdf
- _____. Juni 2014. Berita Resmi Statistik.
- _____. 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS, BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan USAID. 2012. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: BPS RI.
- HLPEP. 2013. What Is The Data Revolution?. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- <http://ekuatorial.com/id/biodiversity/indonesia-tak-miliki-data-awal-keanekaragaman-hayati> (diakses 14 Oktober 2014).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Montreal (diakses 13 Oktober 2014)
- <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisisasi-Aset> (diakses 18 September 2014).
- <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisisasi-Aset> (diakses 30 September 2014).
- http://www.bps.go.id/brs_file/ik_02juni14.pdf (diakses 16 Oktober 2014).
- <http://www.gallup.com/poll/122453/understanding-gallup-uses-cantril-scale.aspx> (diakses 16 Oktober 2014).
- <http://www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/indonesia/figures-analysis> (diakses 15 Oktober 2014).
- <http://www.oceanhealthindex.org/About/FAQ/> (diakses 14 Oktober 2014)
- <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/program-penanggulangan-kemiskinan/klaster-i-1/> (diakses 1 Oktober 2014).
- Kemenpan/Bappenas. 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007. Jakarta: Kemenpan/Bappenas.
- Kementerian ESDM. 2012. Kajian Indonesia Energy Outlook. Jakarta: Kemen ESDM.
- Kementerian Kesehatan. 2012. Laporan akhir Riset Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kemenkes. http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/buku_laporan/LAPORAN_RIFASKES_NASIONAL_PKM_2011.pdf

Kementerian Kesehatan.2013. Laporan Hasil Riskesdas. Jakarta: Kemenkes.

Lembar fakta ringkasan eksekutif STBP 2011 kementerian kesehatan <http://sadarhati.org/wp-content/uploads/2012/08/STBP-2011-Ringkasan-Eksekutif.pdf>.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara: Jakarta.

SDSN. 2014. Indicator and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals, Launching a Data Revolution for the SDGs. New York: SDSN.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046,

E-mail : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>